



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LK BP BATAM TAHUN 2019

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019



(AUDITED)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
[SAP]

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta kaidah-kaidah yang terkait pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2019, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.331.713.643.060,00 atau 104,59%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2019 sebesar Rp1.273.307.499.000,00 (setelah revisi). Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.330.736.108.567,00, dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar

- Rp977.534.493,00 yang terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp111.000.000,00, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp544.290.634,00, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp322.243.859,00.
2. Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.565.257.279.198,00** atau **75,83%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.064.194.953.000,00 (setelah revisi). Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp997.015.341.731,00 atau 77,28% dari anggaran sebesar Rp1.290.129.625.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp568.241.937.467,00 atau sebesar 73,41% dari pagu anggaran sebesar Rp774.065.328.000,00 (termasuk di dalamnya Belanja Modal atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp140.822.819.470,00 atau sebesar 72,73% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp193.621.568.000,00).
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2019 adalah sebesar **Rp586.726.344.967,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp233.543.636.138,00)**, penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp422.237.966.580,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp423.215.501.073,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp977.534.493,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp188.694.330.442,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp775.420.675.409,00**.
 4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir Per 31 Desember 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar **Rp53.685.715.060.625,00** dan Kewajiban sebesar **Rp2.351.476.816.333,00** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp51.334.238.244.292,00**.

5. Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp915.825.218.343,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp2.538.942.163.042,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp1.623.116.944.699,00**, selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp4.977.871.609,00**. Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp1.628.094.816.308,00**.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2019 adalah sebesar **Rp26.799.855.089.922,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.628.094.816.308,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp25.796.996.293.865,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp294.875.300,00 dikurang Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp978.622.232.168,00, ditambah selisih revaluasi aset sebesar Rp27.454.507.260.455,00 dikurang Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp683.773.502.617,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp4.589.892.895,00, Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp365.481.676.813,00**. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar **Rp24.534.383.154.370,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai **Rp51.334.238.244.292,00**.
7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp692.671.632.122,00** (Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp586.726.344.967,00 dan Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara kas Rp105.945.287.155,00). Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp756.280.977.275,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp567.586.646.833,00 dan penurunan dari aktivitas transitoris

sebesar Rp11.729.571.248,00. Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp176.964.759.194,00, sehingga **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp869.636.391.316,00** (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp775.420.675.409,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp94.215.715.907,00).

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Pengusahaan Batam.

Batam, April 2020

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102019092997

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xii
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	8
III. NERACA	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
VI. LAPORAN ARUS KAS	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
A.4. Basis Akuntansi	19
A.5. Dasar Pengukuran	20
A.6. Kebijakan Akuntansi	20
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	34
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	34
B.2. Belanja Negara	45
B.2.1 Belanja Barang	48
B.2.2. Belanja Modal	51
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	56
C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	56
C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	56
C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA	57
C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	57

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	59
C.5. Penyesuaian Lain-lain	59
C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir.....	59
D. PENJELASAN ATAS POS.POS NERACA.....	60
D.1. Aset Lancar	60
D.1.1. Kas dan Bank	60
D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	62
D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum	67
D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	72
D.1.3. Piutang Bukan Pajak.....	74
D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	75
D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional	87
D.1.6. Persediaan	88
D.2. Aset Tetap	102
D.2.1. Tanah.....	103
D.2.2. Peralatan dan Mesin	106
D.2.3. Gedung dan Bangunan	114
D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120
D.2.5. Aset Tetap Lainnya	126
D.2.6. Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP)	127
D.2.7. Akumulasi Penyusutan	129
D.3 Aset Lainnya	129
D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	130
D.3.1.1 Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam.....	131
D.3.1.2 Kantor Air dan Limbah	131
D.3.2. Aset Tak Berwujud	132
D.3.2.1 Software	133
D.3.2.2 Lisensi	133
D.3.2.3 Hasil Kajian/Penelitian.....	133
D.3.2.4 Hak Pengelolaan Lahan	134
D.3.2.5 Aset Tidak Berwujud Lainnya	138
D.3.3 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	138
D.3.4 Aset Lain-lain.....	139
D.3.4.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan.....	139

D.3.4.2. Piutang Tidak lancar	143
D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar	145
D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar	146
D.3.4.5. Piutang TGR	147
D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain) ..	147
D.4 Kewajiban	148
D.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	148
D.4.1.1 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	148
D.4.1.2 Utang Usaha	149
D.4.1.3 Titipan Pihak Ketiga	151
D.4.1.4 Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	158
D.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka	158
D.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	159
D.5 Ekuitas	160
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	161
E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	161
E.1.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	162
E.1.2 Pendapatan Usaha Lainnya	169
E.1.3 Keuntungan Lainnya	181
E.2 Beban Pegawai	182
E.3 Beban Persediaan	183
E.4 Beban Barang dan Jasa	183
E.5 Beban Pemeliharaan	184
E.6 Beban Perjalanan Dinas	186
E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	186
E.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	187
E.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	188
E.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar	188
E.11 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	189
E.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	189
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	190
F.1 Ekuitas Awal	190
F.2 Surplus (Defisit) LO	190
F.3 Koreksi Nilai Persediaan	190

F.4 Koreksi Atas Reklasifikasi.....	191
F.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	192
F.7 Koreksi Lain-lain.....	192
F.8 Transaksi Antar Entitas.....	193
F.9 Ekuitas Akhir	195
G. TAMBAHAN PENJELASAN PADA POS LAPORAN ARUS KAS.....	196
G.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	196
G.2 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	196
H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	197
H.1 IKATAN DAN KONTIJENSI	197
H.2 HAL PENTING LAINNYA.....	223

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a : Daftar Rincian Kas
- Lampiran 1b : Daftar Rincian Saldo Bank Giro Rupiah dan Rekonsiliasi Bank
- Lampiran 1c : Daftar Rekening Bersama KSO
- Lampiran 1d : Daftar Rincian Surat Berharga
- Lampiran 1.e : Daftar Rincian Kas dan Bank berdasarkan Rekening BLU
- Lampiran 2a : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim
- Lampiran 2b : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Badan Pengelola Pelabuhan
Batam
- Lampiran 2c : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima RSBP
- Lampiran 3 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pemanfaatan Aset
- Lampiran 4 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana
- Lampiran 5 : Daftar Piutang Usaha Kantor Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi
- Lampiran 6 : Daftar Piutang Usaha Kantor Air dan Pengelolaan Limbah
- Lampiran 7 : Daftar Piutang Usaha BUBU Hang Nadim
- Lampiran 8 : Daftar Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 9 : Daftar Piutang Usaha RSBP
- Lampiran 10 : Daftar Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Lahan
- Lampiran 11 : Daftar Rincian Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 13 : Daftar Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 14 : Daftar Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 15 : Daftar Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 16 : Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 17 : Daftar Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 18 : Daftar Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 19 : Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
- Lampiran 20 : Daftar Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
- Lampiran 21 : Kronologis Piutang Royalti Pasir dan Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat
- Lampiran 22 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Air dan Limbah
- Lampiran 23 : Daftar Piutang Tidak Lancar BUBU Hang Nadim
- Lampiran 24 : Daftar Piutang Tidak Lancar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 25 : Daftar Piutang Tidak Lancar Rumah Sakit BP Batam
- Lampiran 26 : Daftar Rincian Panjar Tidak Lancar
- Lampiran 27 : Daftar Piutang Pegawai Tidak Lancar
- Lampiran 28 : Daftar Utang Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Pusat
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Air dan Limbah
- Lampiran 31 : Daftar Titipan Pihak Ketiga BUBU Hang Nadim
- Lampiran 32 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pihak Ketiga RSBP
- Lampiran 34 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Perwakilan Jakarta
- Lampiran 35 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Pengelolaan Lahan
- Lampiran 36 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 37 : Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lainnya (KSO)
- Lampiran 38 : Rincian Pendapatan Sewa



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.1, BATAM CENTRE PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462456; SITUS www.bpb Batam.go.id

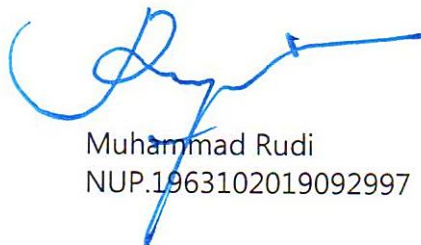
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2019 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, April 2020

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102019092997



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 (*Audited*) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batam, April 2020
Plt. Kepala
Satuan Pemeriksa Internal


Arie Handini
NIP.197410072002122002

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2019 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.331.713.643.060,00 atau 104,59%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2019 sebesar Rp1.273.307.499.000,00 (setelah revisi). Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.330.736.108.567,00, dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp977.534.493,00 yang terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp111.000.000,00, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp544.290.634,00, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp322.243.859,00.

Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal

31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.565.257.279.198,00** atau **75,83%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.064.194.953.000,00 (setelah revisi). Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp997.015.341.731,00 atau 77,28% dari anggaran sebesar Rp1.290.129.625.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp568.241.937.467,00 atau sebesar 73,41% dari pagu anggaran sebesar Rp774.065.328.000,00 (termasuk di dalamnya Belanja Modal atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp140.822.819.470,00 atau sebesar 72,73% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp193.621.568.000,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian		Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 (Audited)		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.273.307.499.000,00	1.331.713.643.060,00	104,59
Belanja Negara		2.064.194.953.000,00	1.565.257.279.198,00	75,83
1	Belanja Barang	1.290.129.625.000,00	997.015.341.731,00	77,28
2	Belanja Modal	774.065.328.000,00	568.241.937.467,00	73,41

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2019 adalah sebesar **Rp586.726.344.967,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp233.543.636.138,00)**, penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp422.237.966.580,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp423.215.501.073,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp977.534.493,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp188.694.330.442,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar

Rp775.420.675.409,00.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2019. Jumlah Aset adalah sebesar **Rp53.685.715.060.625,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.417.623.792.894,00, Aset Tetap sebesar Rp51.937.836.663.150,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp330.254.604.581,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp2.351.476.816.333,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan jumlah Ekuitas sebesar **Rp51.334.238.244.292,00**, sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar **Rp53.685.715.060.625,00**.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)		
			Jumlah	%
Asset				
Aset Lancar	1.417.623.792.894,00	1.099.734.770.135,00	317.889.022.759,00	28,91
Aset Tetap	51.937.836.663.150,00	27.155.572.252.112,00	24.782.264.411.038,00	91,26
Aset Lainnya	330.254.604.581,00	338.705.734.873,00	(8.451.130.292,00)	(2,50)
JUMLAH ASET	53.685.715.060.625,00	28.594.012.757.120,00	25.091.702.303.505,00	87,75
Kewajiban				
Kewajiban jangka pendek	2.351.476.816.333,00	1.794.157.667.198,00	557.319.149.135,00	31,06
JUMLAH KEWAJIBAN	2.351.476.816.333,00	1.794.157.667.198,00	557.319.149.135,00	31,06
Ekuitas				
Ekuitas	51.334.238.244.292,00	26.799.855.089.922,00	24.534.383.154.370,00	91,55
JUMLAH EKUITAS	51.334.238.244.292,00	26.799.855.089.922,00	24.534.383.154.370,00	91,55
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	53.685.715.060.625,00	28.594.012.757.120,00	25.091.702.303.505,00	87,75

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp915.825.218.343,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp2.538.942.163.042,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional

sebesar **Rp1.623.116.944.699,00**, selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp4.977.871.609,00**. Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp1.628.094.816.308,00**.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2019 adalah sebesar **Rp26.799.855.089.922,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.628.094.816.308,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp25.796.996.293.865,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp294.875.300,00 dikurang Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp978.622.232.168,00, ditambah selisih revaluasi aset sebesar Rp27.454.507.260.455,00 dikurang Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp683.773.502.617,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp4.589.892.895,00, Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp365.481.676.813,00**. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar **Rp24.534.383.154.370,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai **Rp51.334.238.244.292,00**.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp692.671.632.122,00** (Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp586.726.344.967,00 dan Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara kas Rp105.945.287.155,00). Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp756.280.977.275,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp567.586.646.833,00 dan penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp11.729.571.248,00. Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp176.964.759.194,00, sehingga Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar

Rp869.636.391.316,00 (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp775.420.675.409,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp94.215.715.907,00).

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 (Audited)			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		1.273.307.499.000,00	1.331.713.643.060,00	104,59	1.254.800.836.915,00
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			1.330.736.108.567,00	104,51	1.254.775.291.915,00
2. Pendapatan PNBP Lainnya			977.534.493,00	0,08	25.545.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.273.307.499.000,00	1.331.713.643.060,00	104,59	1.254.800.836.915,00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Barang	B.2.1.				
1. Belanja Pegawai		604.840.038.000,00	514.864.945.005,00	85,12	509.943.084.254,00
2. Belanja Barang		130.015.361.000,00	105.385.401.815,00	81,06	113.440.998.862,00
3. Belanja Jasa		311.382.767.000,00	237.010.114.630,00	76,12	205.858.287.238,00
4. Belanja Pemeliharaan		188.300.767.000,00	104.850.030.995,00	55,68	75.691.587.195,00
5. Belanja Perjalanan		55.074.740.000,00	34.876.748.446,00	63,33	23.633.648.632,00
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa		516.000.000,00	28.100.840,00	5,45	595.065.432,00
Sub Total Belanja Barang (1 s.d 6)		1.290.129.625.000,00	997.015.341.731,00	77,28	929.162.671.613,00
Belanja Modal	B.2.2.				
1. Belanja Tanah		8.644.195.000,00	4.389.078.489,00	50,77	4.689.363.865,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin		180.307.892.000,00	130.226.668.540,00	72,22	124.828.709.600,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan		95.905.528.000,00	17.843.744.026,00	18,61	79.102.436.012,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		481.746.954.000,00	409.049.803.073,00	84,91	226.309.431.987,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya		7.460.759.000,00	6.732.643.339,00	90,24	4.795.063.000,00
6. Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total Belanja Modal (1 s.d 6)		774.065.328.000,00	568.241.937.467,00	73,41	439.725.004.464,00
JUMLAH BELANJA		2.064.194.953.000,00	1.565.257.279.198,00	75,83	1.368.887.676.077,00
Surplus/Defisit		(790.887.454.000,00)	(233.543.636.138,00)	29,53	(114.086.839.162,00)
PEMBIAYAAN					
Pembiayaan Dalam Negeri					
1. Perbankan Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Non Perbankan Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total Pembiayaan Dalam Negeri (1 s.d 2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 (Audited)			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
Pembiayaan Luar Negeri					
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total Pembiayaan Luar Negeri (1 s.d 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA/SIKPA		(790.887.454.000,00)	(233.543.636.138,00)	29,53	(114.086.839.162,00)

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	586.726.344.967,00	442.619.085.919,00
2.	Penggunaan SAL		0,00	0,00
3.	Subtotal (1-2)		586.726.344.967,00	442.619.085.919,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.2	(233.543.636.138,00)	(114.086.8/39.162,00)
5.	Penyesuaian SILPA/SIKPA	C.3	0,00	0,00
6.	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.3.1	422.237.966.580,00	258.194.098.210,00
7.	a. Pendapatan dari APBN	C.3.1.1	423.215.501.073,00	258.219.643.210,00
8.	b. Penyetoran PNPB ke Kas Negara	C.3.1.2	(977.534.493,00)	(25.545.000,00)
9.	SILPA/SIKPA setelah penyesuaian (4+6)		188.694.330.442,00	144.107.259.048,00
10.	Subtotal (3+9)		775.420.675.409,00	586.726.344.967,00
11.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0,00	0,00
12.	Penyesuaian Lain-Lain	C.5	0,00	0,00
13.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (10+11+12)	C.6	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini –

III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	D.1		
Kas dan Bank	D.1.1	869.636.391.316,00	692.671.632.122,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1.1	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1.2	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00
Pendapatan yang Masih Harus diterima	D.1.2	30.206.210.977,00	27.818.764.946,00
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.1.3	1.625.251.924,00	1.966.135.668,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.4	629.777.587.207,00	471.366.114.135,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.5	(130.204.912.844,00)	(112.714.231.851,00)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)		499.572.674.363,00	358.651.882.284,00
Persediaan	D.1.6	16.583.264.314,00	18.626.355.115,00
Jumlah Aset Lancar		1.417.623.792.894,00	1.099.734.770.135,00
Aset Tetap	D.2		
Tanah	D.2.1	42.356.379.117.074,00	21.822.314.130.937,00
Peralatan dan Mesin	D.2.2	1.344.159.267.549,00	1.221.776.217.713,00
Gedung dan Bangunan	D.2.3	3.776.851.791.730,00	1.233.215.663.807,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.2.4	8.332.905.283.962,00	7.427.274.269.254,00
Aset Tetap Lainnya	D.2.5	14.992.748.009,00	14.912.068.009,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.6	393.987.073.321,00	437.978.646.602,00
Akumulasi Penyusutan	D.2.7	(4.281.438.618.495,00)	(5.001.898.744.210,00)
Jumlah Aset Tetap		51.937.836.663.150,00	27.155.572.252.112,00
Aset Lainnya	D.3		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.3.1	167.065.369.296,00	167.065.369.296,00
Aset Tak Berwujud	D.3.2	199.859.218.473,00	193.842.470.450,00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.3.3	3.302.885.193,00	3.302.885.193,00
Aset Lain-Lain	D.3.4	243.038.329.815,00	245.153.378.589,00
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.3.5	(283.011.198.196,00)	(270.658.368.655,00)
Jumlah Aset Lainnya		330.254.604.581,00	338.705.734.873,00
JUMLAH ASET		53.685.715.060.625,00	28.594.012.757.120,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Jangka Pendek	D.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.4.1	107.908.038.238,00	123.023.117.279,00
Pendapatan Diterima Dimuka	D.4.2	2.243.559.020.186,00	1.671.126.470.419,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.4.3	9.757.909,00	8.079.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.351.476.816.333,00	1.794.157.667.198,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.351.476.816.333,00	1.794.157.667.198,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.5	51.334.238.244.292,00	26.799.855.089.922,00
JUMLAH EKUITAS		51.334.238.244.292,00	26.799.855.089.922,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		53.685.715.060.625,00	28.594.012.757.120,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.1	915.825.218.343,00	855.454.162.568,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		915.825.218.343,00	855.454.162.568,00
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	513.831.019.985,00	510.990.609.274,00
Beban Persediaan	E.3	17.838.218.891,00	14.763.079.187,00
Beban Barang dan Jasa	E.4	324.953.624.919,00	312.056.384.935,00
Beban Pemeliharaan	E.5	104.908.780.972,00	75.725.927.972,00
Beban Perjalanan Dinas	E.6	34.847.506.840,00	23.569.631.356,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.7	1.523.908.387.690,00	376.847.640.772,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.8	18.654.623.745,00	33.915.380.368,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.538.942.163.042,00	1.347.868.653.864,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.623.116.944.699,00)	(492.414.491.296,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.9	655.290.634,00	20.600.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.10	3.867.843.166,00	136.768.670.341,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(3.212.552.532,00)	(136.748.070.341,00)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.11	1.291.036.088,00	10.933.045.652,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.12	3.056.355.165,00	6.994.537.582,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(1.765.319.077,00)	3.938.508.070,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4.977.871.609,00)	(132.809.562.271,00)
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(1.628.094.816.308,00)	(625.224.053.567,00)

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
EKUITAS AWAL	F.1	26.799.855.089.922,00	26.951.507.926.788,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	F.2	(1.628.094.816.308,00)	(625.224.053.567,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		25.796.996.293.865,00	189.525.036.893,00
Koreksi Nilai Persediaan	F.3	294.875.300,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	F.4	(978.622.232.168,00)	0,00
Selisih Revaluasi aset tetap	F.5	27.454.507.260.455,00	0,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	F.6	(683.773.502.617,00)	189.563.899.382,00
Koreksi Lain-Lain	F.7	4.589.892.895,00	(38.862.489,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	F.8	365.481.676.813,00	284.046.179.808,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		24.534.383.154.370,00	(151.652.836.866,00)
EKUITAS AKHIR	F.9	51.334.238.244.292,00	26.799.855.089.922,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	423.215.501.073,00	258.219.643.210,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.330.736.108.567,00	1.254.775.291.915,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan PNPB Umum	322.243.859,00	4.945.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.754.273.853.499,00	1.512.999.880.125,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	514.864.945.005,00	509.943.084.254,00
Pembayaran Barang	105.385.401.814,00	113.440.998.862,00
Pembayaran Jasa	237.010.114.630,00	205.858.287.238,00
Pembayaran Pemeliharaan	104.850.030.996,00	75.691.587.195,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	34.876.748.446,00	23.633.648.632,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	28.100.840,00	595.065.432,00
Pembayaran Lainnya	0,00	0,00
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	977.534.493,00	25.545.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	997.992.876.224,00	929.188.216.613,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	756.280.977.275,00	583.811.663.512,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	544.290.634,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	111.000.000,00	20.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	655.290.634,00	20.600.000,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	4.389.078.489,00	4.689.363.865,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	130.226.668.540,00	124.828.709.600,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	17.843.744.026,00	79.102.436.012,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	409.049.803.073,00	226.309.431.987,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	6.732.643.339,00	4.795.063.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	568.241.937.467,00	439.725.004.464,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(567.586.646.833,00)	(439.704.404.464,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	49.160.675.979,00	56.223.010.887,00
Jumlah Arus Masuk Kas	49.160.675.979,00	56.223.010.887,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	60.890.247.227,00	71.327.240.583,00
Jumlah Arus Keluar Kas	60.890.247.227,00	71.327.240.583,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(11.729.571.248,00)	(15.104.229.696,00)
Kenaikan /Penurunan Kas	176.964.759.194,00	129.003.029.352,00
Saldo Awal Kas	692.671.632.122,00	563.668.602.770,00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	586.726.344.967,00	442.619.085.919,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	105.945.287.155,00	121.049.516.851,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	869.636.391.316,00	692.671.632.122,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00

VII.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2019 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.

*Rencana
Strategis*

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

A.2.1. Dasar Hukum

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata**. Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang

menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat dengan Badan Pengusahaan Batam.**

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi " **Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**" .

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut: Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi "**Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**" . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;
2. Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.2.2.Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Surat Perintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia nomor PRIN-01/M.EKON/01/2019, PRIN-02/M.EKON/01/2019, PRIN-03/M.EKON/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 personil pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah:

1.	Kepala merangkap Plt. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan	:	Edy Putra Irawady, S.H, M.A.
2.	Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum Merangkap Plt. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum	:	Drs. Purwiyanto, M.A.
3.	Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Merangkap Plt. Anggota 4/Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya	:	Dwianto Eko Winaryo, S.T, M.T.

Pada tanggal 25 September 2019 terjadi penggantian personil pimpinan Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sehingga personil pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah:

1.	Kepala	:	Muhammad Rudi
2.	Wakil Kepala	:	Purwiyanto
3.	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	:	Wahjoe Triwidijo Koentjoro
4.	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	:	Sudirman Saad

5.	Anggota Bidang Pengusahaan	:	Shahril Japarin
----	----------------------------	---	-----------------

Kemudian pada tanggal 27 September 2019 sesuai surat perintah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor PRIN-71M.EKON/09/2019 memerintahkan Dr. Enoch Suharto Pranoto, S.E., M.A. untuk melakukan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota Bidang Kebijakan Strategis Badan Pengusahaan Batam, sehingga personil pimpinan adalah sebagai berikut:

1.	Kepala	:	Muhammad Rudi
2.	Wakil Kepala	:	Purwiyanto
3.	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	:	Wahjoe Triwidijo Koentjoro
4.	Anggota Bidang Kebijakan Strategis	:	Enoh Suharto Pranoto
5.	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	:	Sudirman Saad
6.	Anggota Bidang Pengusahaan	:	Shahril Japarin

A.2.3.Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

1.	Ketua merangkap Anggota	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2.	Anggota	:	Menteri Dalam Negeri
3.	Anggota	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Anggota	:	Menteri Keuangan
5.	Anggota	:	Menteri Perdagangan
6.	Anggota	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

7.	Anggota	:	Panglima Tentara Nasional Indonesia
8.	Anggota	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9.	Anggota	:	Sekretaris Kabinet
10.	Anggota	:	Gubernur Kepulauan Riau
11.	Anggota	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12.	Anggota	:	Walikota Batam

A.2.4.Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kemudian terjadi beberapa kali penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam sampai dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor SR-15/K.05/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

•	Ketua	:	Susiwijono
•	Anggota	:	Elen Setiadi
•	Anggota	:	Satya Bhakti Parikesit
•	Anggota	:	Oentarto Wibowo
•	Anggota	:	Sofandi Arifin

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
Operasional*

(2) Pendapatan Operasional

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas/Bank Badan Pengusahaan Batam tetapi dan belum membebani pagu anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima Karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 berdasarkan harga perolehan dan/atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Badan Pengusahaan Batam selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Massa Manfaat (Tahun)
Software Komputer;	4
Franchise;	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim;	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan;	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram;	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Hak Pengelolaan memenuhi definisi sebagai aset sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang sudah dikerjasamakan

dengan pihak ketiga;

- c. Aset Tetap untuk Hak Pengelolaan yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam; dan
- d. Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas Hak Pengelolaam yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi, penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Badan Pengusahaan Batam yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Pengusahaan Batam. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Batam. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Badan Pengusahaan Batam pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam (SAKBA) tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan

Pengusahaan Batam. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut.

No	Uraian	Penyisihan
1	Piutang dengan umur 0 – 6 bulan	0%
2	Piutang dengan umur 6 - 12 bulan	25%
3	Piutang dengan umur 12 – 18 bulan	50%
4	Piutang dengan umur 18 – 24 bulan	75%
5	Piutang dengan umur > 24 bulan	100%

Kebijakan tersebut dikecualikan atas piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan karena dikategorikan sebagai piutang lancar dengan umur piutang adalah 6 bulan.

Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut menambahkan ketentuan pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

- Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
- Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.”
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2016 merupakan pertama kalinya mulai diterapkan penyusutan aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tak

berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi barang milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Pada Laporan Keuangan Tahun 2018 penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2018 sesuai Surat Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tidak disajikan dalam LKKL. Hasil penilaian kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK RI.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketingalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN/BMD.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.331.713.643.060,00** atau **104,59%** dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2019 sebesar **Rp1.273.307.499.000,00** (setelah revisi).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.330.736.108.567,00 atau 104,51% dari pagu anggaran sebesar Rp1.273.307.499.000,00, dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp977.534.493,00 yang terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp111.000.000,00, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp544.290.634,00, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp322.243.859,00 dan Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dan hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.273.307.499.000,00	1.330.736.108.567,00	104,51
2	Pendapatan PNBP Lainnya:			
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	111.000.000,00	0,01
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	544.290.634,00	0,04
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	322.243.859,00	0,03
	Jumlah (2)	0,00	977.534.493,00	0,08
	Jumlah (1+2)	1.273.307.499.000,00	1.331.713.643.060,00	104,59

Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.330.736.108.567,00	1.254.775.291.915,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
2	Pendapatan PNBP Lainnya :		
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	111.000.000,00	20.600.000,00
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	544.290.634,00	0,00
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	322.243.859,00	4.945.000,00
	Jumlah (2)	977.534.493,00	25.545.000,00
	Jumlah (1+2)	1.331.713.643.060,00	1.254.800.836.915,00

a. Realisasi PNBP Murni

Realisasi PNBP Murni Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp1.330.736.108.567,00 dibandingkan dengan anggaran unit per tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	61.650.000.000,00	74.560.902.217,00	120,94
2	Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah	42.000.000.000,00	29.628.598.011,00	70,54
3	BUBU Hang Nadim	278.007.499.000,00	201.893.461.702,00	72,62
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	530.450.000.000,00	359.220.283.800,00	67,72
5	Rumah Sakit BP Batam	60.000.000.000,00	88.704.217.884,00	147,84
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1.200.000.000,00	968.368.863,00	80,70
7	Kantor Pengelolaan Lahan	300.000.000.000,00	575.760.276.090,00	191,92
	Jumlah	1.273.307.499.000,00	1.330.736.108.567,00	104,51

Realisasi PNBP Murni Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.330.736.108.567,00 dan Rp1.254.775.291.914,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Kantor Pusat	74.560.902.217,00	56.025.243.506,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
2	Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah	29.628.598.011,00	26.776.468.338,00
3	BUBU Hang Nadim	201.893.461.702,00	247.485.731.789,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	359.220.283.800,00	401.496.581.183,00
5	Rumah Sakit BP Batam	88.704.217.884,00	72.554.487.100,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	968.368.863,00	1.002.469.456,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	575.760.276.090,00	449.434.310.542,00
	Jumlah	1.330.736.108.567,00	1.254.775.291.914,00

Jenis PNBP Murni Badan Pengusahaan Batam pada masing-masing unit adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pusat

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	86.679.332,00	74.167.641,00
2	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	123.632.000,00	0,00
3	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	27.352.281.778,00	9.922.870.954,00
4	Pendapatan dari Bida Ampar	2.394.648.102,00	1.894.725.339,00
5	Pendapatan dari Bida Kabil	1.081.258.066,00	860.433.665,00
6	Pendapatan dari Bida Kuning	4.254.861.293,00	3.574.604.391,00
7	Pendapatan dari Bida Sekupang	1.268.123.752,00	731.106.823,00
8	Pendapatan dari Rumah Susun Lainnya	233.712.000,00	234.312.000,00
9	Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	2.947.732.213,00	3.198.420.273,00
10	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	8.426.529.101,00	7.445.418.000,00
11	Pendapatan Denda Pemukiman	21.552.519,00	12.872.769,00
12	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	13.715.500,00	2.045.000,00
13	Pendapatan Jasa Giro	14.792.984.726,00	15.059.224.561,00
14	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	29.460.000,00	8.325.000,00
15	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian ROHS pada Logam, Polimer dan Komponen Elektronika	10.290.000,00	14.860.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
16	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan menggunakan X-Ray	12.100.000,00	0,00
17	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai unsur Uranium)	14.300.000,00	43.530.000,00
18	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	181.550.000,00	80.150.000,00
19	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Produsen Plastik	200.000,00	800.000,00
20	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	1.500.000,00	900.000,00
21	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	709.125.000,00	234.950.000,00
22	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	75.200.000,00	26.400.000,00
23	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	111.400.000,00	29.000.000,00
24	Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	87.000.000,00	58.650.000,00
25	Pendapatan Jasa Penetapan Kuota	30.900.000,00	6.300.000,00
26	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	39.000.000,00	13.500.000,00
27	Pendapatan Lain-Lain	1.734.497.651,00	1.113.598.937,00
28	Pendapatan Lain-lain	107.244.366,00	625.540.206,00
29	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	37.164.000,00	255.366.840,00
30	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	792.370.100,00	404.347.000,00
31	Pendapatan Penghijauan / show room bunga / tanaman	782.000,00	237.173.520,00
32	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	0,00	34.460.000,00
33	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	5.700.000,00	2.500.000,00
34	Pendapatan Retribusi Tiket	1.097.430.000,00	1.188.565.000,00
35	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	3.398.359.424,00	5.125.509.981,00
36	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	199.397.261,00	262.486.303,00
37	Pendapatan Sewa Lainnya	727.181.000,00	1.491.195.357,00
38	Pendapatan Sewa Listrik	58.922.719,00	97.102.703,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
39	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	96.993.062,00	54.859.836,00
40	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	423.227.821,00	331.649.775,00
41	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	22.959.071,00	0,00
42	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	534.938.360,00	247.023.632,00
43	Perizinan Pematangan Lahan	1.024.000.000,00	1.024.000.000,00
44	Piutang (Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang)	0,00	2.298.000,00
Jumlah		74.560.902.217,00	56.025.243.506,00

2. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	Air Baku	19.618.309.602,00	17.934.893.137
2	Jasa Pengelolaan kasawan KPLI-B3	247.200.000,00	290.100.000
3	Jasa pengelolaan Loading Bay	0,00	150.000
4	Pendapatan Denda Kantor Air	21.226.325,00	20.299.150
5	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	8.512.785.435,00	7.512.785.435
6	Pendapatan Jasa Giro	42.398.635,00	74.886.166
7	Pendapatan Lain-Lain	102.728.964,00	65.759.200
8	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	600.184.050,00	503.900.250
9	Pengelolaan Penyedotan	4.625.000,00	2.875.000
10	Pengolahan Air Limbah	459.780.000,00	362.020.000
11	Sewa Ruang Kantor	19.360.000,00	8.800.000
Jumlah		29.628.598.011,00	26.776.468.338,00

3. BUBU Hang Nadim

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri	2.251.605.601,00	2.132.365.580,00
2	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Luar Negeri	688.192.688,00	661.599.170,00
3	Fasilitas Counter Dalam Negeri	2.066.248.946,00	2.718.460.200,00
4	Fasilitas Counter Luar Negeri	115.645.710,00	157.608.995,00
5	Fasilitas Extend	0,00	898.500,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
6	Keuntungan Lainnya	871.278,00	7.974,00
7	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Antar Bandara Dalam Negeri	244.390.794,00	0,00
8	Konsesi Fee Aero	0,00	88.149.500,00
9	Layanan Konsesi Lainnya	403.175.400,00	32.594.954,00
10	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	5.480.494.526,00	270.067.203,00
11	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	1.528.561.450,00	4.201.601.453,00
12	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	0,00	511.252.357,00
13	Layanan Pergudangan Internasional	0,00	115.768.775,00
14	Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri (Pjp)	0,00	8.568.000,00
15	Pelayanan Jasa penerbangan Dalam Negeri (PJP)	0,00	18.627.000,00
16	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam negeri (JP2U)	68.084.234.400,00	94.714.195.214,00
17	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri / Haji (JP2U)	4.092.400.000,00	5.294.183.050,00
18	Pendapatan Air	6.741.680,00	56.333.544,00
19	Pendapatan Aero Lain_lain	234.873.626,00	500.000,00
20	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	24.707.315,00	0,00
21	Pendapatan Denda Jasa Non-aeronautika	379.858.920,00	461.566.077,00
22	Pendapatan FDS	11.664.484.307,00	8.896.274.988,00
23	Pendapatan GSE	613.951.853,00	536.669.816,00
24	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara	596.015.200,00	4.943.903.413,00
25	Pendapatan Jasa Giro	158.340.055,00	177.448.988,00
26	Pendapatan Konsesi Fee	6.000.000,00	243.477.907,00
27	Pendapatan Konsesi Pergudangan	17.794.695.021,00	25.486.437.213,00
28	Pendapatan Konsesi Perkantoran	1.393.953.807,00	1.670.780.831,00
29	Pendapatan Konsesi Usaha	13.397.051.082,00	13.272.171.258,00
30	Pendapatan Lain-Lain	1.203.315.575,00	166.500.217,00
31	Pendapatan Listrik	66.938.139,00	291.131.864,00
32	Pendapatan Non Aeronautika Lainnya	0,00	177.120.000,00
33	Pendapatan Pas Bandara	681.055.000,00	732.865.000,00
34	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (Fuel Throughput)	1.922.417.760,00	2.540.114.168,00
35	Pendapatan Porter	9.300.000,00	107.100.000,00
36	Pendapatan Promosi/ Pemotretan	5.340.000,00	33.800.000,00
37	Pendapatan Reklame (Umum)	0,00	10.054.000,00
38	Pendapatan Sewa Bus Apron	57.550.000,00	25.700.000,00
39	Pendapatan Sewa Counter	129.750.000,00	403.010.900,00
40	Pendapatan Sewa Fasilitas X-Ray	690.000.000,00	750.000.000,00
41	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	1.721.119.440,00	1.874.106.690,00
42	Pendapatan Sewa Perkantoran	3.525.797.094,00	3.052.239.180,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
43	Pendapatan Sewa Space Reklame/Iklan	1.035.773.407,00	2.653.900.069,00
44	Pendapatan Sewa Tanah	351.267.250,00	302.186.772,00
45	Pendapatan Sewa Usaha	12.481.892.038,00	10.296.950.442,00
46	Pendapatan Taxi (Biaya Pangkalan)	53.400.000,00	638.400.000,00
47	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	36.471.405.500,00	43.853.561.040,00
48	Pendaratan Dalam Negeri	5.966.672.590,00	7.134.511.670,00
49	Pendaratan Dalam Negeri	0,00	13.010.000,00
50	Pendaratan Luar Negeri	2.481.719.400,00	2.645.934.529,00
51	Penempatan Dalam Negeri	1.247.370.784,00	2.257.847.055,00
52	Penempatan Luar Negeri	246.540.412,00	288.904.181,00
53	Penyimpanan Dalam Negeri	80.300,00	444.400,00
54	Penyimpanan Luar Negeri	0,00	27.930,00
55	Piutang (Pendapatan Konsesi Usaha)	80.742.844,00	1.083.600,00
56	Piutang (Fasilitas Counter Dalam Negeri)	0,00	4.015.000,00
57	Flight Approval/Local	0,00	400.000,00
58	Piutang (Pendaratan Dalam Negeri)	13.665.510,00	-
59	Piutang (Pendapatan Konsesi Fee)	0,00	5.250.000,00
60	Piutang (Pendapatan Sewa Counter)	0,00	10.050.000,00
61	Piutang (Pendapatan Non Aeronautika Lainnya)	0,00	270.000,00
62	Piutang (Pendapatan Sewa Usaha)	0,00	84.772.241,00
63	Piutang (Layanan Penunjang Lainnya-Penggunaan Listrik Catu Daya)	0,00	41.076.192,00
64	Piutang (Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara)	0,00	500,00
65	Piutang lainnya	223.855.000,00	417.882.189,00
	Jumlah	201.893.461.702,00	247.485.731.789,00

4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	KSO Chasis	6.229.486.290,00	0,00
2	KSO Dermaga	0,00	310.814.119,00
3	KSO Fee Bongkar Muat	404.329.875,00	49.186.895,00
4	KSO Iklan	114.597.500,00	100.722.003,00
5	KSO Pandu	6.234.131.290,00	188.107.585,00
6	KSO Parkir	409.551.864,00	690.092.700,00
7	KSO Pass Kendaraan	26.762.200,00	26.153.950,00
8	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	18.086.400,00	6.716.354,00
9	KSO Royalti	29.780.597.588,00	23.803.372.109,00
10	KSO Sampah	14.214.000,00	12.450.000,00
11	KSO Seaport Tax/Pass Orang	25.659.741.600,00	25.392.535.150,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
12	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	848.438.403,00	1.070.295.402,00
13	KSO Tambat	3.046.397.253,00	2.770.107.877,00
14	KSO Throughput	918.750,00	918.750,00
15	KSO Tunda	9.279.670.328,00	6.571.351.648,00
16	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	0,00	566.400,00
17	Pendapatan Atas Sanksi/Klaim	208.396,00	403.855,00
18	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	30.535.381,00	0,00
19	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	22.489.350,00	1.582.680,00
20	Pendapatan Denda Pengadaan Barang dan Jasa	5.024.394,00	163.003.238,00
21	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	356.565.155,00	560.598.911,00
22	Pendapatan Iklan	384.000,00	0,00
23	Pendapatan Imbalan Layanan Bongkar Muat	24.159.235,00	7.691.745.937,00
24	Pendapatan Jasa Air Tawar	3.117.792.000,00	3.310.089.669,00
25	Pendapatan Jasa Alat	445.750,00	887.640.151,00
26	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	59.286.821.691,00	678.380.190,00
27	Pendapatan Jasa Chasis	703.518.000,00	2.452.985.734,00
28	Pendapatan Jasa Dermaga	149.052.340,00	22.045.645.201,00
29	Pendapatan Jasa Giro	2.748.399,00	55.955.456,00
30	Pendapatan Jasa Labuh	83.228.969.997,00	95.684.027.991,00
31	Pendapatan Jasa Pandu	638.566.767,00	2.971.660.998,00
32	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	8.711.352.251,00	6.367.297.440,00
33	Pendapatan Jasa Perbankan Lainnya	10.000.000,00	0,00
34	Pendapatan Jasa Tambat	69.531.427.067,00	148.872.504.030,00
35	Pendapatan Jasa Throughput	8.380.427.323,00	7.202.112.523,00
36	Pendapatan Jasa Tunda	1.011.574.746,00	3.168.111.403,00
37	Pendapatan Jasa Yacht	420.540.570,00	437.645.911,00
38	Pendapatan Lain-lain	696.350,00	235.324.338,00
39	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	18.476.206,00	0,00
40	Pendapatan Pass Untuk Orang	1.819.127.700,00	1.497.385.000,00
41	Pendapatan Pungutan Kebersihan	12.483.073,00	159.151,00
42	Pendapatan Retribusi Kebersihan	1.124.030,00	6.500.000,00
43	Pendapatan Retribusi Lainnya	5.460.000,00	0,00
44	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	3.794.775.091,00	3.161.360.000,00
45	Pendapatan Seaport Tax	17.255.552.000,00	16.868.795.000,00
46	Pendapatan Sewa Listrik	347.914.445,00	376.577.808,00
47	Pendapatan Sewa Rak	2.067.473.032,00	0,00
48	Pendapatan Sewa Ruangan	838.506.564,00	715.829.400,00
49	Pendapatan Sewa Tanah	2.381.388.800,00	65.635.200,00
50	Pendapatan Sewa Tangki	10.290.795.319,00	7.718.096.489,00
51	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9.841.295,00	41.858.297,00
52	Piutang (KSO Chasis)	3.052.500,00	0,00
53	Piutang (KSO Iklan)	0,00	369.431,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
54	Piutang (KSO Mooring Bouy)	0,00	130.868.216,00
55	Piutang (KSO Pandu)	2.308.910,00	41.386.292,00
56	Piutang (KSO Parkir)	0,00	333.300,00
57	Piutang (KSO Seaport Tax/Pass Orang)	0,00	4.367.200,00
58	Piutang (KSO Sewa Ruangan/ Bangunan)	22.316.256,00	100.000,00
59	Piutang (KSO Tambat)	164.340,00	0,00
60	Piutang (KSO Tunda)	16.573.358,00	0,00
61	Piutang (Pendapatan Iklan)	0,00	100.000,00
62	Piutang (Pendapatan Imbalan Layanan Bongkar Muat)	0,00	1.125.101,00
63	Piutang (Pendapatan Jasa Air Tawar)	10.500.000,00	14.022.578,00
64	Piutang (Pendapatan Jasa Bongkar Muat)	74.563.564,00	1.300.000,00
65	Piutang (Pendapatan Jasa Dermaga)	1.853.280,00	8.354.700,00
66	Piutang (Pendapatan Jasa Labuh)	1.073.876.571,00	2.111.788.819,00
67	Piutang (Pendapatan Jasa Pandu)	300.000,00	125.514.754,00
68	Piutang (Pendapatan Jasa Penumpukan Barang)	12.567.000,00	54.210.730,00
69	Piutang (Pendapatan Jasa Sewa Tangki)	0,00	2.572.698.830,00
70	Piutang (Pendapatan Jasa Tambat)	1.321.360.357,00	2.176.313.854,00
71	Piutang (Pendapatan Jasa Troughput)	15.730.250,00	4.265.509,00
72	Piutang (Pendapatan jasa Tunda)	6.314.679,00	12.010.148,00
73	Piutang (Pendapatan jasa Yacht)	0,00	1.588.495,00
74	Piutang (Pendapatan Pass Untuk Orang)	13.632.300,00	0,00
75	Piutang (Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan)	2.900.000,00	1.837.000,00
76	Piutang (Pendapatan Sewa Listrik)	2.069.472,00	1.134.736,00
77	Piutang (Pendapatan Sewa Ruangan)	23.771.664,00	0,00
78	Piutang Usaha Perusahaan	73.289.241,00	588.547,00
	Jumlah	359.220.283.800,00	401.496.581.183,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1.	Alat	397.298.832,00	0,00
2.	Ambulance	3.515.991,00	0,00
3.	CSSD (Central Sterilisasi & Supply Dept)	40.393.894,00	900.000,00
4.	Farmasi	15.669.640.585,00	40.588.300.841,00
5.	Farmasi	0,00	130.000,00
6.	Kamar HCU	160.277.681,00	147.912.972,00
7.	Kamar ICU	377.521.271,00	146.977.618,00
8.	Kamar Klas I	827.774.365,00	1.005.211.515,00
9.	Kamar Klas II	317.356.459,00	659.426.305,00
10.	Kamar Klas III	793.005.860,00	380.748.851,00
11.	Kamar Klas VIP	12.415.452,00	34.672.509,00
12.	Konsultasi Umum/Spesialis	52.465.070,00	0,00
13.	Laboratorium	1.898.269.343,00	62.180.743,00
14.	Material	333.595.818,00	0,00
15.	Medical Check Up	91.204.820,00	127.070.000,00
16.	Obat	23.905.526.873,00	2.080.642.862,00
17.	Pemulasaran Jenazah	5.500.744,00	5.000,00
18.	Pendapatan Denda	1.061.707.208,00	337.863.342,00
19.	Pendapatan IGD Lainnya	1.174.354.984,00	1.199.224.634,00
20.	Pendapatan Jasa Giro	109.245.658,00	120.148.394,00
21.	Pendapatan Lain-Lain	871.173.930,00	147.823.717,00
22.	Pendapatan Operasional Lainnya	393.520.978,00	42.855.000,00
23.	Pendapatan Operasional Tindakan Medis Lainnya	3.307.122.826,00	1.633.354.212,00
24.	Pendapatan Operasional Unit Penunjang Lainnya	13.862.206,00	2.950.000,00
25.	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	4.994.633.602,00	3.999.242.399,00
26.	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	0,00	7.990.000,00
27.	Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	3.638.270.165,00	2.493.945.520,00
28.	Pendapatan Rujukan	20.783.356,00	5.686.900,00
29.	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	550.410.920,00	129.705.050,00
30.	Pendapatan Sewa Listrik	160.851.159,00	204.091.620,00
31.	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	198.668.880,00	1.736.731.700,00
32.	Pendidikan dan Latihan	108.400.000,00	73.200.000,00
33.	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	0,00
34.	Piutang (Kamar ICU)	778.802,00	0,00
35.	Piutang (Kamar Klas II)	2.891.563,00	0,00
36.	Piutang (Konsultasi Umum/Spesialis)	42.500,00	0,00
37.	Piutang (Laboratorium)	12.964.110,00	0,00
38.	Piutang (Pendapatan IGD Lainnya)	18.000,00	0,00
39.	Piutang (Pendapatan Lain-Lain)	34.269.373,00	0,00
40.	Piutang (Pendapatan Rawat Inap Lainnya)	2.582.185,00	0,00
41.	Piutang (Pendapatan Rawat Jalan Lainnya)	563.500,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
42.	Piutang (Poliklinik)	960.000,00	0,00
43.	Piutang (Radiologi)	247.000,00	0,00
44.	Piutang (Registrasi)	30.750,00	0,00
45.	Piutang (Registrasi Rawat Inap)	26.949.152,00	0,00
46.	Piutang (Tindakan Medis)	15.500.015,00	0,00
47.	Piutang (Tindakan medis non Operatif)	101.758.523,00	0,00
48.	Piutang (Tindakan Medis Non Operatif)	140.000,00	0,00
49.	Piutang (Tindakan medis non Operatif)	55.000,00	0,00
50.	Piutang (Alat)	839.937,00	0,00
51.	Piutang (Obat)	17.382.987,00	0,00
52.	Piutang Usaha Perusahaan	0,00	(17.958.000,00)
53.	Poliklinik	1.237.265.481,00	39.930.000,00
54.	Radiologi	732.428.222,00	2.775.000,00
55.	Registrasi	80.970.016,00	6.105.000,00
56.	Registrasi Rawat Inap	1.668.020.965,00	133.982.129,00
57.	Registrasi Rawat Jalan	340.580.426,00	744.661.292,00
58.	Sewa Kamar Operasi	80.691.654,00	0,00
59.	Tindakan Medis	17.903.679.374,00	13.772.843.058,00
60.	Tindakan Medis Non Operatif	3.882.629.892,00	503.156.917,00
61.	Visit Dokter/ Konsultasi	1.070.489.527,00	0,00
Jumlah		88.704.217.884,00	72.554.487.100,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Jasa Giro	9.273.739,00	14.052.748,00
2	Pendapatan Lain-lain	3.934,00	2.708,00
3	Pendapatan Sewa Kamar	906.554.000,00	945.790.000,00
4	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	52.537.190,00	42.624.000,00
Jumlah		968.368.863,00	1.002.469.456,00

7. Kantor Pengelolaan Lahan

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Administrasi Peralihan	8.144.050.945,00	7.145.654.821,00
2	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	1.022.400,00	0,00
3	Pendapatan dari Bida Ayu	0,00	1.750.000,00
4	Pendapatan Denda UWTO	296.141.813,00	1.147.773.382,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
5	Pendapatan Jasa Giro	2.460.995.834,00	273.371.403,00
6	Pendapatan Lain-Lain	1.767.242,00	2.044.993.785,00
7	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.503.800.000,00	1.025.200.000,00
8	Pendapatan Penggantian Dokumen	26.100.000,00	26.700.000,00
9	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	303.039.928,00	263.639.800,00
10	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	537.300.000,00	198.700.000,00
11	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	30.600.000,00	11.400.000,00
12	Pendapatan UWTO	562.455.457.928,00	437.295.127.351,00
Jumlah		575.760.276.090,00	449.434.310.542,00

Belanja
Negara

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.565.257.279.198,00** atau **75,83%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.064.194.953.000,00 (setelah revisi). Anggaran belanja Badan Pengusahaan Batam tahun 2019 telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Surat Pengesahan Nomor: DIPA-112.01.1.568717/2019 tanggal 5 Desember 2018. DIPA tahun anggaran 2019 telah mengalami beberapa kali revisi dengan yang terakhir revisi ke 7 dengan Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-112.01.1.568717/2019 tanggal 21 November 2019 dengan nilai DIPA sebesar **Rp2.064.194.953.000,00** yang terdiri dari Belanja yang sumber dananya berasal dari PNPB sebesar Rp1.516.611.489.000,00 , Belanja yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp353.961.896.000,00 dan Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp193.621.568.000,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menurut program adalah sebagai berikut:

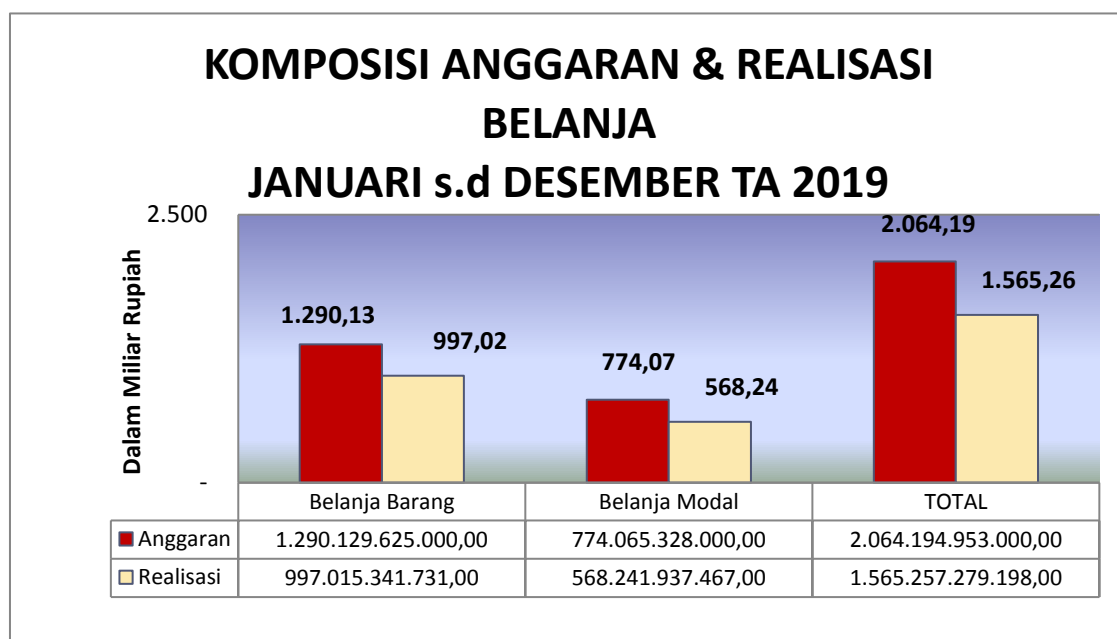
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717. KP.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP.Batam	847.935.464.000,00	681.873.183.743,00	80,42

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717.KP . 01.5113	Penyusunan Perencanaan Program Dan Penelitian Pengembangan	15.604.378.000,00	11.448.896.682,00	73,37
112.01.3200.568717.KP . 01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan Dan Pengadaan Barang/Jasa	139.888.485.000,00	103.135.945.843,00	73,73
112.01.3200.568717.KP . 01.5115	Penyusunan Pengelolaan Dan Pelayanan Kepegawaian	634.142.324.000,00	529.851.486.315,00	83,55
112.01.3200.568717.KP . 01.5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	6.775.373.000,00	4.674.365.887,00	68,99
112.01.3200.568717.KP . 01.5117	Penyusunan Regulasi Dan Pelayanan Hukum	19.260.669.000,00	8.017.500.536,00	41,63
112.01.3200.568717.KP . 01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Maupun Swasta	7.826.987.000,00	5.703.743.596,00	72,87
112.01.3200.568717.KP . 01.5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	19.040.626.000,00	14.680.465.685,00	77,10
112.01.3200.568717.KP . 01.5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	1.842.022.000,00	1.588.119.126,00	86,22
112.01.3200.568717.KP . 01.5121	Penyusunan Dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	1.692.685.000,00	1.111.150.377,00	65,64
112.01.3200.568717.KP . 01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dan Kelembagaan	1.861.915.000,00	1.661.509.696,00	89,24
112.01.3200.568717.KP.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam	1.216.259.489.000,00	883.384.095.455,00	72,63
112.01.3200.568717.KP . 06.5123	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pertanahan Di Kawasan PBPB-Batam	21.158.774.000,00	13.475.130.770,00	63,69
112.01.3200.568717.KP . 06.5124	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	225.407.110.000,00	80.809.890.626,00	35,85
112.01.3200.568717.KP . 06.5125	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Bandar Udara	338.281.060.000,00	280.806.240.905,00	83,01
112.01.3200.568717.KP . 06.5126	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum	155.409.038.000,00	140.728.233.839,00	90,55
112.01.3200.568717.KP . 06.5127	Pengelolaan Dan Pengendalian Mutu Prasarana Dan Sarana	76.853.407.000,00	68.411.737.398,00	89,02
112.01.3200.568717.KP . 06.5128	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Data Center Dan Sistem Informasi	48.602.777.000,00	42.279.196.182,00	86,99
112.01.3200.568717.KP . 06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Ke Kawasan PBPB-Batam	2.310.409.000,00	1.935.089.359,00	83,76
112.01.3200.568717.KP . 06.5130	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Air Dan Limbah	248.873.474.000,00	177.910.046.691,00	71,49
112.01.3200.568717.KP . 06.5131	Pelayanan Pemasaran Dan Kehumasan	20.759.339.000,00	11.789.654.003,00	56,79
112.01.3200.568717.KP . 06.5132	Pelayanan Perijinan Terpadu Ke Kawasan PBPB-Batam	8.184.901.000,00	7.158.152.198,00	87,46
112.01.3200.568717.KP . 06.5133	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset	31.088.957.000,00	26.577.941.062,00	85,49
112.01.3200.568717.KP . 06.5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan Dan Asset Investasi	39.330.243.000,00	31.502.782.422,00	80,10
Jumlah Belanja		2.064.194.953.000,00	1.565.257.279.198,00	75,83

Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menurut klasifikasi belanja dapat dilihat berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.290.129.625.000,00	997.015.341.731,00	77,28
53	Belanja Modal	774.065.328.000,00	568.241.937.467,00	73,41
	Jumlah	2.064.194.953.000,00	1.565.257.279.198,00	75,83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk priode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Daftar Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan jenis belanja, terdiri dari:

No	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Belanja Barang	997.015.341.731,00	929.162.671.613,00
2	Belanja Modal	568.241.937.467,00	439.725.004.464,00
	Jumlah	1.565.257.279.198,00	1.368.887.676.077,00

Belanja
Barang

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp997.015.341.731,00 dan Rp929.162.671.613,00 dengan rincian menurut jenisnya adalah sebagai berikut ini:

Nama Belanja	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	514.864.945.005,00	509.943.084.254,00
Belanja Barang	105.374.801.815,00	113.440.998.862,00
Belanja Jasa	237.010.114.630,00	205.858.287.238,00
Belanja Pemeliharaan	91.057.640.995,00	75.691.587.195,00
Belanja Perjalanan	34.876.748.446,00	23.633.648.632,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	13.831.090.840,00	595.065.432,00
Jumlah Realisasi Belanja	997.015.341.731,00	929.162.671.613,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Kantor Pusat	773.417.173.850,00	738.542.647.025,00
BUBU Hang Nadim	74.644.861.216,00	66.444.460.668,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	7.092.681.094,00	4.447.011.355,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	34.249.374.253,00	28.517.334.464,00
Rumah Sakit BP Batam	94.029.625.943,00	75.363.789.663,00
Kantor Perwakilan Jakarta	5.578.657.095,00	5.171.275.144,00
Kantor Pengelolaan Lahan	8.002.968.280,00	10.676.153.294,00
Jumlah Realisasi Belanja	997.015.341.731,00	929.162.671.613,00

Rincian belanja barang menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	514.671.685.537,00	509.804.195.154,00
525112	Belanja Barang	53.160.429.145,00	59.077.998.938,00

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525113	Belanja Jasa	131.571.942.685,00	112.908.382.645,00
525114	Belanja Pemeliharaan	44.180.104.158,00	35.833.671.122,00
525115	Belanja Perjalanan	29.833.012.325,00	20.918.399.165,00
Total Belanja Barang		773.417.173.850,00	738.542.647.025,00

2. BUBU Hang Nadim

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	5.806.622.778,00	4.442.294.240,00
525113	Belanja Jasa	34.600.869.246,00	34.941.763.410,00
525114	Belanja Pemeliharaan	33.126.758.143,00	26.418.359.185,00
525115	Belanja Perjalanan	1.110.611.049,00	642.043.833,00
Total Belanja Barang		74.644.861.216,00	66.444.460.668,00

3. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	546.185.860,00	492.888.789,00
525113	Belanja Jasa	3.768.897.224,00	2.843.475.272,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.531.918.534,00	569.477.260,00
525115	Belanja Perjalanan	1.245.679.476,00	541.170.034,00
Total Belanja Barang		7.092.681.094,00	4.447.011.355,00

4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	3.981.128.336,00	2.740.937.645,00
525113	Belanja Jasa	17.119.285.874,00	19.955.690.675,00
525114	Belanja Pemeliharaan	12.349.860.800,00	5.443.832.000,00
525115	Belanja Perjalanan	799.099.243,00	376.874.144,00
Total Belanja Barang		34.249.374.253,00	28.517.334.464,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	38.544.614.589,00	42.845.087.810,00
525113	Belanja Jasa	42.962.678.221,00	26.256.948.479,00
525114	Belanja Pemeliharaan	12.127.582.740,00	5.985.762.172,00
525115	Belanja Perjalanan	394.750.393,00	275.991.202,00
Total Belanja Barang		94.029.625.943,00	75.363.789.663,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	193.259.467,00	138.889.100,00
525112	Belanja Barang	1.540.507.707,00	1.372.536.813,00
525113	Belanja Jasa	1.691.042.948,00	1.789.103.301,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.479.899.220,00	1.419.606.471,00
525115	Belanja Perjalanan	673.947.753,00	451.139.459,00
Total Belanja Barang		5.578.657.095,00	5.171.275.144,00

7. Kantor Pengelolaan Lahan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	1.805.913.400,00	2.469.254.627,00
525113	Belanja Jasa	5.295.398.435,00	7.162.923.456,00
525114	Belanja Pemeliharaan	53.907.400,00	20.878.985,00
525115	Belanja Perjalanan	819.648.205,00	428.030.794,00
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	28.100.840,00	595.065.432,00
Total Belanja Barang		8.002.968.280,00	10.676.153.294,00

Belanja
Modal

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp568.241.937.467,00 dan Rp439.725.004.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Audited)	(Audited)
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah - BLU	4.389.078.489,00	4.689.363.865,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.225.000.000,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	111.969.178.540,00	124.828.709.599,00
4	Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	32.490.000,00	49.560.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.918.131.442,00	71.052.037.016,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	14.915.282.584,00	7.948.125.564,00
7	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	48.603.432,00
8	Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	10.330.000,00	53.670.000,00
9	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	242.369.292.940,00	67.803.924.592,00
10	Belanja Modal Perencanaan Jalan dan Jembatan	2.049.950.000,00	0,00
11	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	135.090.010,00	144.645.001,00
12	Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	302.030.000,00	0,00
13	Belanja Modal Irigasi - RM	1.747.683.024,00	14.993.734.900,00
14	Belanja Modal Irigasi - PHLN	140.822.819.470,00	102.459.355.109,00
15	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	741.434.187,00	1.250.313.160,00
16	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	58.260.000,00	363.800.000,00

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Audited)	(Audited)
		(Rp)	(Rp)
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan -BLU	20.823.243.442,00	39.244.099.226,00
18	Belanja Modal Lainnya - BLU	6.732.643.339,00	4.795.063.000,00
	Jumlah Realisasi Belanja Modal	568.241.937.467,00	439.725.004.464,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Audited)	(Audited)
	(Rp)	(Rp)
Kantor Pusat	92.406.818.920,00	43.914.099.923,00
BUBU Hang Nadim	206.161.379.688,00	16.518.533.278,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	170.817.365.598,00	132.029.510.076,00
Kantor Pengelola Pelabuhan Batam	46.560.516.373,00	88.220.535.777,00
Rumah Sakit BP Batam	46.698.607.899,00	153.287.165.255,00
Kantor Perwakilan Jakarta	125.086.500,00	120.866.500,00
Kantor Pengelolaan Lahan	5.472.162.489,00	5.634.293.655,00
Jumlah Realisasi Belanja	568.241.937.467,00	439.725.004.464,00

Rincian belanja modal menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	37.980.875.708,00	0,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan	111.280.000,00	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	22.802.931.585,00	21.497.192.404,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	8.033.680.234,00	801.228.000,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	18.097.351.394,00	16.820.616.519,00

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
537115	Belanja Modal Lainnya – BLU	5.380.699.999,00	4.795.063.000,00
Total Belanja Modal		92.406.818.920,00	43.914.099.923,00

2. BUBU Hang Nadim

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	172.672.395.162,00	0,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	137.620.000,00	0,00
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	2.049.950.000,00	0,00
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	82.071.538,00	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU	27.516.264.200,00	16.008.785.278,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	850.346.400,00	179.442.000,00
537114	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - BLU	1.500.789.048,00	330.306.000,00
537115	Belanja Modal Lainnya – BLU	1.351.943.340,00	0,00
Total Belanja Modal		206.161.379.688,00	16.518.533.278,00

3. Kantor Air dan Limbah

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.222.000.000,00	0,00
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	13.330.000,00	0,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.918.131.442,00	0,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	10.330.000,00	0,00
534121	Belanja Modal Irigasi PHLN	140.822.819.470,00	102.459.355.109,00
534121	Belanja Modal Irigasi RM	1.747.683.024,00	14.993.734.900,00

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	58.260.000,00	363.800.000,00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	741.434.187,00	1.250.313.160,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12.168.131.475,00	2.883.603.000,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	83.040.000,00	0,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	1.032.206.000,00	10.078.703.907,00
Total Belanja Modal		170.817.365.598,00	132.029.510.076,00

4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.003.000.000,00	0,00
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	19.160.000,00	0,00
533118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	53.018.472,00	144.645.001,00
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	31.716.022.070,00	67.803.924.592,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	53.130.000,00	49.560.000,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5.127.208.000,00	6.147.548.820,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.588.977.831,00	2.060.384.564,00
537114	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - BLU	0,00	12.014.472.800,00
Total Belanja Modal		46.560.516.373,00	88.220.535.777,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	71.052.037.016
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0,00	53.670.000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	48.603.432
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	198.322.000	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	42.948.150.780	77.225.783.807
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	3.359.238.119	4.907.071.000
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	192.897.000	0,00
Total Belanja Modal		46.698.607.899,00	153.287.165.255,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	125.086.500,00	120.866.500,00
Total Belanja Modal		125.086.500,00	120.866.500,00

7. Kantor Pengelolaan Lahan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	4.190.756.489,00	4.689.363.865,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.281.406.000,00	944.929.790,00
Total Belanja Modal		5.472.162.489,00	5.634.293.655,00

Penjelasan
LP SAL

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2019 adalah sebesar **Rp586.726.344.967,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp233.543.636.138,00)**, penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp422.237.966.580,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp423.215.501.073,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp977.534.493,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp188.694.330.442,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp775.420.675.409,00**.

Saldo Anggaran
Lebih Awal

C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp586.726.344.967,00 merupakan Saldo Awal Kas dan Bank-BLU pada Badan Pengusahaan Batam yang telah dilakukan rekonsiliasi pengesahan saldo tersebut dengan KPPN Kota Batam. Saldo Anggaran Lebih meliputi Kas Operasional Penerimaan, Operasional Pengeluaran, dan Pengelolaan kas (Deposito).

Sisa
Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran

C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp233.543.636.138,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Januari s/d Desember 2019)	1.331.713.643.060,00
2	Belanja RM dan PNBP (Januari s/d Desember 2019)	1.565.257.279.198,00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (1-2)	(233.543.636.138,00)

Penyesuaian
SiLPA/SiKPA

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah nihil.

Penyesuaian
Transaksi BLU
dengan BUN

C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp422.237.966.580,00 merupakan penyesuaian atas Pendapatan atas Alokasi APBN yang diberikan Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari APBN Alokasi Rupiah Murni (RM)	279.845.304.392,00
2	Pendapatan dari APBN Alokasi Rupiah Murni Pendamping (RMP)	2.547.377.211,00
3	Pendapatan dari APBN Alokasi Pinjaman & Hibah Luar Negeri (PHLN)	140.822.819.470,00
4	Pendapatan atas PNBP yang disetorkan ke Kas Negara	(977.534.493,00)
	Jumlah	422.237.966.580,00

Pendapatan
dari APBN

C.3.1.1. Pendapatan dari APBN

Penyesuaian Pendapatan dari APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp423.215.501.073,00 merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian

dari pengurangan saldo anggaran lebih awal. Penyesuaian pendapatan dari APBN terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
1	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Peralatan dan mesin	18.225.000.000,00
2	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	32.490.000,00
3	Belanja Barang yang berasal dari APBN/Rupiah Murni	10.600.000,00
4	Belanja Pemeliharaan yang berasal dari APBN/Rupiah Murni	13.792.390.000,00
5	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	10.330.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	2.918.131.442,00
7	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Jalan & Jembatan	242.369.292.940,00
8	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan	302.030.000,00
9	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perencanaan Pengawasan Jalan & Jembatan	2.049.950.000,00
10	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Jalan & Jembatan	135.090.010,00
11	Pengadaan Aset Tetap yang berasal PHLN - Irigasi	140.822.819.470,00
12	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Irigasi	1.747.683.024,00
13	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	58.260.000,00
14	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Irigasi	741.434.187,00
Jumlah		423.215.501.073,00

Penyetoran
PNBP ke Kas
Negara

C.3.1.2 Penyetoran PNPB ke Kas Negara

Penyesuaian penyetoran PNPB ke Kas Negara selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp977.534.493,00 merupakan penyetoran PNPB ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam antara lain terdiri dari pendapatan pemindahtanganan BMN sebesar Rp111.000.000,00, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp544.290.634,00

dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp322.243.859,00.

*Koreksi
Kesalahan
Pembukuan
Tahun
Sebelumnya*

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah nihil.

*Penyesuaian
Lain-lain*

C.5. Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian lain-lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah nihil.

*Saldo Anggaran
Lebih Akhir*

C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp775.420.675.409,00 merupakan penambahan SAL awal sebesar Rp586.726.344.967,00. SiLPA/SiKPA tahun berjalan sebesar (Rp233.543.636.138,00) dan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp422.237.966.580,00 yang merupakan pendapatan dari APBN. SAL akhir pada Badan Pengusahaan Batam telah dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan saldo dengan KPPN Kota Batam.

D. PENJELASAN ATAS POS.POS NERACA

D.1. Aset Lancar

Aset Lancar

D.1.1. Kas dan Bank

Kas dan Bank

Saldo kas dan bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp869.636.391.316,00 dan Rp692.671.632.122,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
A. KAS LAINNYA DI BLU		
a. Kantor Pusat		
Kas Tunai	105.652.925,00	65.451.675,00
Giro Rupiah	42.755.930.596,00	43.017.967.587,00
Giro Dana Kelolaan	699.499.375,00	589.953.187,00
Jumlah (a)	43.561.082.896,00	43.673.372.449,00
b. Kantor Perwakilan Jakarta		
Giro Dana Kelolaan	36.165.062,00	28.223.267,00
Jumlah (b)	36.165.062,00	28.223.267,00
c. Rumah Sakit BP Batam		
Giro Dana Kelolaan	453.867.588,00	535.562.017,00
Jumlah (c)	453.867.588,00	535.562.017,00
d. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam		
Giro Rupiah	0,00	5.760.177.357,00
Jumlah (d)	0,00	5.760.177.357,00
e. BUBU Hang Nadim		
Giro Dana Kelolaan	2.044.138.107,00	1.926.598.141,00
Jumlah (e)	2.044.138.107,00	1.926.598.141,00
f. Kantor Pengelolaan Lahan		
Giro Rupiah	1.230.906,00	1.846.000,00
Giro Dana Kelolaan	48.119.231.349,00	54.020.507.929,00
Jumlah (f)	48.120.462.255,00	54.022.353.929,00
Jumlah Kas Lainnya di BLU (a+b+c+d+e+f)	94.215.715.907,00	105.946.287.160,00
REKONSILIASI BANK		
-RSBP: Kesalahan Bank	0,00	(1.000.005,00)
Jumlah Kas Lainnya di BLU setelah Rekonsiliasi	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00
II. KAS & BANK BLU		
a. Kantor Pusat		
Giro Rupiah	413.242.174.484,00	406.214.050.135,00
Jumlah (a)	413.242.174.484,00	406.214.050.135,00

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
b. Kantor Perwakilan Jakarta		
Kas Tunai	2.964.500,00	423.500,00
Giro Rupiah	130.856.061,00	227.872.672,00
Giro Dana Kelolaan	5.457.001,00	5.898.000,00
Jumlah (b)	139.277.562,00	234.194.172,00
c. Rumah Sakit BP Batam		
Kas Tunai	65.781.097,00	42.305.800,00
Giro Rupiah	291.515.017,00	157.758.731,00
Jumlah (c)	357.296.114,00	200.064.531,00
d. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam		
Giro Rupiah	1.617.917.287,00	25.484.920,00
Jumlah (d)	1.617.917.287,00	25.484.920,00
e. BUBU Hang Nadim		
Giro Rupiah	22.200.354,00	41.491.972,00
Jumlah (e)	22.200.354,00	41.491.972,00
f. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah		
Giro Rupiah	18.128.899,00	7.492.054,00
Jumlah (f)	18.128.899,00	7.492.054,00
g. Kantor Pengelolaan Lahan		
Giro Rupiah	76.795.720,00	3.567.183,00
Jumlah (g)	76.795.720,00	3.567.183,00
Jumlah Kas & Bank BLU (a+b+c+d+e+f+g)	415.473.790.421,00	406.726.344.967,00
III. SETARA KAS LAINNYA – BLU		
a. Kantor Pusat		
Deposito Rupiah	360.000.000.000,00	180.000.000.000,00
Jumlah Setara Kas Lainnya – BLU (III)	360.000.000.000,00	180.000.000.000,00
Jumlah Kas pada BLU (II + III)	775.473.790.421,00	586.726.344.967,00
JUMLAH KAS & BANK (I+II+III)	869.689.506.328,00	692.671.632.122,00
IV. Rekonsiliasi Bank		
Kantor Pusat		
- Setoran Dalam Perjalanan	(54.156.472,00)	0,00
Rumah Sakit BP Batam		
- Kurang Pencatatan	941.460,00	0,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam		
- Biaya Administrasi Bank	100.000,00	0,00
Total Rekonsiliasi Bank (IV)	(53.115.012,00)	0,00
Jumlah Kas dan Bank Setelah Rekonsiliasi	869.636.391.316,00	692.671.632.122,00

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp869.636.391.316,00 merupakan saldo rekening yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam. Dalam jumlah tersebut belum termasuk saldo rekening bersama sebesar Rp1.025.322.302,00 dan USD8.891,50 (ekuivalen Rp123.600.830,00 USD=Rp13.901,01) yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjiannya.

Saldo kas dan bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp869.636.391.316,00 berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	174.398.522,00
2	Giro Rupiah	458.156.749.324,00
3	Giro Dana Kelolaan	51.358.358.482,00
4	Setara Kas Lainnya - Deposito Rupiah	360.000.000.000,00
	Jumlah (1+4)	869.689.506.328,00
5	Rekonsiliasi Bank	(53.115.012,00)
	Total Kas dan Bank setelah rekonsiliasi (1 s.d 5)	869.636.391.316,00

(Rincian Kas, Saldo Bank, Rekonsiliasi Bank, Rekening Bersama, Surat Berharga serta Rincian Kas dan Bank berdasarkan rekening BLU dapat dilihat pada Lampiran 1.a, 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e).

Kas Lainnya dan Setara Kas

D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas adalah kas lainnya di BLU per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp94.215.715.907,00 dan Rp105.945.287.155,00 merupakan dana yang tersedia atas saldo titipan pihak ketiga maupun dana pihak ketiga yang ada di Badan Pengusahaan Batam dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pusat	43.561.082.896,00	43.673.372.449,00
Kantor Perwakilan Jakarta	36.165.062,00	28.223.267,00
Rumah Sakit BP Batam	453.867.588,00	534.562.012,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	0,00	5.760.177.357,00
BUBU Hang Nadim	2.044.138.107,00	1.926.598.141,00
Kantor Pengelolaan Lahan	48.120.462.255,00	54.022.353.929,00
Jumlah	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00

Rincian kas lainnya di BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.1.a.Kantor Pusat

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	105.652.925,00
2	Giro Rupiah	42.755.930.596,00
3	Giro Dana Kelolaan	699.499.375,00
	Jumlah	43.561.082.896,00

- Kas Tunai pada Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp105.652.925,00 merupakan dana deposit penyewa rusun, yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Jaminan Rusun Sekupang	31.917.500,00
2	Kas Jaminan Batu Ampar	17.072.750,00
3	Kas Jaminan Rusun Muka Kuning	475.175,00
4	Kas Jaminan Rusun Kabil	56.187.500,00
	Jumlah	105.652.925,00

- Giro rupiah pada Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.755.930.596,00 merupakan dana titipan yang masih berada di rekening giro rupiah Kantor Pusat, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Giro Rupiah atas Titipan Kantor Pusat	38.460.080.236,00
2	Giro Rupiah atas Titipan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	3.634.235.909,00
3	Giro Rupiah atas Titipan RSBP	241.147.478,00
4	Giro Rupiah atas Titipan BUBU Hang Nadim	420.466.973,00
	Jumlah	42.755.930.596,00

1. Giro rupiah atas titipan Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.460.080.236,00 terdiri dari dana atas penerimaan sementara yang masih berada di rekening giro rupiah pada Kantor Pusat dan

outstanding check yang belum dicairkan oleh *supplier* (pihak ketiga).

2. Giro rupiah atas titipan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.634.235.909,00 merupakan dana titipan atas perkiraan transaksi penerimaan bank yang belum diketahui peruntukan dan kelebihan setor pembayaran faktur, dana tersebut telah disetorkan ke rekening giro rupiah pada Kantor Pusat.
 3. Giro rupiah atas titipan RSBP per 31 Desember 2019 sebesar Rp241.147.478,00 merupakan dana atas deposit/simpanan pelanggan, titipan dana pihak ketiga lainnya serta penerimaan sementara, dana tersebut telah disetorkan ke rekening giro rupiah pada Kantor Pusat.
 4. Giro rupiah atas titipan BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp420.466.973,00 merupakan dana atas titipan pembayaran pihak ketiga lainnya, titipan pembayaran pada Kantor Bandara, serta penerimaan sementara, dimana dana tersebut telah disetorkan ke rekening giro rupiah pada Kantor Pusat.
- Giro dana kelolaan pada Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp699.499.375,00 merupakan dana titipan yang berada di rekening giro dana kelolaan. Giro dana kelolaan pada Kantor Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Giro Dana Kelolaan atas Titipan Kantor Pusat	565.245.635,00
2	Giro Dana Kelolaan atas Titipan Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	134.253.740,00
	Jumlah	699.499.375,00

- Giro Dana Kelolaan atas Titipan Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp565.245.635,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Titipan Dana Rusun Batu Ampar	129.044.750,00
2	Titipan Dana Rusun Sekupang	37.068.500,00

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
3	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	257.550.000,00
4	Titipan Dana Rusun Kabil	61.782.500,00
5	Penerimaan Sementara tahun 2016 s/d 2019	79.799.885,00
	Jumlah	565.245.635,00

- Giro dana kelolaan atas titipan Kantor Pengelolaan Air dan Limbah per 31 Desember 2019 sebesar Rp134.253.740,00 merupakan dana jaminan pelanggan KPLI B3 yang apabila perjanjian berakhir dan mengundurkan diri, maka dana dimaksud dikembalikan kepada pelanggan, dimana dana tersebut berada pada rekening Kantor Pusat dari Tahun 2016.

Terjadi penurunan kas lainnya di BLU tahun 2019 pada Kantor pusat dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan titipan penerimaan pihak ketiga lainnya, jaminan pelaksanaan pembangunan (JPP), titipan uang muka UWTO dan titipan jaminan lainnya pada Tahun 2018 telah dilakukan pemindahan saldo ke Kantor Pengelolaan Lahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Berita Acara Serah Terima antara Biro Keuangan, Kantor Pengelolaan Lahan dan Satuan Pemeriksa Internal Nomor 693/A1.2/09/2018.

D.1.1.1.b. Kantor Perwakilan Jakarta

Giro dana kelolaan pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.165.062,00 terdiri dari dana titipan atas *service charge* KGH pegawai yang belum dibayarkan/disetorkan kepada pegawai sebesar Rp32.231.654,00 dan dana atas utang pajak yang belum disetorkan kepada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.757.909,00 yang terdiri dari utang pajak di rekening BLU sebesar Rp5.457.001,00 dan di rekening penerimaan sebesar Rp4.300.908,00.

D.1.1.1.c. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Giro dana kelolaan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp453.867.588,00 merupakan dana atas deposit/simpanan pelanggan, titipan dana pihak ketiga lainnya serta penerimaan sementara.

D.1.1.1.d. BUBU Hang Nadim

Giro dana kelolaan pada BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.044.138.107,00 merupakan dana atas titipan pembayaran pihak ketiga lainnya, titipan pembayaran pada Kantor Bandara, serta penerimaan sementara.

D.1.1.1.e. Kantor Pengelolaan Lahan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Giro Rupiah	1.230.907,00
2	Giro Dana Kelolaan	48.119.231.349,00
	Jumlah	48.120.462.255,00

- Giro rupiah Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp1.230.907,00 merupakan penerimaan sementara pada Kantor Pengelolaan Lahan yang belum disetorkan ke rekening dana kelolaan.
- Giro dana kelolaan Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp48.119.231.349,00 merupakan dana atas penerimaan sementara, titipan penerimaan pihak ketiga lainnya, jaminan pelaksanaan pembangunan, titipan uang muka UWTO, dan titipan jaminan lainnya.

Kas Pada Badan Layanan Umum

D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp775.420.675.409,00 dan Rp586.726.344.967,00. Saldo kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 sebesar Rp775.420.675.409,00 terdiri dari kas dan bank-BLU sebesar Rp415.473.790.421,00, setara kas lainnya-BLU sebesar Rp360.000.000.000,00 dan rekonsiliasi bank sebesar (Rp53.115.012,00). Saldo tersebut berada pada rekening operasional penerimaan, pengeluaran maupun pengelolaan kas Badan Pengusahaan Batam yang telah disahkan.

Saldo tersebut merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Kas pada BLU 1 Januari 2019	586.726.344.967,00
2	Penerimaan Kas PNBPN per 31 Desember 2019	1.330.736.108.567,00
3	Pengeluaran Kas PNBPN per 31 Desember 2019	(1.142.041.778.125,00)
4	Kenaikan/(penurunan) Kas per 31 Desember 2019	188.694.330.442,00
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLU (Memo Penyesuaian)	0,00
6	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2019 (1+4+5)	775.420.675.409,00
7	Kas dan Bank Belum Disahkan	0,00
8	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2019 (6-7)	775.420.675.409,00

Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp775.420.675.409,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kas dan Bank BLU	415.420.675.409,00	406.726.344.967,00
Setara Kas Lainnya-BLU	360.000.000.000,00	180.000.000.000,00
Jumlah	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00

Kas dan Bank - BLU

D.1.1.2.a Kas dan Bank BLU

Kas dan bank pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp415.420.675.409,00 dan

Rp406.726.344.967,00. Kas dan bank pada Badan Layanan Umum merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pusat	413.242.174.484,00	406.214.050.135,00
Kantor Perwakilan Jakarta	139.277.562,00	234.194.172,00
Rumah Sakit BP Batam	357.296.114,00	200.064.531,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1.617.917.287,00	25.484.920,00
BUBU Hang Nadim	22.200.354,00	41.491.972,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	18.128.899,00	7.492.054,00
Kantor Pengelolaan Lahan	76.795.720,00	3.567.183,00
Jumlah	415.473.790.421,00	406.726.344.967,00
Rekonsiliasi Bank	(53.115.012,00)	0,00
Jumlah Kas dan Bank BLU setelah Rekonsiliasi	415.420.675.409,00	406.726.344.967,00

Rincian kas dan bank BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.2.1.a.Kantor Pusat

- **Giro rupiah** pada Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp413.242.174.484,00 merupakan saldo atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan dari Kantor Pusat maupun dari unit pelaporan mandiri yang dimana pada akhir periode saldonya telah dipindahkan ke rekening giro rupiah Kantor Pusat.

D.1.1.2.1.b.Kantor Perwakilan Jakarta

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	2.964.500,00
2	Giro Rupiah	130.856.061,00
3	Giro Dana Kelolaan	5.457.001,00
	Jumlah	139.277.562,00

- **Kas tunai** Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.964.500,00 merupakan *pettycash* KGH atas pendapatan sewa

kamar, *service charge* dan pajak PB1 yang belum disetor ke rekening penerimaan.

- **Giro rupiah** Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.856.061,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Kantor Perwakilan Jakarta atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.
- **Giro dana kelolaan** Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.457.001,00 merupakan saldo rekening atas transaksi pajak PB1 atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta yang belum disetorkan.

D.1.1.2.1.c.Rumah Sakit BP Batam

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	65.781.097,00
2	Giro Rupiah	291.515.017,00
	Jumlah	357.296.114,00

- **Kas tunai** Rumah Sakit Badan Pegusahaan Batam (RSBP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.781.097,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Kecil Kasir Apotik	5.323.788,00
2	Kas Kecil Kasir Rawat Jalan	5.995.959,00
3	Kas Kecil Kasir Rawat Inap	46.536.200,00
4	Kas Kecil Kasir Klinik Baloi	926.000,00
4	Kas Kecil Kasir Apotik Baloi	5.420.000,00
5	Kas Kecil Kasir Klinik BUBU Hang Nadim	421.500,00
6	Kas Kecil Kasir IGD	1.157.650,00
	Jumlah	65.781.097,00

- **Giro rupiah** Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp357.296.114,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Rumah Sakit BP Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.d.Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Giro rupiah Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.617.917.287,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.e.BUBU Hang Nadim

Giro rupiah BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.200.354,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening BUBU Hang Nadim atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.f.Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Giro rupiah Kantor Pengelolaan Air dan Limbah per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.128.899,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Kantor Pengelolaan Air dan Limbah atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.g.Kantor Pengelolaan Lahan

Giro rupiah Kantor Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp76.795.720,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Kantor Pengelolaan Lahan atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

Setara Kas Lainnya-BLU

D.1.1.2.b Setara Kas Lainnya - BLU

Saldo setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2019 sebesar Rp360.000.000.000,00. Setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2019 sebesar Rp360.000.000.000,00 adalah investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 (satu) bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung, yang terdiri dari:

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
1	BTN 0002701400033548	B-35/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	25.000.000.000,00
		S-315/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 27 Maret 2018	
2	BTN 0002701400033556	B-35/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	25.000.000.000,00
		S-315/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 27 Maret 2018	
3	BRI 211701000486409	B-37/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	15.000.000.000,00
		S-316/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 27 Maret 2018	
4	BRI 211701000487405	B-37/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	15.000.000.000,00
		S-316/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 27 Maret 2018	
		B/341/A1.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017	
5	BNI 0705635599	B-39/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018.	25.000.000.000,00
		S-317/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 27 Maret 2018	
6	BTN Syariah SY52898	B-44/A1-KPA/KU.15/5/2018 tanggal 25 Mei 2018	25.000.000.000,00
		S-437/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 2 Mei 2018	
7	Muamalat 41110041895	B-41/A1-KPA/KU.15/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	25.000.000.000,00
8	Muamalat 41110041895	B-41/A1-KPA/KU.15/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	25.000.000.000,00
9	BTN 00027.01.40.003541.9	B-37/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
10	BTN 00027.01.40.003542.7	B-37/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
11	Bukopin 2240104067	B-42/A1-KPA/KU.05/3/2018 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
12	Bukopin 2240104068	B-42/A1-KPA/KU.05/3/2018 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
13	BTN Syariah SY 087115	B-40/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
14	BTN Syariah SY 087119	B-40/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
15	Bank Riau Kepri 1.063.000.009	B-38/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
16	Bank Riau Kepri 1.063.000.010	B-38/A1-KPA/KU.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
17	Bank Jabar Banten 2019IDR000013	B-39/A1-KPA/KU.05/3/2018 tanggal 11 Maret 2019	20.000.000.000,00
Jumlah			360.000.000.000,00

Terdapat pencairan Deposito per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 untuk keperluan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
1	Bank Riau 1.063.000.007	B-36/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	25.000.000.000,00
		S-334/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 29 Maret 2018	
2	Bank Riau 1.063.000.008	B-36/A1-KPA/4/2018 tanggal 19 April 2018	25.000.000.000,00
		S-334/WPB.05/KP.0204/2018 tanggal 29 Maret 2018	
Jumlah			50.000.000.000,00

Pendapatan
Yang Masih
Harus Diterima

D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp30.206.210.977,00 dan Rp27.818.764.946,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pusat	686.764.320,00	0,00
BUBU Hang Nadim	13.716.277.313,00	12.528.919.954,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	4.819.775.527,00	4.100.551.595,00
RSBP	10.983.393.817,00	11.189.293.397,00
Jumlah	30.206.210.977,00	27.818.764.946,00

- Pendapatan yang masih harus diterima Kantor Pusat sebesar Rp686.764.320,00 merupakan Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp667.214.320,00 dan Pendapatan

atas setoran pengelolaan Camp. Vietnam di Galang sebesar Rp19.550.000,00.

- Pendapatan yang masih harus diterima **BUBU Hang Nadim** per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.716.277.313,00 merupakan pendapatan pelayanan jasa pada Kantor Bandara yang belum disetorkan oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara atas Parkir	2.009.500,00
2	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri:	6.290.940.000,00
	a. Garuda Indonesia	159.480.000,00
	b. Citilink	2.583.180.000,00
	c. Batik Air	288.240.000,00
	d. Wings Air	151.020.000,00
	e. Sriwijaya Air	139.080.000,00
	f. Lion Air	2.655.900.000,00
	g. Malindo	225.600.000,00
	h. Lion Internasional	83.800.000,00
	i. Charter	840.000,00
	j. Batik Internasional	3.800.000,00
3	Pendapatan atas Piutang Denda pada BUBU Hang Nadim yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2019	7.423.327.813,00
	Jumlah (1+2+3)	13.716.277.313,00

(Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim dapat dilihat pada Lampiran 2.a).

- Pendapatan yang masih harus diterima **Kantor Pengelola Pelabuhan Batam** per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.819.775.527,00 merupakan pendapatan atas piutang denda yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2019 serta koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas pendapatan pass masuk Terminal Sekupang sampai dengan 31 Desember 2019 yang disetorkan di bulan Januari 2020 sebesar Rp133.890.000,00. (Rincian pendapatan yang masih harus diterima Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dapat dilihat pada Lampiran 2.b).

- Pendapatan yang masih harus diterima **Rumah Sakit BP Batam** per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.983.393.817,00 merupakan pendapatan atas BPJS 2016 yang belum dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan. (Rincian pendapatan yang masih harus diterima RSBP dapat dilihat pada Lampiran 2.c).

Piutang Bukan Pajak

D.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.625.251.924,00 dan Rp1.966.135.668,00 merupakan piutang sisa pekerjaan akhir tahun yang belum selesai dengan jaminan garansi bank yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pusat	0,00	96.347.519,00
BUBU Hang Nadim	0,00	223.855.000,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1.616.165.875,00	1.613.847.101,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	9.086.049,00	32.086.048,00
Jumlah	1.625.251.924,00	1.966.135.668,00

- Saldo piutang bukan pajak Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.616.165.875,00 merupakan kelebihan bayar atas pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, nomor kontrak 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/11/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama PT Sumber Alam Sejahtera dan Denda Pembayaran Pekerjaan Batu Miring Terminal Domestik Telaga Punggur serta kelebihan pencatatan piutang lainnya atas kelebihan pengeluaran sementara pada rekening Koran yang akan disetorkan kembali pada periode berikutnya.
- Saldo piutang bukan pajak Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp9.086.049,00 merupakan kelebihan pembayaran PT Giri Awas terhadap pekerjaan jasa konsultasi DED perencanaan teknis *Sediment*

Trap Trash Rack dan Ecotech Garden yang menjadi temuan audit BPK RI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp90.086.049,00 yang telah dicicil sebesar Rp81.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan September 2018 sebesar Rp8.000.000,00 bukti kas no. AIR/2018/09/0027;
- Bulan November 2018 sebesar Rp20.000.000,00 bukti kas No AIR/2018/11/0001;
- Bulan Desember 2018 sebesar Rp30.000.000,00 bukti kas No AIR/2018/12/0149;
- Bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00 bukti kas No AIR/2019/11/0041, dan bukti kas No AIR/2019/11/0069 sebesar Rp13.000.000,00.

Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU

D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp629.777.587.207,00 dan Rp471.366.114.135,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pusat	4.283.792.773,00	2.888.383.068,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	319.841.473,00	2.110.733.195,00
BUBU Hang Nadim	22.815.876.865,00	14.876.703.463,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	171.838.597.500,00	122.136.956.960,00
Rumah Sakit BP Batam	72.508.544.667,00	63.957.187.460,00
Kantor Pengelolaan Lahan	358.010.933.929,00	265.396.149.989,00
Jumlah Piutang Usaha (I)	629.777.587.207,00	471.366.114.135,00
Kantor Pusat	(1.473.849.387,00)	(1.431.435.546,00)
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	0,00	(386.133.313,00)
BUBU Hang Nadim	(8.437.452.828,00)	(6.140.140.605,00)
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	(96.575.782.636,00)	(87.165.558.338,00)
Rumah Sakit BP Batam	(23.717.827.993,00)	(17.590.964.049,00)
Kantor Pengelolaan Lahan	0,00	(0,00)
Jumlah Akum. Penyisihan (II)	(130.204.912.844,00)	(112.714.231.851,00)
Nilai Buku Piutang Usaha :		
Kantor Pusat	2.809.943.386,00	1.456.947.522,00

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	319.841.473,00	1.724.599.882,00
BUBU Hang Nadim	14.378.424.037,00	8.736.562.858,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	75.262.814.864,00	34.971.398.622,00
Rumah Sakit BP Batam	48.790.716.674,00	46.366.223.411,00
Kantor Pengelolaan Lahan	358.010.933.929,00	265.396.149.989,00
Nilai Buku Piutang Usaha (III) = (I-II)	499.572.674.363,00	358.651.882.284,00

Rincian piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1 Kantor Pusat

Piutang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.283.792.773,00 terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah
1	Direktorat Pemanfaatan Aset	2.987.941.283,00
2	Direktorat Pembangunan Prasarana & Sarana	1.188.881.490,00
3	Kantor Pusat Data & Sistem Informasi (PDSI)	106.970.000,00
	Total	4.283.792.773,00

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Direktorat Pemanfaatan Aset	1.857.589.578,00	16.354.824.518,00	15.224.472.813,00	2.987.941.283,00
Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	742.668.490,00	3.428.052.086,00	2.981.839.086,00	1.188.881.490,00
PDSI	288.125.000,00	8.245.374.101,00	8.426.529.101,00	106.970.000,00
Jumlah	2.888.383.068,00	28.028.250.705,00	26.632.841.000,00	4.283.792.773,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(1.431.435.546,00)	425.090.000,00	467.503.841,00	(1.473.849.387,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	1.456.947.522,00			2.809.943.386,00

Piutang Usaha Kantor Pusat berdasarkan Unit Usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1.a.Direktorat Pemanfaatan Aset

Piutang usaha Direktorat Pemanfaatan aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.987.941.283,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Tanah/Lahan	2.362.500,00
2.	Sewa Listrik	773.280,00
3.	Bida Sekupang	409.576,00
4.	Bida Kuning	3.885.760,00
5.	Bida Kabil	43.185.147,00
6.	Sewa Gedung, Ruangan dan Bangunan	1.486.852.930,00
7.	Jasa Pemotongan Ternak	10.800.000,00
8.	Sewa Tapak Kandang Ternak	253.815.069,00
9.	Sewa Kandang ternak	45.000.000,00
10.	Sewa Lokasi Pertanian	866.178.291,00
11.	Sewa Lokasi Perikanan	6.881.750,00
12.	Sewa Lokasi Peternakan	11.018.160,00
13.	Sewa Lainnya	256.778.820,00
Total		2.987.941.283,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3)

D.1.4.1.b.Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana

Piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.188.881.490,00 merupakan piutang atas sewa lahan reklame.

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Sewa Lahan Reklame	1.047.375.000,00
2.	Pertamanan dan Penghijauan	35.042.330,00
3.	Pemakaian Lahan ROW	106.464.160,00
Total		1.188.881.490,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 4)

D.1.4.1.c.Kantor Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI)

Piutang usaha Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) per 31 Desember 2019 sebesar Rp106.970.000,00 merupakan piutang atas pendapatan *Data Centre* IT Centre. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5).

Mutasi Piutang pada Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.Mutasi Piutang Usaha Direktorat Pemanfaatan Aset:

- Penambahan piutang usaha Direktorat Pemanfaatan Aset sebesar Rp16.354.824.518,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan piutang usaha Direktorat Pemanfaatan Aset sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp15.224.472.813,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.824.757.431,00 dan pembatalan faktur tahun berjalan sebesar Rp399.715.382,00.

A.2.Mutasi Piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana:

- Penambahan piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebesar Rp3.428.052.086,00 berasal dari penerbitan faktur sewa lahan reklame sebesar Rp3.412.901.086,00 dan pertamanan dan penghijauan sebesar Rp15.151.000,00.
- Pengurangan piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebesar Rp2.981.839.086,00 merupakan pelunasan faktur yang terdiri dari pelunasan sewa lahan reklame sebesar Rp2.939.459.486,00 pemakaian lahan row untuk jasa lainnya sebesar Rp37.164.000,00, penghijauan/show room bunga/tanaman sebesar Rp782.000,00 dan pembatalan faktur tahun berjalan sebesar Rp4.433.600,00.

A.3.Mutasi Piutang Kantor Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi:

- Penambahan Piutang Usaha PDSI sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.245.374.101,00 berasal dari penerbitan faktur pendapatan Data Centre sebesar Rp8.054.850.501,00 dan pendapatan Trainning Centre sebesar Rp190.523.600,00.

- Pengurangan Piutang Usaha PDSI sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.426.529.101,00 merupakan pelunasan atas faktur pendapatan Data Centre.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kenaikan akumulasi penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar (Rp42.413.841,00) terdiri dari hasil reklasifikasi ke piutang tidak tertagih sebesar Rp353.060.000,00 dan beban penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar (Rp395.473.841,00).

D.1.4.2 Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Piutang usaha Kantor Air dan Pengelolaan Limbah per 31 Desember 2019 sebesar Rp319.841.473,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Air Baku	175.466.473,00
2.	Pengolahan Air Limbah	67.340.000,00
3.	Sewa Lahan KPLI B3	57.675.000,00
4.	Sewa Ruang Kantor	19.360.000,00
	Total	319.841.473,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6)

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Air dan Limbah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Air dan Limbah	2.110.733.195,00	27.678.261.542,00	29.469.153.263,00	319.841.473,00
Jumlah	2.110.733.195,00	27.678.261.542,00	29.469.153.263,00	319.841.473,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(386.133.313,00)	386.241.313,00	108.000,00	0,00
Nilai Buku Piutang Usaha	1.724.599.882,00			319.841.473,00

- Penambahan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp27.678.261.542,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan Piutang Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp29.469.153.263,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2019.

D.1.4.3 BUBU Hang Nadim

Piutang usaha BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.815.876.865,00 yang terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp22.212.731.843,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp603.145.022,00. Piutang dimaksud terbagi atas 2 (dua) mata uang yaitu Indonesia Rupiah dan Dollar Amerika, masing-masing sebesar Rp22.521.602.631,00 dan USD21.169,27 atau Equivalen Rp294.274.234,00. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 7)

Mutasi Piutang Usaha pada BUBU Hang Nadim sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Bandara	14.876.703.463,00	102.177.452.960,00	94.238.279.559,00	22.815.876.864,00
Jumlah	14.876.703.463,00	102.177.452.960,00	94.238.279.559,00	22.815.876.864,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(6.140.140.605,00)	143.876.931,00	2.441.189.154,00	(8.437.452.827,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	8.736.562.858,00			14.378.424.037,00

- Penambahan Piutang Usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp102.177.452.960,00 berasal dari Penerbitan Faktur sebesar Rp102.163.544.750,00 dan Selisih Kurs Piutang sebesar Rp13.908.210,00.
- Pengurangan Piutang Usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp94.238.279.559,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp92.540.226.862,00, pembatalan Faktur sebesar

Rp1.468.534.400,00, Selisih Kurs Piutang sebesar Rp26.186.175,00 Jurnal balik JVB-UJKBPK-02-2018 atas Koreksi Tambah Piutang kekurangan Penerimaan Penggunaan Fasilitas Garbarata Garuda sebesar Rp53.600.000,00, Citilink sebesar Rp49.000.000,00, dan Lion Air sebesar Rp56.400.000,00, Jurnal balik JVB-UJKBPK-03-2018 atas Koreksi Tambah Piutang kekurangan Penerimaan atas Penggunaan Fasilitas Listrik (kWh) PT Dharma Bandar Mandala sebesar Rp13.758.970,00 dan PT Persero Batam sebesar Rp30.573.152,00.

D.1.4.4 Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Piutang usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.838.597.500,00 terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp171.700.854.602,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp137.742.898,00 ([Rincian dapat dilihat pada Lampiran 8](#)).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	122.136.956.960,00	429.729.177.579,00	380.027.537.039,00	171.838.597.500,00
Jumlah	122.136.956.960,00	429.729.177.579,00	380.027.537.039,00	171.838.597.500,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(87.165.558.338,00)		9.410.224.298,00	(96.575.782.636,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	34.971.398.622,00			75.262.814.864,00

- Penambahan piutang usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp429.729.177.579,00 berasal dari penerbitan faktur sebesar Rp425.758.033.313,00, Pencatatan piutang sebesar Rp91.299.529,00, piutang KSO sebesar

Rp2.908.416.960,00 pencatatan jurnal manual atas pencatatan selisih kurs sebesar Rp971.427.777,00.

- Pengurangan Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp380.027.537.039,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp338.769.028.143,00, koreksi faktur sebesar Rp32.460.994.093,00 jurnal balik pencatatan piutang KSO sebesar Rp3,797.772.956,00 pelunasan menggunakan penerimaan sementara Rp2.677.113.743,00 dan pencatatan selisih kurs sebesar Rp2.322.628.104,00.

Terdapat perbedaan saldo piutang menurut Laporan Posisi Keuangan dan Daftar piutang dengan penjelasan sebagai berikut:

- Saldo menurut Laporan Posisi Keuangan sebesar Rp171.838.597.500,00, sedangkan saldo menurut Daftar Piutang adalah sebesar Rp169.331.741.756,00 (terdiri dari Piutang Rupiah sebesar Rp129.591.400.222, Piutang USD528.814,22 dan Piutang SGD3.138.272,04)
- Selisih antara saldo Laporan Posisi Keuangan dengan Daftar Piutang adalah sebesar Rp2.506.855.745,00.
- Nilai selisih sebesar Rp2.506.855.744,00 tersebut merupakan Piutang yang tidak terdapat dalam daftar (piutang KSO Non FBMS) yang terdiri dari Piutang rupiah sebesar Rp1.464.454.548,00 dan piutang USD74.987,44.

Dari saldo Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam tersebut, termasuk piutang KSO Non FBMS sebesar Rp2.506.855.744,00 terdiri dari nilai IDR sebesar Rp1.464.454.548,00 dan USD74.987,44 (Ekuivalen USD = Rp1.042.401.196,00) serta tagihan kepada PT. Indodharma Corpora sebesar Rp87.682.147.897,00 yang merupakan tagihan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019.

Tagihan kepada PT. Indodharma Corpora merupakan hak Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam atas kerjasama pengoperasian Terminal Pelabuhan Internasional Sekupang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor12/PERJ-KA/VIII/2004 dan 111/DC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 diadendum Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 tanggal 11 Januari 2010. Adendum dilakukan sehubungan dengan kesulitan PT. Indodharma Corpora mengembalikan investasi sehingga masa kontrak diperpanjang dari 15 tahun menjadi 28 tahun. Akibat ketidakseriusan PT. Indodharma Corpora dalam penyelesaian kewajibannya, Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha menerbitkan Surat Perintah Nomor 133/A3/5/2016 tanggal 24 Mei 2016 untuk mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan PT. Indodharma Corpora.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp96.575.782.636,00). Terdapat penambahan nilai akumulasi penyisihan sebesar Rp9.410.224.298,00 dari penyisihan tahun 2018 sebesar (Rp87.165.558.338,00).

D.1.4.5 Rumah Sakit BP Batam

Piutang Usaha Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.508.544.667,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Piutang Usaha Perusahaan (Pelanggan)	67.555.811.648,00
2.	Piutang Usaha Perorangan (Kredit Umum)	4.952.733.019,00
	Total Piutang	72.508.544.667,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9).

Mutasi Piutang Usaha pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
RSBP	63.957.187.460,00	99.681.209.173,00	91.129.851.966,00	72.508.544.667,00
Jumlah	63.957.187.460,00	99.681.209.173,00	91.129.851.966,00	72.508.544.667,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(17.590.964.049,00)	2.436.068.205,00	8.562.932.149,00	(23.717.827.993,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	46.366.223.411,00			48.790.716.674,00

- Penambahan Piutang Usaha RSBP Batam sebesar Rp99.681.209.173,00 terdiri dari Penerbitan Faktur sebesar Rp98.810.093.888,00, Koreksi Double Pelunasan Piutang sebesar Rp18.534.816,00, Reklasifikasi denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp184.086.855,00, Koreksi selisih tarif piutang BPJS sebesar Rp655.804.454,00 dan Reklasifikasi Piutang Usaha sebesar Rp12.689.160,00.
- Pengurangan Piutang Usaha RSBP Batam sebesar Rp91.129.851.966,00 terdiri dari Pelunasan piutang usaha Perusahaan sebesar Rp76.944.975.126,00, Reklasifikasi Piutang Usaha sebesar Rp12.689.160,00, Koreksi Faktur Rp35.114.361,00, Reklasifikasi denda keterlambatan pembayaran piutang Rp179.625.640,00, Koreksi atas Penerimaan Sementara sebesar Rp217.973.397,00 Koreksi selisih tarif piutang BPJS sebesar Rp13.075.732.132,00, Reklasifikasi Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp585.333.511,00 dan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas penerimaan pendapatan jaminan/deposit perusahaan yang umur piutangnya lebih dari 2 Tahun sebesar Rp78.408.639,00.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang RSOB dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Akumulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.562.932.149,00 berasal dari bertambahnya jumlah piutang dengan peningkatan umur piutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan sebesar Rp8.389.814.002,00 yang merupakan akumulasi penyisihan piutang usaha perusahaan dan sebesar Rp173.118.147,00 yang merupakan akumulasi penyisihan piutang usaha perorangan.

Piutang Usaha Per 31 Desember 2019 di Laporan Posisi Keuangan dibandingkan dengan Laporan Umur Piutang terdapat selisih sebesar Rp26.764.053,00. Hal ini dikarenakan belum ada faktur denda keterlambatan pelunasan piutang sehingga denda keterlambatan piutang tersebut tidak masuk di Laporan Umur Piutang.

Piutang usaha Perusahaan Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2019 diantaranya sebagai berikut:

- Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp62.936.118.817,00
- Piutang PT. Jamsostek sebesar Rp660.666.854,00
- Piutang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp749.769.863,00
- Piutang PT. Pulau Sambu CB Guntung sebesar Rp444.641.068,00
- Piutang PT. Riau Sakti United Plantations sebesar Rp410.054.639,00

D.1.4.6 Kantor Pengelolaan Lahan

Piutang usaha Kantor Pengelolaan Lahan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp358.010.933.929,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Piutang Uang Wajib Tahunan (UWT)	347.390.819.884,00
2.	Piutang atas Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	893.362.246,00
3.	Piutang atas Adminisitrasi Peralihan (BAP)	191.639.807,00
4.	Piutang Revisi Gambar Penetapan Lokasi	900.000,00
5.	Piutang Rekomendasi Hak Atas Tanah (Rekomendasi HAT)	12.800.000,00
6.	Piutang Pengantian Dokumen	51.600.000,00
7.	Piutang Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	823.700.000,00
8.	Piutang Bida Ayu (KSB Plus)	5.910.833.000,00
9.	Denda UWTO	2.729.829.192,00

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
10.	Pendapatan Sanksi/Klaim	5.449.800,00
	Total	358.010.933.929,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10)

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pengelolaan Lahan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Pengelolaan Lahan	265.396.149.989,00	671.345.950.486,00	578.731.166.546,00	358.010.933.929,00
Jumlah	265.396.149.989,00	671.345.950.486,00	578.731.166.546,00	358.010.933.929,00
Akumulasi penyisihan Piutang	(0,00)			(0,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	265.396.149.989,00			358.010.933.929,00

- Penambahan piutang usaha Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp671.345.950.486,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan piutang usaha Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp578.658.672.066,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp568.567.911.534,00, koreksi faktur sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.090.760.532,00 dan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas Piutang PT. Indosat sebesar Rp72.494.480,00.

Kualitas Piutang Usaha

Kualitas piutang usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Unit	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Umur Piutang (Bulan) (Rp)				
		0 - 6	6 - 12	12 - 18	18 - 24	> 24
Kantor Pusat	4.283.792.773,00	2.413.107.336,00	170.688.017,00	523.409.488,00	28.461.172,00	1.148.126.760,00
Kantor Air dan Limbah	319.841.473,00	319.841.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUBU Hang Nadim	22.815.876.864,00	12.217.039.116,00	1.775.483.579,00	972.189.940,00	1.374.709.067,00	6.476.455.162,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	171.838.597.500,00	63.151.551.620,00	8.753.385.322,00	3.361.448.871,00	15.461.999.094,00	81.110.212.593,00

Unit	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Umur Piutang (Bulan) (Rp)				
		0 - 6	6 - 12	12 - 18	18 - 24	>24
Rumah Sakit BP	72.508.544.667,00	41.440.213.512,00	3.800.000.468,00	4.918.766.249,00	8.164.478.749,00	14.185.085.690,00
Jumlah	271.766.653.278,00	119.541.753.057,00	14.499.557.386,00	9.775.814.548,00	25.029.648.082,00	102.919.880.205,00

Terhadap piutang Kantor Pengelolaan Lahan tidak dilakukan penyisihan piutang dan seluruhnya diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Pada butir 6 (4) peraturan dimaksud disebutkan bahwa oleh karena sifatnya. Piutang UWTO tidak diakui penyisihan kerugiannya karena tidak tertagih. Terhadap piutang UWTO yang tidak tertagih akan dilakukan penarikan terhadap lahan yang dialokasikan dan penyesuaian/koreksi terhadap piutang UWTO. Selanjutnya terhadap lahan yang ditarik dapat dialokasikan kepada pihak lain.

*Penyisihan
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU*

D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional

Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp130.204.912.844,00 dan Rp112.714.231.851,00 yang terdiri dari:

Unit	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	1.473.849.387,00	1.431.435.546,00
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	0,00	386.133.313,00
BUBU Hang Nadim	8.437.452.828,00	6.140.140.605,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	96.575.782.636,00	87.165.558.338,00
Rumah Sakit BP Batam	23.717.827.993,00	17.590.964.049,00
Jumlah	130.204.912.844,00	112.714.231.851,00

Penyisihan piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.204.912.844,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Unit	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Umur Piutang (Bulan) (Rp)				
		0%	25%	50%	75%	100%
Kantor Pusat	1.473.849.387,00	0,00	42.672.004,00	261.704.744,00	21.345.879,00	1.148.126.760,00
Kantor Air dan Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUBU Hang Nadim	8.437.452.828,00	0,00	443.870.895,00	486.094.970,00	1.031.031.800,00	6.476.455.163,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	96.575.782.636,00	0,00	2.188.346.331,00	1.680.724.436,00	11.596.499.320,00	81.110.212.549,00
Rumah Sakit BP	23.717.827.993,00	0,00	950.000.117,00	2.459.383.125,00	6.123.359.061,00	14.185.085.690,00
Jumlah	130.204.912.844,00	0,00	3.624.889.347,00	4.887.907.275,00	18.772.236.060,00	102.919.880.162,00

Persediaan

D.1.6. Persediaan

Persediaan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.583.264.314,00 dan Rp18.626.355.115,00 terdiri dari:

Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)	31 Desember 2018 (Rp) (Audited)
Barang Konsumsi	2.579.494.615,00	2.935.657.885,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	195.707.025,00	11.220.500,00
Suku Cadang	2.330.858.720,00	2.820.249.160,00
Pita Cukai, Materai dan Legas	255.000,00	203.000,00
Bahan Baku	463.377.250,00	837.935.440,00
Persediaan Lainnya	11.013.571.704,00	12.021.089.130,00
Jumlah	16.583.264.314,00	18.626.355.115,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 11).

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	2.935.657.885,00	14.962.237.431,00	15.318.400.701,00	2.579.494.615,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	11.220.500,00	1.197.547.525,00	1.013.061.000,00	195.707.025,00
Suku Cadang	2.820.249.160,00	1.864.801.800,00	2.354.192.240,00	2.330.858.720,00
Pita Cukai, Materai dan Legas	203.000,00	12.223.500,00	12.171.500,00	255.000,00

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Bahan Baku	837.935.440,00	1.645.417.500,00	2.019.975.690,00	463.377.250,00
Persediaan Lainnya	12.021.089.130,00	105.469.665.278,00	106.477.182.704,00	11.013.571.704,00
Jumlah	18.626.355.115,00	125.151.893.034,00	127.194.983.835,00	16.583.264.314,00

a Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.962.237.431,00 terdiri dari pembelian barang konsumsi sebesar Rp14.799.751.931,00, koreksi (penghapusan) hutang pada Biro Umum dan Sekretariat sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sekretariat nomor 3239/A1.1/PI.00.04/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp7.500,00, Koreksi Otomatis sebesar Rp686.000,00, koreksi terhadap penyesuaian saldo pada kode barang yang seharusnya pada Biro Umum dan Sekretariat sebesar Rp1.050.000,00 dan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp160.742.000,00.
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp15.318.400.701,00 terdiri dari pemakaian barang konsumsi sebesar Rp15.317.149.201,00, koreksi Otomatis sebesar Rp180.000,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp14.000,00, koreksi (penghapusan) hutang pada Biro Umum dan Sekretariat sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sekretariat nomor 3239/A1.1/PI.00.04/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp7.500,00, dan koreksi terhadap penyesuaian saldo pada kode barang yang seharusnya pada Biro Umum dan Sekretariat sebesar Rp1.050.000,00.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.197.547.525,00 terdiri dari pembelian bahan untuk

pemeliharaan yang dananya berasal dari PNBPN Tahun 2019 sebesar Rp1.065.697.525,00 dan Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 sebesar Rp131.850.000,00.

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.013.061.000,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.864.801.800,00 terdiri dari pembelian suku cadang yang dananya berasal dari PNBPN Tahun 2019 sebesar Rp1.567.034.000,00, penambahan Saldo Awal sebesar Rp294.867.800, Koreksi Tambah sebesar Rp2.900.000,00.
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.354.192.240,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019.

d. Pita Cukai, Materai dan Legas

- Penambahan pita cukai, materai dan Leges sebesar Rp12.223.500,00 merupakan pembelian persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges yang dananya berasal dari PNBPN Tahun 2019.
- Pengurangan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.171.500,00 merupakan pemakaian pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019.

e. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.645.417.500,00 merupakan pembelian bahan baku yang dananya berasal dari PNBPN Tahun 2019.

- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.019.975.690,00 merupakan pemakaian persediaan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.

f. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp105.469.665.278,00 terdiri dari saldo akhir persediaan obat pada aplikasi My Hospital RSBP sebesar Rp104.682.454.642,00, Pembelian Persediaan Lainnya (Non Obat) yang dananya bersumber dari PNBPN Tahun 2019 sebesar Rp635.330.500,00, Inputan Nilai Obat Expired setiap bulan sebesar Rp147.692.636,00 dan koreksi tambah sebesar Rp4.187.500,00.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp106.477.182.704,00 terdiri dari inputan keluar saldo akhir persediaan obat pada Aplikasi My Hospital di RSBP sebesar Rp105.679.568,00, pemakaian persediaan lainnya (Non Obat) sebesar Rp649.650.500,00, Barang Rusak sebesar 147.692.636,00 merupakan barang rusak berat berupa obat-obatan yang telah kadaluarsa.

Rincian persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.583.264.314,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	524.441.550,00
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	32.268.000,00
3	BUBU Hang Nadim	1.340.215.050,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	300.673.725,00
5	Rumah Sakit BP Batam	13.306.624.424,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	36.704.205,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	1.042.337.360,00
	Jumlah	16.583.264.314,00

Saldo Laporan Persediaan Rumah Sakit BP Batam sebesar Rp13.306.624.424,00 tersebut diatas merupakan saldo Persediaan

berdasarkan Aplikasi Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 yang belum termasuk dengan Persediaan Obat Kadaluarsa sebesar Rp147.692.636,00 dalam kondisi rusak.

D.1.7.1 Kantor Pusat

Persediaan Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp524.441.550,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	441.492.550,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.286.000,00
3	Pita Cukai, Materai dan Legas	255.000,00
4	Bahan Baku	54.058.000,00
5	Suku Cadang	27.350.000,00
	Jumlah	524.441.550,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	600.445.040,00	6.564.850.550,00	6.723.803.040,00	441.492.550,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.826.000,00	439.390.400,00	439.930.400,00	1.286.000,00
Suku Cadang	51.000.000,00	39.191.000,00	62.841.000,00	27.350.000,00
Pita Cukai. Materai dan Legas	203.000,00	12.223.500,00	12.171.500,00	255.000,00
Bahan Baku	81.178.250,00	902.314.300,00	929.434.550,00	54.058.000,00
Jumlah	734.652.290,00	7.957.969.750,00	8.168.180.490,00	524.441.550,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.564.850.550,00 terdiri dari pembelian barang konsumsi sebesar Rp6.545.607.050,00, Koreksi penghapusan utang pada Biro

Umum dan Sekretariat sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sekretariat nomor 3239/A1.1/PI.00.04/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp7.500,00, koreksi otomatis sebesar Rp686.000,00, koreksi penyesuaian saldo pada kode barang sebesar Rp1.050.000,00 dan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas karcis pass masuk kendaraan dan penumpang wisata pulau Galang sebesar Rp17.500.000,00.

- Pengurangan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.723.803.040,00 terdiri dari pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp6.722.551.540,00. koreksi otomatis sebesar Rp180.000,00 dan hasil opname fisik sebesar Rp14.000,00, Koreksi penghapusan utang pada Biro Umum dan Sekretariat sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sekretariat nomor 3239/A1.1/PI.00.04/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp7.500,00, dan koreksi penyesuaian saldo pada kode barang sebesar Rp1.050.000,00.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp439.390.400,00 terdiri dari pembelian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp439.390.400,00.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp439.930.400,00 terdiri dari pemakaian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp439.930.400,00

c. Suku Cadang

- Penambahan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp39.191.000,00 merupakan pembelian persediaan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2019.

- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp62.841.000,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019

d. Pita Cukai, Materai dan Legas

- Penambahan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.223.500,00 terdiri dari pembelian pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.171.500,00 terdiri dari pemakaian pita cukai, materai dan legas sampai dengan 31 Desember 2019.

e. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp902.314.300,00 terdiri dari pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp929.434.550,00 terdiri dari pemakaian persediaan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.

D.1.7.2 Kantor Air dan Pengelolaan Limbah

Persediaan Kantor Air dan Pengelolaan Limbah per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.268.000,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	32.268.000,00
2	Barang Untuk Pemeliharaan	0,00
	Jumlah	32.268.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kantor Air dan Limbah adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	58.136.300,00	102.268.000,00	128.136.300,00	32.268.000,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00
Jumlah	59.566.300,00	102.268.000,00	129.566.300,00	32.268.000,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp102.268.000,00 merupakan pembelian barang konsumsi sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2019
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp128.136.300,00 merupakan pemakaian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp1.430.000,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.

D.1.7.3 BUBU Hang Nadim

Persediaan BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.340.215.050,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)
1	Barang Konsumsi	763.814.800,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	193.705.000,00
3	Suku Cadang	12.220.000,00
4	Bahan Baku	370.475.250,00
5	Persediaan Lainnya	0,00
	Jumlah	1.340.215.050,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada BUBU Hang Nadim adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Barang Konsumsi	809.637.400,00	2.526.173.200,00	2.571.995.800,00	763.814.800,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	7.369.500,00	353.041.600,00	166.706.100,00	193.705.000,00
Suku Cadang	10.348.000,00	183.900.000,00	182.028.000,00	12.220.000,00
Bahan Baku	749.884.454,00	673.567.000,00	1.052.976.204,00	370.475.250,00
Persediaan Lainnya	250.000,00	1.819.000,00	2.069.000,00	0,00
Jumlah	1.577.489.354,00	3.738.500.800,00	3.975.775.104,00	1.340.215.050,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp2.526.173.200,00 terdiri dari pembelian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.472.008.200,00 dan Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 sebesar Rp54.165.000,00.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp2.571.995.800,00 merupakan pemakaian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp353.041.600,00 terdiri dari pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp221.191.600,00 dan Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 sebesar Rp131.850.000,00.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp166.706.100,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.

c. Suku Cadang

- Penambahan Suku Cadang sebesar Rp183.900.000,00 merupakan pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan Suku Cadang sebesar Rp182.028.000,00 merupakan pemakaian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp673.567.000,00 merupakan pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp1.052.976.204,00 merupakan pemakaian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.

D.1.7.4 Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Persediaan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.673.725,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)
1	Barang Konsumsi	261.829.725,00
2	Bahan Baku	38.844.000,00
	Jumlah	300.673.725,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Barang Konsumsi	197.395.975,00	1.831.136.500,00	1.766.702.750,00	261.829.725,00
Bahan Baku	0,00	49.800.000,00	10.956.000,00	38.844.000,00
Jumlah	197.395.975,00	1.880.936.500,00	1.777.658.750,00	300.673.725,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp1.831.136.500,00 terdiri dari pembelian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.742.059.500,00 dan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas persediaan barang konsumsi sebesar Rp89.077.000,00.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp1.766.702.750,00 merupakan pemakaian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019

b. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sebesar Rp49.800.000,00 merupakan pembelian Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan Bahan Baku sebesar Rp10.956.000,00 merupakan pemakaian Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2019.

D.1.7.5 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Persediaan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.306.624.424,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)
1	Barang Konsumsi	1.764.000,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00
3	Suku Cadang	2.291.288.720,00
4	Bahan Baku	0,00
5	Persediaan Lainnya	11.751.431.168,00
6	Jumlah	14.044.483.888,00
7	Persediaan Obat yang sudah kadaluarsa	737.859.464,00
8	Jumlah (6– 7)	13.306.624.424,00

Total nilai barang persediaan dalam kondisi usang dan rusak pada laporan barang persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp737.859.464,00 merupakan barang rusak berupa obat-obatan yang telah kadaluarsa (*expired*) pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam. Persediaan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.306.624.424,00 belum termasuk persediaan obat yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Kota Batam sebesar Rp64.291.178,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Juni 2019 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Barang Konsumsi	6.332.580,00	2.497.748.406,00	2.502.316.986,00	1.764.000,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	402.636.500,00	402.636.500,00	0,00
Suku Cadang	2.758.901.160,00	1.641.710.800,00	2.109.323.240,00	2.291.288.720,00
Bahan Baku	6.872.736,00	19.736.200,00	26.608.936,00	0,00
Persediaan Lainnya	12.611.005.958,00	105.279.363.778,00	106.138.938.568,00	11.751.431.168,00
Obat Kadalua	(590.166.828,00)	0,00	147.692.636,00	(737.859.464,00)
Nilai Bersih Persediaan Lainnya	12.020.839.130,00	105.279.363.778,00	106.286.631.204,00	11.013.571.704,00
Jumlah	14.792.945.606,00	109.841.195.684	111.327.516.866	13.306.624.424,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp2.497.748.406,00 merupakan pembelian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp2.502.316.986,00 merupakan pemakaian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp402.636.500,00 merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp402.636.500,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.

c. Suku cadang

- Penambahan suku cadang sebesar Rp1.641.710.800,00 terdiri dari pembelian suku cadang sebesar Rp1.343.943.000,00, Pemindahan Pengadaan barang Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya dicatat dengan menggunakan belanja modal berupa bahan suku cadang RSBP

sesuai dengan Berita Acara Nomor:05/A3,3/5/2019 sebesar Rp294.867.800,00, Koreksi Tambah sebesar Rp2.900.00,00.

- Pengurangan suku cadang sebesar Rp2.109.323.240,00 merupakan pemakaian suku cadang sampai dengan 31 Desember 2019.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp19.736.200,00 merupakan pembelian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp26.608.936,00 merupakan pemakaian bahan baku sampai dengan 31 Desember 2019.

e. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp105.279.363.778,00 terdiri dari pembelian persediaan lainnya sebesar Rp105.275.176.278,00 dan Koreksi Tambah sebesar Rp4.187.500,00.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1069.286.631.204,00 terdiri dari pemakaian persediaan persediaan lainnya sebesar Rp106.138.938.568,00 dan penyesuaian persediaan sebesar dan barang rusak sebesar Rp147.692.636,00.

D.1.7.6 Kantor Perwakilan Jakarta

Persediaan Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.704.205,00 terdiri dari:

NO	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)
1	Barang Konsumsi	36.704.205,00
	Jumlah	36.704.205,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kantor Perwakilan Jakarta adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Barang Konsumsi	36.436.500,00	135.736.450,00	135.468.745,00	36.704.205,00
Jumlah	36.436.500,00	135.736.450,00	135.468.745,00	36.704.205,00

D.1.7.7 Kantor Pengelolaan Lahan

Persediaan Kantor Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.042.337.360,00 terdiri dari:

NO	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)
1	Konsumsi	1.041.621.335,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	716.025,00
	Jumlah	1.042.337.360,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kantor Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2019 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2019 (Audited)
		Penambahan	Pengurangan	
Barang Konsumsi	1.227.274.090,00	1.304.324.325,00	1.489.977.080,00	1.041.621.335,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	595.000,00	2.479.025,00	2.358.000,00	716.025,00
Jumlah	1.227.869.090,00	1.306.803.350,00	1.492.335.080,00	1.042.337.360,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp1.304.324.325,00 merupakan pembelian konsumsi sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp1.489.977.080,00 merupakan pemakaian barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 201

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.479.025,00 merupakan pembelian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.358.000,00 merupakan pemakaian bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019.

Aset Tetap

D.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp51.937.836.663.150,00 dan Rp27.155.572.252.112,00 terdiri dari:

Uraian Aset Tetap	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
I. Aset tetap		
Tanah	42.356.379.117.074,00	21.822.314.130.937,00
Peralatan dan Mesin	1.344.159.267.549,00	1.221.776.217.713,00
Gedung dan bangunan	3.776.851.791.730,00	1.233.215.663.807,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.332.905.283.962,00	7.427.274.269.254,00
Aset tetap lainnya	14.992.748.009,00	14.912.068.009,00
Konstruksi dalam pengerjaan	393.987.073.321,00	437.978.646.602,00
Jumlah (I)	56.219.275.281.645,00	32.157.470.996.322,00
II. Akumulasi Penyusutan		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	964.437.508.753,00	850.616.980.842,00
Gedung dan bangunan	730.756.904.137,00	188.568.337.618,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.585.697.166.105,00	3.962.176.977.500,00
Aset tetap lainnya	547.039.500,00	536.448.250,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah (II)	4.281.438.618.495,00	5.001.898.744.210,00
III. Nilai Buku		
Tanah	42.356.379.117.074,00	21.822.314.130.937,00
Peralatan dan Mesin	379.721.758.796,00	371.159.236.871,00
Gedung dan bangunan	3.046.094.887.593,00	1.044.647.326.189,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.747.208.117.857,00	3.465.097.291.754,00
Aset tetap lainnya	14.445.708.509,00	14.375.619.759,00
Aset dalam pengerjaan	393.987.073.321,00	437.978.646.602,00
Nilai Buku Aset tetap (I-II)	51.937.836.663.150,00	27.155.572.252.112,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tanah

D.2.1. Tanah

Saldo tanah Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp42.356.379.117.074,00 dan Rp21.822.314.130.937,00 (Rincian Tanah dapat dilihat pada lampiran 12).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah sebesar Rp21.822.314.130.937,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp27.437.303.210.817,00, dan mutasi kurang Rp7.182.038.149.680,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		21.822.314.130.937
Mutasi Tambah		
-	Reklasifikasi Masuk	3.707.895.194.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	666.029.684
-	Pengembangan Nilai Aset	198.322.000,00
-	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	419.534.477.000
-	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian	1.969.428.234.000,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	21.369.935.025.133,00
Total Mutasi Tambah		27.467.657.281.817,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan	96.747.770.000,00
-	Transfer Keluar	29.665.337.000,00
-	Reklasifikasi Keluar	3.611.813.453.684,00
-	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian	2.194.090.993.000,00
-	Koreksi Kesalahan Input IP	403.349.380.000,00
-	Koreksi terkait Aset Tetap Revaluasi	597.925.361.996,00
Total Mutasi Kurang		6.933.592.295.680,00
Total Saldo Akhir		42.356.379.117.074,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.707.895.194.000,00 terdiri dari:
 - Hasil Penilaian KPKNL sebesar Rp96.747.770,00 Pada UAPKPB Bubu Hang Nadim sesuai dengan Surat dari KPKNL Nomor: SR-7/WKN.03/KNL.04/2019;

- Reklasifikasi Tanah sebesar Rp2.786.226.286,00 dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor: BA.02/A1.1/4/2019;
 - Reklasifikasi Tanah sebesar Rp824.921.138,00 dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan BA nomor: BA.01/A1.1/4/2019.
2. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp666.029.684,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Lahan
 3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp198.322.000,00 merupakan Pengembangan Nilai Aset Sesuai Dengan BAST/1/A1.2/9/2018 Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam.
 4. Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp419.534.477.000,00 merupakan koreksi berdasarkan hasil input LHIP pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Lahan.
 5. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian sebesar Rp1.969.428.234.000,00 terdiri dari:
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Direktorat Pengamanan sebesar Rp110.140.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sebesar Rp1.397.746.225.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sebesar Rp541.217.798.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Biro Umum sebesar Rp30.354.071.000,00
 5. Hasil Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp21.369.935.025.133,00 merupakan revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2017 sampai dengan 2018 yang kemudian dilakukan pencatatan kembali (*take in*) di tahun 2019

berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI No.S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang terdiri dari:

- Hasil Revaluasi sebesar Rp21.271.711.249.133,00 pada UPKPB Lahan sesuai dengan BA Nomor BAR-IP-77/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-78/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-79/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-80/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-82/WKN.03/KNL.04/2017; BAR-IP-83/WKN.03/KNL.04/2017
- Hasil Revaluasi sebesar Rp98.223.776.000,00 pada UPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BAR-IP-147/WKN.03/KNL.04/2017.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan sebesar Rp96.747.770.000,00 Berdasarkan Berita Acara Penghapusan Dari Simak BMN 2019 No: BA-01/BMN-Aset/IX/2019
2. Transfer Keluar sebesar Rp29.665.337.000,00 terdiri dari:
 - Alih Status ke Kementrian Hukum dan HAM Satker Lapas sesuai dengan SK Kepala BP Nomor: 37 Tahun 2019 sebesar Rp21.190.114.000,00
 - Transfer Keluar ke Polresta Bareleng sesuai SK Kepala BP Batam Nomor 181 sebesar Rp8.475.223.000,00
3. Reklasifikasi keluar sebesar Rp3.611.813.453.684,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor: BA.02/A1.1/4/2019 dan ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan BA nomor: BA.01/A1.1/4/2019 sebesar Rp3.611.147.424.000,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp666.029.684,00;

4. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian sebesar Rp2.194.090.993.000,00 terdiri dari:
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan sebesar Rp1.744.772.314.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Direktorat Pemafaatan Aset sebesar Rp278.698.036.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sebesar Rp107.390.000,00
 - Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan sebesar Rp170.513.253.000,00
6. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp403.349.380.000,00 merupakan koreksi kesalahan input IP pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Lahan
7. Koreksi Terkait Aset Tetap Revaluasi sebesar Rp597.925.361.996,00 merupakan koreksi atas hasil revaluasi aset tetap yang dilakukan pada tahun 2017 s.d 2018.

Peralatan dan
Mesin

D.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.344.159.267.549,00 dan Rp1.221.776.217.713,00. (Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran 13).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.221.776.217.713,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp190.598.256.230,00 dan mutasi kurang Rp68.215.206.394,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		1.221.776.217.713,00
Mutasi Tambah		
-	Koreksi Saldo Awal	1.240.954.000,00

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
-	Pembelian	54.159.504.501,00
-	Transfer Masuk	2.007.143.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	65.784.430.354,00
-	Reklasifikasi Masuk	57.819.327.149,00
-	Pengembangan Nilai Aset	1.251.300.009,00
-	Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.042.208.259,00
-	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	70.939.758,00
-	Pengembangan Melalui KDP	5.222.449.200,00
Total Mutasi Tambah		190.598.256.230,00
Mutasi Kurang		
-	Transaksi Normalisasi BMN	3.106.785.692,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3.638.812.400,00
-	Koreksi Pencatatan	15.267.067.820,00
-	Penghentian dari Penggunaan	7.279.230.031,00
-	Transfer Keluar	485.757.002,00
-	Reklasifikasi Keluar	38.410.220.449,00
-	Penghapusan BMN (BMN yang dihentikan)	27.333.000,00
Total Mutasi Kurang		68.215.206.394,00
Total Saldo Akhir		1.344.159.267.549,00

Mutasi Tambah:

- Koreksi Saldo Awal sebesar Rp1.240.954.000,00 terdiri dari:
 - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas pada UAPKPB Bubu Hang Nadim sebesar Rp849.450.000,00;
 - Pengiputan Saldo Awal Berdasarkan BA/09/A3.22/11/2019 Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp391.504.000,00;
- Pembelian sebesar Rp54.159.504.501,00 merupakan pembelian perolehan Aset Tetap
- Transfer Masuk Berita Acara Nomor 262.1/BA/DC/2018 Tentang Ais Status Penggunaan BMN dari PU-PERA Ke Kantor Pengeloalaan Air dan Limbah Berupa Alat Pengolah Air dan Limbah sebesar Rp2.007.143.000,00;

4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp65.784.430.354,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp57.819.327.149,00 terdiri dari:
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor: BA.02/A1.1/4/2019 sebesar Rp29.362.983.481,00
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BAST/16/A3.3/12/2019 sebesar Rp179.186.039,00
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor: BA.04/A1.1/10/2019 sebesar Rp14.950.000,00
 - Input Perubahan Kodefikasi Barang Milik Negara Pada Lingkup Internal Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Sesuai Berita Acara : BA 11/A3.3/11/2019 sebesar Rp1.788.244.300,00
 - Reklas Masuk dari perubahan Pencatatan Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan BA: BHN/2019/11/0018 sebesar Rp849.450.000,00
 - Reklas Masuk dari perubahan Pencatatan Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan BA: BHN/2019/11/0018 sebesar Rp14.122.750.000,00
 - Reklas Masuk dari perubahan Pencatatan Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan BA: BHN/2019/12/0019 sebesar Rp1.557.760.000,00
 - Reklas Masuk dari perubahan Pencatatan Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan BA: BHN/2019/12/0089 sebesar Rp1.116.945.400,00

- Reklas Masuk Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Berdasarkan Nomor Bukti LAUT/2019/09/4342 sebesar Rp1.450.222.000,00
- Reklas Masuk dari perubahan Pencatatan Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sesuai dengan BA/07/A3.22/11/2019 sebesar Rp20.375.000,00
- Reklas Masuk Berdasarkan BAST-ASET/3/PPK-5124-RM/1 Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Batam sebesar Rp7.022.160.000,00
- Reklas Masuk UAPKPB Rumah Sakit BP Batam Ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sesuai Dengan BAST/16/A3.3/12/2019 sebesar Rp334.300.929,00

6. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.251.300.009,00 terdiri dari:

- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Unit Power Supply Sesuai Nomor Bukti 089595A sebesar Rp173.720.000,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Kamera Udara Sesuai BK : 2018/11/3941 sebesar Rp13.090.009,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Server Sesuai Dengan Nomor Bukti: BK 2018/12/8270 sebesar Rp228.000.000,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Server Sesuai Dengan Nomor Bukti: BK 2018/09/2359 sebesar Rp228.000.000,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Server Sesuai Dengan Nomor Bukti: BK 2017/12/3538 sebesar Rp91.772.500,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Server Sesuai Dengan Nomor Bukti: BK2017/12/0634 sebesar Rp275.317.500,00
- pengembangan Nilai BMN Langsung Berupa Server Sesuai Dengan Nomor Bukti: BK 2018/09/2359 sebesar Rp241.400.00,00

7. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp3.042.208.259,00 terdiri dari:
 - Hasil Tindak Lanjut Normalisasi Berdasarkan berita Acara Normalisasi simak BMN 2019 NO. BA-02/BMN-Aset/IX/2019 sebesar Rp2.975.991.259,00
 - Hasil Tindak Lanjut Normalisasi BMN Sesuai Dengan Berita Acara BA.6/A4.2./9/2019 sebesar Rp66.217.000,00
8. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp70.939.758,00 Berdasarkan Pemeriksaan Fisik Terhadap Barang Milik Negara yang dilakukan Sesuai Dengan Berita Nomor BA/6/A3.22/10/2019 Maka Dilakukan Reklas Dari Aset lainnya Ke Aset Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
9. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp5.222.449.200,00 terdiri dari:
 - Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Berupa Kapitalisasi BMN Dengan Nup 33 (23 *CCTV - Camera Control Television System* sebesar Rp1.680.000.000,00
 - Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Berupa *A.C. Sentral* sebesar Rp3.542.449.200,00

Mutasi Kurang:

1. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.106.785.692,00 terdiri dari:
 - Hasil Tindak Lanjut Normalisasi Berdasarkan berita Acara Normalisasi simak BMN 2019 NO. BA-02/BMN-Aset/IX/2019 sebesar Rp2.975.991.259,00
 - Berita Acara No.BA/16/A3.2/8/2019 tentang Inventarisasi Normalisasi Pada Simak UPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp64.577.433,00

- Penghapusan BMN Sesuai Dengan Berita Acara BA.6/A4.2./9/2019 sebesar Rp66.217.000,00
2. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp3.638.812.400,00 terdiri dari:
- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas pada UAPKPB RSBP atas tindak lanjut temuan BPK RI sesuai dengan BA nomor: 04/A3.3/5/2019 sebesar Rp114.372.000,00
 - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-04/BMN-ASET/12/2019 pada UAPKPB Bubu HN Berupa Mesin X-Ray Sebesar Rp849.450.000,00
 - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-05/BMN-ASET/12/2019 pada UAPKPB Bubu HN Berupa Baju Anti Panas Sebesar Rp1.557.760.000,00
 - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Berdasarkan Berita Acara Nomor. BA-06/BMN-ASET/12/2019 pada UAPKPB Bubu HN Berupa Jam Elektronik Sebesar Rp1.116.945.400,00
 - Koreksi Pencatatan Pada UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset Sesuai Berita Acara, BA 07/A.4.2/11/2019 Sebesar Rp285.000,00
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp15.267.067.820,00 terdiri dari:
- Koreksi pencatatan dari Akun Peralatan dan Mesin ke Akun Persediaan pada UAPKPB Rumah Sakit sesuai dengan BA nomor: 05/A3.3/5/2019 sebesar Rp294.867.820,00
 - Koreksi Pencatatan pada UAPKPB Bubu Hang Nadim Sesuai dengan Berita Acara BA-03/BMN-Aset/IX/2019 Sebesar Rp849.450.000,00
 - Koreksi Pencatatan pada UAPKPB Bubu Hang Nadim Sesuai dengan Berita Acara BA-04/BMN-Aset/XII/2019 Sebesar Rp14.122.750.000,00

4. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp7.279.230.031,00 terdiri dari:

- Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA/01/A3.2/7/2019 dan Berita Acara No. BA/02/A3.22/8/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam sebesar Rp1.680.431.542,00
- Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA/03/A3.22/8/2019 dan Berita Acara No. BA/04/A3.22/8/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam sebesar Rp802.174.678,00
- Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No.BA/5/A3.22/10/2019 dan BA/7/A3.22/11/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam Sebesar Rp1.046.719.313,00
- Reklasifikasi dari Akun Peralatan dan Mesin ke Akun Aset yang tidak digunakan Pada UAPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BA nomor: 3/A5.4/AP.01.02/6/2019 sebesar Rp2.474.780.160,00
- Reklas Dari Aset Tetap Ke aset Lainnya berdasarkan BA.04/A4.2/8/2019 sebesar Rp735.505.000,00
- Penghapusan BMN Dari Penggunaan Pada UAPKPB Kantor AIR dan Limbah sebesar Rp154.738.672,00
- Hasil Pemeriksaan kondisi Kendaraan di maksud sudah rusak Berat dan tidak efisien lagi apabila dilakukan perbaikan. Sehingga pencatatan di SIMAK BMN UAPKPB Biro Umum Dilakukan Penghentian Aset Dari Penggunaan Sesuai Berita Acara Nomor: 06/A1.1/11/2019 sebesar Rp384.880.666,00

5. Transfer Keluar sebesar Rp485.757.002 merupakan penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Biro Umum & Sekretariat sesuai dengan BA Nomor 41 Tahun 2019;
6. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp38.410.220.449,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi Keluar sebesar Rp29.389.026.481,00 merupakan reklasifikasi pencatatan BMN yang sebelumnya di catat oleh UAPKPB Biro Umum & Sekretariat ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai BA Nomor BA.02/A1.1/4/2019;
 - Reklas dari UAPKPB RSBP ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BAST 16/A3.3/12/2019 sebesar Rp179.186.039,00
 - Reklas dari UAPKPB RSBP ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan BA nomor : BAST 16/A3.3/12/2019 dan sebesar Rp334.300.929,00
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BAST/05/A1.1/10/2019 dan sebesar Rp14.950.000,00
 - Reklasifikasi Keluar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam berupa perubahan kuantitas berdasarkan BAST No.04/BAST.A/PNBP5124/9/2019 sebesar Rp1.450.222.000,00
 - Reklasifikasi Keluar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam berupa perubahan kuantitas berdasarkan Berita Acara BA/07/A3.22/11/2019 sebesar Rp20.375.000,00
 - Reklasifikasi Keluar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam berupa perubahan kuantitas berdasarkan Berita Acara BAST-ASET/3/PPK/5124-RM/12 sebesar Rp7.022.160.000,00.
7. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp27.333.000,00 terdiri dari:

- SK Nomor 145 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Maka Dilakukan Penghapusan BMN Pada Dir. Sarpras Senilai Rp19.407.000,00
- SK Nomor 145 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Maka Dilakukan Penghapusan BMN Pada Biro Umum Senilai Rp7.926.000,00

Gedung dan Bangunan

D.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.776.851.791.730,00 dan Rp1.233.215.663.807,00. (Rincian gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 14).

Terdapat aset tetap pada Biro Umum yang masih dalam sengketa dengan pihak lain senilai Rp378.000.000,00 berupa bangunan lantai jemur permanen di Lokasi Pantai Melur-Galang. Kondisi bangunan tersebut telah dihancurkan oleh pihak ketiga dalam hal ini PT Glory Point, sehingga kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, aset bangunan lantai jemur permanen akan diusulkan penghapusannya dikarenakan sudah tidak memiliki masa manfaat dan nilai ekonomis sesuai dengan penjelasan Kepala Biro Umum dan sesuai dengan surat atas nama Kepala BP Batam Anggota 4/Deputi Bidang Sarana Lainnya nomor B/273/A4/5/2017 perihal laporan tanggal 10 Mei 2017. Belum dilakukan penghapusan sampai dengan saat ini.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.233.215.663.807,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.510.892.387.561,00, dan mutasi kurang sebesar Rp7.967.256.259.638,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		1.233.215.663.807,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	3.190.562.538,00
-	Transfer Masuk	1.872.692.000,00
-	Penyelesaian Dengan KDP	6.868.452.922,00
-	Pengembangan Melalui KDP	3.032.842.319,00
-	Reklasifikasi Masuk	4.175.389.597.557,00
-	Pengembangan Nilai Aset	611.066.000,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai /Kuantitas	285.000,00
-	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	2.776.191.298,00
-	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi	1.565.635.101.000,00
-	Koreksi Kesalahan Input IP	44.010.958.000,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	4.707.504.638.927,00
Total Mutasi Tambah		10.510.892.387.561,00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset Dari Penggunaan	2.936.921.300,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai /Kuantitas	72.774.385,00
-	Transfer Keluar	28.814.491.434,00
-	Reklasifikasi Keluar	4.175.995.164.527,00
-	Transaksi Normalisasi Bmn Aset Tetap	2.989.080.000,00
-	Penghapusan	198.370.000,00
-	Koreksi Kesalahan Input Ip	1.555.878.451.000,00
-	Koreksi Transfer Keluar Atas 224	4.033.521.000,00
-	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	1.712.957.000,00
-	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian	1.565.397.330.000,00
-	Koreksi Nilai Barang Berlebih	82.100.840,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	629.145.098.152,00
Total Mutasi Kurang		7.967.256.259.638,00
Saldo Akhir		3.776.851.791.730,00

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp3.190.562.538,00 merupakan pembelian perolehan Aset Tetap
2. Transfer Masuk sebesar Rp1.872.692.000,00 Merupakan Transfer Masuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Dir. Pemanfaatan Aset sesuai Surat Menteri Keuangan No S-73/MK.6/WKN.03/KNL.04/2019

3. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp6.868.452.922,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
4. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp3.032.842.319,00 terdiri dari:
 - Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Pada UAPKPB Biro Umum Sesuai Dengan BK 2019/12/1534 Sebesar Rp98.500.000,00
 - Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam Berupa Bangunan Gedung A Rumah Sakit Bp Batam Sebesar Rp2.376.076.119,00
 - Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Batam Berupa Bangunan Gedung Terbuka/Pelabuhan/Bandara Permanen Sebesar Rp558.266.200,00
5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp4.175.389.597.557,00 terdiri dari:
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp4.173.973.858.557,00
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan BA nomor : BA.01/A1.1/3/2019 sebesar Rp1.415.739.000,00
6. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp611.066.000,00 terdiri dari:
 - Pengembangan Nilai Aset Pada UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset Berdasarkan BK 2019/1/0808 Sebesar Rp119.437.000,00
 - Pengembangan Nilai Aset Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam Sesuai Nomor Bukti 5126.006.001.053/D.01 sebesar Rp491.629.000,00

7. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp285.000,00 merupakan koreksi pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN pada UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai BA 07/A4.2/11/2019
8. Reklasifikasi dari lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp2.776.191.298,00 terdiri dari:
 - Penggunaan Kembali Aset yang Sudah Di Berhentikan Penggunaan Sesuai Dengan BA 11/A3.3/11/2019 Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam Sebesar Rp1.788.244.300,00
 - Penggunaan Kembali Aset yang Sudah Di Berhentikan Penggunaan Sesuai Dengan BA BA07/A1.1/12/2019 Pada UAPKPB Biro Umum Sebesar Rp49.552.998,00
 - Penggunaan Kembali Aset yang Sudah Di Berhentikan Penggunaan Sesuai Dengan BA 1/A4.3/12/2019 Pada UAPKPB Biro Umum Sebesar Rp358.204.000,00
 - Penggunaan Kembali Aset yang Sudah Di Berhentikan Penggunaan Sesuai Dengan BA 2/A4.3/12/2019 Pada UAPKPB Biro Umum Sebesar Rp580.190.000,00
9. Koreksi Reklasifikasi keluar akibat koreksi penilaian sebesar Rp1.565.635.101.000,00 merupakan Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Biro Umum berdasarkan hasil input LHIP
10. Koreksi kesalahan input IP sebesar Rp44.010.958.000,00 terdiri dari:
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Direktorat Pengamanan Sebesar Rp69.284.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sebesar Rp41.750.179.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Sebesar Rp135.116.000,00

- Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sebesar Rp2.056.379.000,00
11. Hasil Revaluasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.707.504.638.927,00 merupakan revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2017 sampai dengan 2018 yang kemudian dilakukan pencatatan kembali (*take in*) di tahun 2019 berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI No.S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang terdiri dari:
- Revaluasi Tahun 2017 sebesar Rp4.682.307.552.797,00
 - Revaluasi Tahun 2017 dari barang berlebih sebesar Rp24.231.162.000,00
 - Koreksi terkait aset revaluasi yang sudah dilakukan reklas sebesar Rp218.563.103,00
 - Koreksi terkait aset revaluasi yang sudah dilakukan reklas ke aset yang tidak digunakan sebesar Rp747.361.027,00

Mutasi Kurang:

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp2.936.921.300,00 terdiri dari:
- Penghentian Aset Dari Penggunaan Berdasarkan Mutasi Berita Acara No. 431/A3.3/8/2019 sebesar Rp1.788.244.300,00
 - Reklasifikasi dari Akun Gedung dan Bangunan ke Akun Aset yang tidak digunakan Pada UAPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BA nomor: 3/A5.4/AP.01.02/6/2019 sebesar Rp237.624.000,00
 - Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sesuai Berita Acara Nomor : 17/A4.3/9/2019 Tentang Barang milik negara rusak berat berupa Pagar DTA Sei Ladi sebesar Rp61.343.000,00

- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sesuai Berita Acara Nomor : 872/KEPMEN-KP/SJ/PL.820 Sebesar Rp849.710.000,00
- 2. Koreksi pencatatan nilai/ kuantitas sebesar Rp72.774.385,00 merupakan koreksi pencatatan nilai Bangunan Gedung Tempat Kerja pada UAPKPB RSBP Batam sesuai BA Nomor 04/A3.3/5/2019;
- 3. Transfer Keluar sebesar Rp28.814.491.434,00 merupakan Transfer dari UAPKPB Biro Umum Ke Polresta Barelang Sesuai Dengan SK Nomor 181 Tahun 2019
- 4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.175.995.164.527,00 terdiri dari:
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan BA nomor : BA.01/A1.1/4/2019 sebesar Rp4.174.206.920.227,00
 - Koreksi Pencatatan Terhadap Kodering Barang Milik Negara Di Aplikasi Simak BMN Berdasarkan Berita Acara Nomor 11/A3.3/11/2019 Sebesar Rp1.788.244.300,00
- 5. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap sebesar Rp2.989.080.000,00 merupakan transaksi normalisasi berdasarkan Berita Acara No. BA.04/A1.1/9/2019
- 6. Penghapusan sebesar Rp198.370.000,00 merupakan penghapusan aset Gedung Laboratorium Permanen pada UAPKPB Biro Umum & Sekretariat sesuai SK Kepala BP Batam Nomor 53 Tahun 2019.
- 7. Koreksi kesalahan input IP sebesar Rp1.555.878.451.000,00 terdiri dari:
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Biro Umum Sebesar Rp1.550.720.576.000,00
 - Terjadi Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam Sebesar Rp2.502.773.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta Sebesar Rp2.655.102.000,00

8. Koreksi transfer keluar atas 224 sebesar Rp4.033.521.000,00 merupakan Koreksi Transfer Keluar Atas 224 Pada UAPKPB Biro Umum
9. Koreksi ekuitas akibat koreksi revaluasi sebesar Rp1.712.957.000,00 merupakan Koreksi Ekuitas Akibat Revaluasi Pada UAPKPB Biro Umum
10. Koreksi reklasifikasi keluar akibat koreksi penilaian sebesar Rp1.565.397.330.000,00 merupakan Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Pada UAPKPB Direktorat Pemanfaatan Aset.
11. Koreksi nilai barang berlebih sebesar Rp82.100.840,00 merupakan Koreksi Nilai Barang Berlebih Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim
12. Hasil Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp629.145.098.152,00 merupakan koreksi terkait aset revaluasi pada tahun 2017 s.d 2018 yang sudah dilakukan hibah ke Pemko Batam.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp8.332.905.283.962,00 dan Rp7.427.274.269.254,00 . (Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 15).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.427.274.269.254,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.210.968.240.906,00, dan mutasi kurang sebesar Rp5.305.337.226.198,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		7.427.274.269.254,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	2.288.128.602,00
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	52.431.650.907,00
-	Pengembangan Melalui KDP	409.089.704.106,00
-	Transfer Masuk	11.642.599.700,00
-	Reklasifikasi Masuk	44.999.523.436,00
-	Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	23.336.098.000,00
-	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	982.357.572.069,00
-	Koreksi Kesalahan Input IP	3.406.660.134.000,00
-	Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	498.663.258.000,00

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	779.499.572.086,00
Total Mutasi Tambah		6.210.968.240.906,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Keluar	33.557.691.939,00
-	Koreksi kesalahan input IP	8.365.431.000,00
-	Koreksi hasil revaluasi atas BMN yg tidak	1.084.196.909.430,00
-	Koreksi ekuitas akibat koreksi revaluasi	5.667.397.299,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	3.236.020.867.635,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	11.559.206.497,00
-	Koreksi Pencatatan	925.969.722.398,00
Total Mutasi Kurang		5.305.337.226.198,00
Saldo Akhir		8.332.905.283.962,00

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp2.288.128.602,00 merupakan perolehan pembelian Aset Tetap
2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp52.431.650.907,00 merupakan transaksi belanja modal reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp409.089.704.106,00 terdiri dari:
 - Pengembangan Langsung Melalui KDP Pada UAPKPB Dir. Pembangunan Berupa Jalan Khusus Komplek Sebesar Rp4.800.000,00
 - Pengembangan Langsung Melalui KDP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Berupa Landasan Pacu (*Runway*) Pesawat Terbang Permukaan Aspal sebesar Rp176.442.825.748,00
 - Pengembangan Langsung Melalui KDP Pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Berupa Jalan KPLI B3 Kabil 683 Sebesar Rp484.943.000,00
 - Pengembangan langsung Pembangunan dengan KDP pada UAPKPB direktorat Pemanfaatan Aset Sesuai dengan Nomor

Bukti 5133.012.056.5/SPJB/PPK-PNBP/3 sebesar
Rp232.157.135.358,00.

4. Transfer masuk sebesar Rp11.642.599.700,00 terdiri dari:

- Alih Status dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sebesar Rp38.639.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BP Batam No 41 Tahun 2019
- Alih Status dari KKP Ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset Sesuai Dengan Nomor Bukti Surat Keputusan Kepala BP Batam No 41 Tahun 2019 sebesar Rp433.463.000,00
- Transfer dari Kementrian PU-PERA Ke UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Sesuai Surat Persetujuan Meteri Keuangan Nomor. S-47/MK.06/WKN/03/2018 sebesar Rp11.170.497.700,00

5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp44.999.523.436,00 terdiri dari:

- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp9.635.861.839,00
- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp4.400.280.700,00
- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Sesuai dengan Berita acara LAUT/2019/12/6982 sebesar Rp725.342.700,00
- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp18.625.281.700,00

- Reklas masuk berupa bangunan penampung sampah lingkungan dengan bukti perolehan laut/2019/12/2019 Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sebesar Rp53.550.000,00
 - Reklas masuk berdasarkan UJK BPK RI Tahun 2019 sesuai bukti 5124.002.054A.01/PPK-RM.5124/9/2016 pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp11.559.206.497,00.
6. Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi sebesar Rp23.336.098.000,00 terdiri dari:
- Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp3.642.012.000,00
 - Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp19.694.086.000,00
7. Koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar Rp982.357.572.069,00 terdiri dari:
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp277.881.892.009,00
 - Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sebesar Rp703.176.733.315,00
 - Koreksi Semu Hasil Inventarisasi Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp1.298.946.745,00
8. Koreksi kesalahan input IP sebesar Rp3.406.660.134.000,00 terdiri dari:
- Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp204.057.352.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Kantor Air dan Limbah Sebesar Rp1.812.164.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Badan Pengusahaan Pelabuhan Batam Sebesar Rp1.578.796.372.000,00

- Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sebesar Rp19.851.805.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Sebesar Rp1.602.142.441.000,00
9. Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi sebesar Rp498.663.258.000,00 merupakan Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim
10. Hasil Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp779.499.572.086,00 merupakan revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2017 sampai dengan 2018 yang kemudian dilakukan pencatatan kembali (*take in*) di tahun 2019 berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI No.S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang terdiri dari:
- Koreksi terkait Aset Revaluasi yang sudah dilakukan Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.667.397.299,00;
 - Koreksi terkait Aset Revaluasi yang sudah dilakukan Reklas ke Aset yang Tidak Digunakan sebesar Rp31.225.000,00;
 - Transaksi Drop nilai Revaluasi Tahun 2017 sebesar Rp773.705.475.102,00;
 - Koreksi terkait Aset Revaluasi yang sudah dilakukan Reklas ke Aset yang Tidak Digunakan sebesar Rp95.474.685,00.

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi keluar sebesar Rp33.557.691.939,00 terdiri dari:
- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp9.635.861.839,00

- Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp4.400.280.700,00
 - Perubahan Nama dan Jumlah Barang Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sesuai Dengan SK Nomor 31/BAST.A/PNBP5124/12/19 Sebesar Rp896.267.700,00
 - Reklas dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai dengan BA nomor : BA.02/A1.1/4/2019 dan sebesar Rp18.625.281.700,00
2. Koreksi kesalahan input IP sebesar Rp8.365.431.000,00 terdiri dari:
- Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB Biro Umum Sebesar Rp614.892.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input IP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sebesar Rp7.470.227.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input Ip Pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sebesar Rp272.580.000,00
 - Koreksi Kesalahan Input Ip Pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta Sebesar Rp7.732.000,00
3. Koreksi hasil revaluasi atas BMN tidak ditemukan sebesar Rp1.084.196.909.430,00 terdiri dari:
- Koreksi hasil Revaluasi Atas BMN yang Tidak Di temukan berdasarkan hasil input LHIP Pada UAPKPB Direktorat Perencanaan Sebesar Rp654.585.023.345,00
 - Koreksi hasil Revaluasi Atas BMN yang Tidak Di temukan berdasarkan hasil input LHIP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim Sebesar Rp390.738.660.318,00

- Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan berdasarkan hasil input LHIP Pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sebesar Rp38.873.225.767,00
- 4. Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi berdasarkan hasil LHIP Pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sebesar Rp5.667.397.299,00
- 5. Hasil Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp3.236.020.867.635,00 merupakan revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2017 sampai dengan 2018 yang kemudian dilakukan pencatatan kembali (*take in*) di tahun 2019 berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI No.S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang terdiri dari:
 - Transaksi nilai Revaluasi TA. 2017 sebesar 3.235.661.668.301,00;
 - Koreksi terkait Aset Revaluasi yang sudah dilakukan Reklas ke Aset Tetap Irigasi sebesar Rp145.306.334,00.
 - Koreksi terkait drop nilai revaluasi Tahun 2017 lanjutan sebesar Rp213.893.000,00.
- 6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp11.559.206.497,00 pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai BAST No.1/BAST.A/RM-5124 berupa Dermaga CPO Kabil.
- 7. Koreksi Pencatatan sebesar Rp925.969.722.398,00 merupakan koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas double pencatatan Landasan Pacu (*Runway*) Pesawat Terbang Permukaan Aspal pada UAPKPB Bubu Hang Nadim

Aset Tetap Lainnya

D.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp14.992.748.009,00 dan Rp14.912.068.009,00. (Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran 16).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp14.912.068.009,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp197.805.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp117.125.000,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		14.912.068.009,00
-	Pembelian	80.680.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	117.125.000,00
Total Mutasi Tambah		197.805.000,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Keluar	117.125.000,00
Total Mutasi Kurang		117.125.000,00
Saldo Akhir		14.992.748.009,00

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp80.680.000,00 merupakan pembelian perolehan aset tetap
2. Reklasifikasi masuk sebesar Rp117.125.000,00 merupakan reklasifikasi pencatatan BMN berupa Aset Tetap Lainnya yang sebelumnya di catat oleh UAPKPB Biro Umum & Sekretariat ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai BA Nomor BA.02/A1.1/4/2019;

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi keluar sebesar Rp117.125.000,00 merupakan reklasifikasi pencatatan BMN berupa Aset Tetap Lainnya yang sebelumnya di catat oleh UAPKPB Biro Umum & Sekretariat ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset sesuai BA Nomor BA.02/A1.1/4/2019.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan

D.2.6. Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp393.987.073.321,00 dan Rp437.978.646.602,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah Dalam Pengerjaan	11.594.671.642,00

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	6.628.967.574,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	375.763.434.105,00
	Jumlah	393.987.073.321,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 17).

Tanah dalam pengerjaan sebesar Rp11.594.671.642,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Dalam hal sertifikat HPL telah diterbitkan, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai aset lainnya.

Gedung dan bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp6.628.967.574,00 dan jalan, irigasi dan jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp375.763.434.105,00 merupakan pekerjaan pengadaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2019.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp437.978.646.602,00, terdapat mutasi tambah sebesar Rp499.103.986.211,00 dan mutasi kurang sebesar Rp543.095.559.492,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		437.978.646.602
Mutasi Tambah		
-	Pembelian (PNBP)	96.722.535.138,00
-	Pembelian (RM)	259.011.254.392,00
-	Perolehan Pembelian (PHLN)	143.370.196.681,00
Total Mutasi Tambah		499.103.986.211,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Keluar	543.095.559.492,00
Total Mutasi Kurang		543.095.559.492,00
Saldo Akhir		393.987.073.321,00

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp499.103.986.211,00 merupakan pembelian aset yang berasal dari sumber dana PNBP sebesar Rp96.722.535.138,00,

sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp259.011.254.392,00 dan sumber dana PHLN sebesar Rp143.370.196.681,00.

2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp543.095.559.492,00 merupakan penyelesaian pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan ke Aset Tetap.

D.2.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus Rp4.281.773.549.373,00 dan Rp5.001.898.744.210,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Peralatan dan Mesin	964.437.508.753,00	850.616.980.842,00
2	Gedung dan Bangunan	730.756.904.137,00	188.568.337.618,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.585.697.166.105,00	3.962.176.977.500,00
4	Aset Tetap Lainnya	547.039.500,00	536.448.250,00
	Total	4.281.438.618.495,00	5.001.898.744.210,00

Dari saldo akumulasi penyusutan sebesar minus Rp4.281.438.618.495,00 terdapat selisih dengan hasil pengujian BPK RI terhadap temuan LKPP tahun 2019 sebesar Rp265.250.920.698,00 dikarenakan tidak terbacanya penambahan masa manfaat dari SIMAN ke SIMAK BMN yang sampai dengan saat ini masih dalam penelusuran oleh tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan akan ditindaklanjuti di 2020.

Aset Lainnya

D.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp330.254.604.581,00 dan Rp338.705.734.873,00 dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	167.065.369.296,00	167.065.369.296,00
	Akumulasi Penyusutan	(110.119.499.818,00)	(101.334.913.488,00)
	Nilai Buku (1)	56.945.869.478,00	65.730.455.808,00
2	Aset Tak Berwujud	199.859.218.473,00	193.842.470.450,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(23.092.157.616,00)	(19.487.045.291,00)

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
	Nilai Buku (2)	176.767.060.857,00	174.355.425.159,00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (3)	3.302.885.193,00	3.302.885.193,00
4	Aset Lain-lain		
	a. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	225.779.150.119,00	228.623.195.917,00
	b. Piutang Tidak Lancar	12.638.246.897,00	11.909.249.871,00
	c. Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	2.961.573.242,00
	d. Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.224,00	153.327.225,00
	e. Piutang TGR	1.506.032.333,00	1.506.032.334,00
	Jumlah	243.038.329.815,00	245.153.378.589,00
	Akumulasi Peyusutan Dan Cadangan Aset Lain-lain		
	a. Akum. Peny. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	(134.046.393.398,00)	(134.812.259.537,00)
	b. Cadangan Piutang Tidak Lancar	(12.638.246.897,00)	(11.909.249.872,00)
	c. Cadangan Panjar Tidak Lancar	(2.961.573.242,00)	(2.961.573.242,00)
	d. Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	(153.327.224,00)	(153.327.225,00)
	Jumlah	(149.799.540.762,00)	(149.836.409.876,00)
	Nilai Buku (4)	93.238.789.053,00	95.316.968.713,00
	Total Nilai Buku (1+2+3+4)	330.254.604.581,00	338.705.734.873,00

Penjelasan aset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kemitraan
Dengan Pihak
Ketiga

D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp167.065.369.296,00, terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	Alat Besar Darat	Unit	2	6.700.000.000,00
2	Alat Bantu	Unit	2	324.051.000,00
3	Alat Bengkel Bermesin	Buah	5	14.057.000,00
4	Alat Rumah Tangga	Buah	30	9.956.000,00
5	Unit Alat Laboratorium	Buah	19	835.350.000,00
6	Alat Eksplorasi Topografi	Buah	1	4.895.000,00
7	Unit Peralatan Proses/Produksi	Buah	110	779.988.000,00
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	9	29.700.901.152,00
9	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Unit	2	14.675.000,00
10	Jembatan	M2	2	4.631.973.144,00
11	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Unit	74	42.741.241.000,00

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
12	Instalasi Gardu Listrik	Unit	13	1.714.221.000,00
13	Jaringan Air Minum	Unit	161	79.345.664.000,00
14	Jaringan Listrik	Unit	1	248.397.000,00
Total			431	167.065.369.296,00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp167.065.369.296,00, berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah (Rp)
1	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	40.121.852.086,00
2	Kantor Air dan Limbah	126.943.517.210,00
Total		167.065.369.296,00

D.3.1.1 Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.121.852.086,00 terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	6.700.000.000,00	1. Kerjasama dengan PT. Synergy Tharada berupa Dermaga dan Gedung Terminal Batam Centre;
2	Gedung dan Bangunan	28.789.878.942,00	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.631.973.144,00	2. Kerjasama dengan PT. Tuah Selimangkarang berupa pengelolaan Tower Crane.
Jumlah		40.121.852.086,00	
	Akumulasi Penyusutan	14.816.496.505,00	
Nilai Buku		25.305.355.581,00	

D.3.1.2 Kantor Air dan Limbah

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp126.943.517.210,00, terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	1.968.297.000,00	Kerjasama dengan PT. Adhya Tirta Batam sesuai dengan Perjanjian Konsesi Nomor: 009/UM.PERJ/IV/1995 tanggal 17 April

2	Gedung dan Bangunan	925.697.210,00	1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang yang akan berakhir pada tanggal 14 November 2020.
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.049.523.000,00	
	Jumlah	126.943.517.210,00	
	Akumulasi Penyusutan	95.303.003.313,00	
	Nilai Buku	31.640.513.897,00	

Aset Tak Berwujud

D.3.2. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp199.859.218.473,00 dan Rp193.842.470.450,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
<i>Software</i>	43.917.826.076,00	39.919.051.077,00
<i>Lisensi</i>	9.293.891.760,00	7.941.948.420,00
Hasil Kajian/Penelitian	13.516.082.884,00	13.516.082.884,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	132.847.925.953,00	132.181.896.269,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	283.491.800,00	283.491.800,00
Jumlah Aset Tak Berwujud	199.859.218.473,00	193.842.470.450,00
<i>Software</i>	(21.101.974.321,00)	(18.032.180.175,00)
<i>Lisensi</i>	(1.990.183.295,00)	(1.454.865.116,00)
Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(23.092.157.616,00)	(19.487.045.291,00)
<i>Software</i>	22.815.851.755,00	21.886.870.902,00
<i>Lisensi</i>	7.303.708.465,00	6.487.083.304,00
Hasil Kajian/Penelitian	13.516.082.884,00	13.516.082.884,00
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	132.847.925.953,00	132.181.896.269,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	283.491.800,00	283.491.800,00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	176.767.060.857,00	174.355.425.159,00

(Rincian *software*, lisensi dan hasil kajian dapat dilihat pada lampiran 18).

D.3.2.1 Software

Saldo *software* per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp43.917.826.076,00 merupakan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	40.496.955.076,00
2	BUBU Hang Nadim	2.708.181.000,00
3	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	49.050.000,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	460.240.000,00
5	Kantor Pengelolaan Lahan	203.400.000,00
	Jumlah	43.917.826.076,00

D.3.2.2 Lisensi

Saldo lisensi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.293.891.760,00 merupakan lisensi atas perangkat lunak (*software*) yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam pada unit Kantor Pusat.

D.3.2.3 Hasil Kajian/Penelitian

Saldo hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp13.516.082.884,00 merupakan hasil pekerjaan dari konsultan perencanaan detail bangunan sipil berupa gedung, jalan, dan jembatan dan sebagainya atau disebut *Detailed Engineering Design (DED)* yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	10.199.622.884,00
2	Kantor Bandara	2.614.810.000,00
3	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	701.650.000,00
	Jumlah	13.516.082.884,00

D.3.2.4 Hak Pengelolaan Lahan

Saldo hak pengelolaan lahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp132.847.925.953,00 merupakan hak pengelolaan lahan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam, yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai hak pengelolaan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka mengurus penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Biaya yang dikeluarkan dalam hal sertifikat HPL belum terbit/selesai, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai tanah dalam pengerjaan-lihat catatan D.2.6.

Perlu kami jelaskan bahwa luasan tanah di Pulau Batam dan hak pengalokasian lahannya adalah sebagai berikut:

1. Luas lahan Pulau Batam menurut Peraturan Presiden Batam Bintan Karimun (BBK) Nomor 87 Tahun 2011 adalah 457.788.953,44 m², dan yang telah ditetapkan oleh BP Batam penetapan lokasinya seluas 260.894.015,27m². Rincian penentuan pola ruang disajikan pada tabel berikut:

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M ²)	
		Perpres BBK 87/2012	Penetapan Lokasi BP Batam
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00	115.725.391,60
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67	17.753.267,00
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13	4.524.378,47
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65	9.289.312,44
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31	1.129.494,41
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41	16.093.227,64
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30	58.953.398,07
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41	22.986.817,20
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65	2.225.882,23
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68	858.883,40
12	Danau	26.270.713,55	11.143.818,56

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M ²)	
		Perpres BBK 87/2012	Penetapan Lokasi BP Batam
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33	210.144,25
14	Sungai	393.158,53	0,00
TOTAL LUAS KESELURUHAN		457.788.953,44	260.894.015,27

2. Berdasarkan penetapan wilayah di Pulau Batam, luas lahan sebesar 261.287.174,01m² terdiri dari 3 penetapan wilayah yaitu Wilayah I meliputi sub wilayah Sekupang dan Tanjung Uncang, Wilayah II meliputi sub wilayah Duriangkang/Tanjung Piayu, Kabil dan Nongsa dan Wilayah III meliputi sub wilayah Batam Centre, Batu Ampar dan Muka Kuning. Rincian peruntukan masing-masing wilayah adalah sebagai berikut.

a. Wilayah I

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah I			
		Sub Wilayah Sekupang		Sub Wilayah Tanjung Uncang	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	17.430.768,72	13.952.212,37	30.339.496,35	26.516.035,95
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	407.073,74	554.450,79	-	-
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan. Sosial Budaya. Riset dan Teknologi (B6.3)	1.873.035,85	807.096,53	3.692.687,58	2.607.161,00
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	1.730.080,44	1.056.475,31	1.917.677,94	986.410,71
7	Kawasan Industri (B4)	6.057.658,67	3.822.430,39	34.507.318,51	25.777.104,35
8	Kawasan Pariwisata (B5)	9.834.978,84	4.409.074,35	5.289.501,70	4.649.870,36
9	Budidaya Lain (B6)	1.007,84	-	641,35	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	8.875.428,99	472.483,16	1.456.349,49	220.527,20
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	644.708,56	179,91	1.083.367,17	2.079,89
12	Danau	293.286,55	2.604.411,59	-	-

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah I			
		Sub Wilayah Sekupang		Sub Wilayah Tanjung Ugang	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam. dan Cagar Budaya (L3)	-	-	-	-
14	Sungai	-	-	224.277,61	-
TOTAL LUAS KESELURUHAN		47.148.028,20	27.678.814,42	78.511.317,70	60.759.189,47

b. Wilayah II

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Duriangkang / Tanjung Piayu		Sub Wilayah Kabil		Sub Wilayah Nongsa	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	9.905.185,99	6.812.801,14	12.307.836,30	11.333.519,8	6.881.959,85	5.707.443,41
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	17.490.475,67	17.753.267,00	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	-	-	6.227.933,27	3.139.794,89	27.783,94	31.584,15
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan. Sosial Budaya. Riset dan Teknologi (B6.3)	2.572.772,44	1.827.823,23	2.265.022,20	543.299,32	1.292.888,06	883.901,41
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	-	-	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	661.104,32	355.891,15	1.182.609,08	644.083,88	756.670,93	531.467,39
7	Kawasan Industri (B4)	224.789,42	255.137,30	19.707.823,99	17.994.543,90	-	-
8	Kawasan Pariwisata (B5)	1.468.338,73	1.232.842,27	467.484,62	889.298,32	11.274.404,90	11.224.433,48
9	Budidaya Lain (B6)	3.192,66	-	507,44	-	14,10	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	38.300.252,95	92.091,22	824.232,26	100.026,54	6.940.790,19	615.801,67

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Duriangkang / Tanjung Piai		Sub Wilayah Kabil		Sub Wilayah Nongsa	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	13.044.633,85		164.431,98		1.381.702,62	856.623,60
12	Danau	21.061.732,03		135.912,08		557.687,39	1.831.376,75
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam. dan Cagar Budaya (L3)	-		-		-	
14	Sungai	-		-		168.880,91	
Total Luas Keseluruhan		87.242.002,39	10.576.586,33	60.774.268,89	52.397.833,60	29.282.782,89	21.682.631,9

c. Wilayah III

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Batam Centre		Sub Wilayah Batu Ampar		Sub Wilayah Mukakuning	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
1	Kawasan Permukiman (B1)	17.728.159,56	15.169.067,32	24.648.615,18	20.427.908,10	17.163.850,05	15.806.403,51
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	-	-	-	-	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	-	-	3.196.346,97	798.548,64	848,21	-
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan. Kesehatan, Sosial Budaya. Riset dan Teknologi (B6.3)	1.149.771,42	966.170,13	2.359.736,05	755.188,53	1.529.502,06	898.672,29
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	-	-	68.814,31	1.129.494,41	-	-
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	7.166.934,19	2.620.520,54	11.496.630,06	8.235.461,40	2.684.322,45	1.662.917,226
7	Kawasan Industri (B4)	2.942.877,73	2.534.528,93	6.954.612,34	5.191.561,29	4.831.793,64	3.378.091,91
8	Kawasan Pariwisata (B5)	25.462,00	-	34.182,00	-	1.049.669,62	581.298,42
9	Budidaya Lain (B6)	148,00	-	211,43	-	-	-

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Wilayah II					
		Sub Wilayah Batam Centre		Sub Wilayah Batu Ampar		Sub Wilayah Mukakuning	
		Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)	Luas Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Penetapan Lokasi (m ²)
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	-		767.860,67	1.397,54	18.372.614,10	723.554,90
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	31.908,44		208.899,81		15.579.100,25	
12	Danau	-		173.694,16		4.048.401,33	6.708.030,22
13	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam. dan Cagar Budaya (L3)	-		-		10.615.587,33	210.144,25
14	Sungai	-		-		-	
TOTAL LUAS KESELURUHAN		29.045.261,35	21.290.286,93	49.909.602,98	36.539.559,94	75.875.689,04	29.969.112,76

3. Berdasarkan penetapan lokasi BP Batam atas lahan di Pulau Batam seluas 261.287.174,01 m² dan 144.955.740,74 m² (berupa kawasan hutan lindung peruntukan L1, L2, L3). Sehingga, luas lahan di Pulau Batam yang belum teralokasi adalah 24.052.060,75 m².

Untuk hak pengelolaan lahan yang pengadaannya dibawah tahun 2014 (1987 s.d 2013) seluas 184.799.294,00 m² sebanyak 196 HPL yang berasal dari pengadaan barang dan jasa.

(Daftar sertifikat hak pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Batam yang telah diterbitkan dapat dilihat pada Lampiran 19).

D.3.2.5 Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo aset tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp283.491.800,00.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

D.3.3 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Aset tak berwujud dalam pengerjaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.302.885.193,00. Aset tak berwujud dalam

pengerjaan dimaksud terdiri dari pekerjaan penyiapan kavling siap bangun pekerja sesuai kontrak No. 5133.002.012.03/D.01.17.18/PPK/PNBP/10/2015 dengan PT Putra Nusa Perkasa pada tahun 2015 sebesar Rp3.302.885.193,00 dan pekerjaan pengadaan SIMRS versi web sesuai kontrak No. SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 dengan PT Sarana Primadata sebesar Rp534.660.000,00.

Aset Lain-lain **D.3.4 Aset Lain-lain**

Aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp243.038.329.815,00 dan Rp245.153.378.589,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	225.779.150.119,00	228.623.195.917,00
2	Piutang Tidak Lancar	12.638.246.897,00	11.909.249.871,00
3	Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	2.961.573.242,00
4	Piutang pegawai tidak lancar	153.327.224,00	153.327.225,00
5	Piutang TGR	1.506.032.333,00	1.506.032.334,00
	Total	243.038.329.815,00	245.153.378.589,00

Penjelasan aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

D.3.4.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

Aset tetap yang tidak dapat digunakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp225.779.150.119,00 dan Rp228.623.195.917,00 merupakan aset tetap yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. (Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dapat dilihat pada lampiran 20).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp228.623.195.917,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp13.419.124.331,00 dan mutasi kurang sebesar Rp16.263.170.129,00. Penjelasan mutasi aset tetap tidak dapat digunakan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	228.623.195.917,00

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Mutasi Tambah		
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	10.216.151.331,00
-	Transaksi Normalisasi BMN (BMN yg dihentikan)	2.989.080.000,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	213.893.000,00
Total Mutasi Tambah		13.419.124.331,00
Mutasi Kurang		
-	Penghapusan BMN yg dihentikan	11.465.284.031,00
-	Reklasifikasi Keluar	2.860.788.630,00
-	Penggunaan kembali BMN yg dihentikan	1.058.886.756,00
-	Perubahan Kondisi dan penggunaan Kembali	4.150.000,00
-	Hasil Revaluasi Aset Tetap	874.060.712,00
Total Mutasi Kurang		16.263.170.129,00
Saldo Akhir		225.779.150.119,00

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset yang dihentikan sebesar Rp10.216.151.331,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Akun Perlatan dan Mesin ke Akun Aset yang tidak digunakan Pada UAPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan BA nomor: 3/A5.4/AP.01.02/6/2019 sebesar Rp2.712.404.160,00
- Penghentian Aset (Aset yang tidak digunakan) sebesar Rp154.738.672,00 Pada UPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai dengan BA Temuan BPK TA 2018;
- Reklas Dari Aset Tetap Ke aset Lainnya berdasarkan BA.01/A4.2/8/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Di UAPKPB Direktorat Pemanfaatan Aset Sebesar Rp735.505.000,00
- Reklas Dari Aset Tetap Ke aset Lainnya berdasarkan Nomor Bukti 872/KEPMEN-KP/SJ/PLT Di UAPKPB Direktorat Pemanfaatan Aset Sebesar Rp849.710.000,00
- Penghentian Aset Dari Penggunaan Berdasarkan Mutasi No. 431/A3.3/8/2019 sebesar Rp1.788.244.300,00

- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sesuai Berita Acara Nomor : 17/A4.3/9/2019 Tentang Barang milik negara rusak berat berupa Pagar DTA Sei Ladi sebesar Rp61.343.000,00
 - Reklasifikasi berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA/01/A3.2/7/2019 dan Berita Acara No. BA/02/A3.22/8/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam sebesar Rp1.680.431.542,00
 - Reklasifikasi berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA/03/A3.22/8/2019 dan Berita Acara No. BA/04/A3.22/8/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam sebesar Rp802.174.678,00
 - Reklasifikasi berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA/05/A3.22/10/2019 dan Berita Acara No. BA/06/A3.22/10/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Badan Pengelolaan Pelabuhan Batam sebesar Rp1.046.719.313,00
 - Reklasifikasi berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai berita acara No. BA 06/A1.1/11/2019 Tentang Perubahan Pencatatan Kondisi Barang Pada UPKPB Biro Umum sebesar Rp384.880.666,00
2. Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar Rp2.989.080.000,00 merupakan Transaksi Normalisasi BMN Berdasarkan Berita Acara NO. BA.04/A1.1/9/2019, pada UAPKPB Biro Umum

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp11.465.284.031,00 terdiri dari:

- Penghapusan BMN pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 152 Tahun 2019, 1253 Tahun 2019, 149 Tahun 2019, 53 Tahun 2019, 83 Tahun 2019, 82 Tahun 2019 sebesar Rp6.505.730.929,00
 - Penghapusan BMN pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Batam sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 2 Tahun 2019 sebesar Rp3.119.976.912,00
 - Penghapusan BMN pada UAPKPB Direktorat Pengamanan sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 149 Tahun 2019 sebesar Rp160.696.090,00
 - Penghapusan BMN pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 149 Tahun 2019 sebesar Rp4.670.000,00
 - Penghapusan BMN pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 149 Tahun 2019 sebesar Rp1.674.210.100,00
2. Reklasifikasi keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp2.860.788.630,00 terdiri dari:
- Reklas keluar (Barang Rusak Berat) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor BA.02/A1.1/4/2019 sebesar Rp1.072.544.330,00
 - Penghapusan BMN pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara Nomor: 11/A3.3/11/2019 sebesar Rp1.788.244.300,00
3. Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan sebesar Rp1.058.886.756,00 terdiri dari:
- Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan pada UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan BA07/A1.1/11/2019 sebesar Rp49.552.998,00

- Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Sesuai dengan BA/6/A3.22/19 Sebesar Rp70.939.758,00
 - Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan pada UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Sesuai dengan BA1/A4.3/12/2019 Sebesar Rp938.394.000,00
4. Perubahan Kembali dan Penggunaan Kembali sebesar Rp4.150.000,00 berdasarkan Berita Acara No: BA/06/A3.22/10/2019 Tentang Perubahan Kondisi dan Penggunaan Kembali Barang Yang dihentikan

Dalam tindak lanjut temuan BPK RI atas LKPP tahun 2019 masih terdapat BMN tidak ditemukan sebesar Rp1.285.780.419.040,00 yang masih tercatat sebagai aset tetap. Telah dilakukan koreksi perbaikan di tahun 2019 sebesar Rp925.969.722.398,00 dan sisanya sebesar Rp359.810.696.642,00 masih dalam proses penelusuran dan akan ditindaklanjuti di tahun 2020. Terdapat BMN Berlebih yang Tidak Ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Kembali sebesar Rp473.885.000,00 yang belum dilakukan penginputan ke dalam SIMAK BMN karena pembatalan tiket pada SIMAN akibat double pencatatan dan akan ditindaklanjuti di tahun 2020.

Piutang Tidak Lancar

D.3.4.2. Piutang Tidak lancar

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.638.246.897,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari dua tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau macet. Piutang tidak lancar tersebut adalah piutang yang telah diusulkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti penagihannya maupun penghapusannya. Adapun piutang tidak lancar terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	6.637.858.601,00
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	32.030.810,00
3	BUBU Hang Nadim	1.182.742.434,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	3.326.337.773,00

No	Unit	Jumlah (Rp)
5	RSBP	1.459.277.278,00
6	Jumlah	12.638.246.897,00
7	Cadangan piutang tidak lancar	(12.638.246.897,00)
8	Nilai Buku	0,00

Rincian piutang tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.638.246.897,00 terdiri dari:

D.3.4.2.a Kantor Pusat

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Biro Keuangan	5.225.817.012,00
2	Direktorat Pemanfaatan Aset	485.281.000,00
3	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	926.760.590,00
	Total	6.637.858.602,00

Kronologis piutang royalti pasir dan daftar piutang tidak lancar dapat dilihat pada Lampiran 21).

D.3.4.2.b Kantor Air dan Limbah

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengelolaan Limbah Cair	9.356.000,00
2	Sewa Gudang TDLI – B3	22.217.500,00
3	Denda Sewa Gudang TDLI.B3	213.150,00
4	Denda Jasa Pengolahan Limbah Cair Domestik	244.160,00
	Total	32.030.810,00

(Rincian masing-masing debitur dapat dilihat pada lampiran 22).

D.3.4.2.c BUBU Hang Nadim

NO	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Prodexim BUMD (USD 16.844,88. Kurs 13.901.01)	234.160.845,00
2	PT. Mandala Airline	138.824.300,00
3	PT. Gading Aerindo Satia	57.527.800,00
4	Batavia Air	429.134.200,00
5	Thomas Cook Airlines Ltd	83.556.000,00

NO	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
6	PT. Kartika Air	178.453.260,00
7	Paparons Pizza	11.078.900,00
8	Good Way Hotel	50.007.129,00
	Total	1.182.742.434,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 23).

D.3.4.2.d Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.326.337.773,00 Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 24).

D.3.4.2.e Rumah Sakit BP Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.459.277.278,00 terdiri dari Piutang Tidak Tertagih Perorangan SP3N 114-264/PUPNC.31.00/2017 tanggal 15 Desember 2018 dan SP3N 02-314/PIPNC.31.00/2019 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp289.185.446,00 dan Rp585.333.511,00 serta Piutang Tidak Tertagih Perorangan SP3N KPKNL No.83-382/PUPNC.31.00/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp584.758.321,00. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 25).

Panjar Tidak Lancar

D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar

Panjar tidak lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.961.573.242,00 merupakan panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Upaya penagihan telah dilakukan kepada para pengambil panjar yang belum dipertanggungjawabkan akan panjar tersebut di atas, tetapi kondisi penerima panjar saat ini banyak yang telah pensiun, pindah instansi, alamat tidak jelas sampai dengan telah meninggal dunia. Upaya terus dilakukan guna menyelesaikan panjar tersebut dengan telah dibuatnya Tim Penyelesaian Panjar Tidak Lancar tersebut dengan kemajuan sampai dengan sekarang.

Mengingat panjar tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sebelumnya serta menjadi beban tahun yang bersangkutan, agar tidak membebani tahun anggaran berikutnya maka terhadap saldo panjar tersebut dibentuk penyisihannya. Atas nilai sisa panjar sebesar Rp2.961.573.242,00 yang telah didukung dengan surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Inspektorat (Satuan Pemeriksa Internal sekarang) serta mengetahui Anggota 1/Deputi Administrasi dan Umum.

Rincian panjar tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.961.573.242,00 berdasarkan tahun pengambilan panjar terdiri dari:

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	01 Jan 2019 (Audited)			31 Desember 2019 (Audited)
1993	5.370.000,00	-	-	5.370.000,00
1994	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
1995	98.481.500,00	-	-	98.481.500,00
1996	5.575.000,00	-	-	5.575.000,00
1997	12.228.175,00	-	-	12.228.175,00
1998	30.595.000,00	-	-	30.595.000,00
1999	34.600.000,00	-	-	34.600.000,00
2000	28.048.000,00	-	-	28.048.000,00
2001	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2002	348.984.000,00	-	-	348.984.000,00
2003	450.905.830,00	-	-	450.905.830,00
2004	543.674.500,00	-	-	543.674.500,00
2005	134.984.148,00	-	-	134.984.148,00
2006	259.176.289,00	-	-	259.176.289,00
2007	224.500.000,00	-	-	224.500.000,00
2008	230.597.350,00	-	-	230.597.350,00
2009	346.834.950,00	-	-	346.834.950,00
2010	57.263.500,00	-	-	57.263.500,00
2011	140.705.000,00	-	-	140.705.000,00
	2.961.573.242,00	-	-	2.961.573.242,00

(Rincian dilihat pada Lampiran 26).

Piutang
Pegawai Tidak
Lancar

D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar

Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp153.327.224,00 merupakan kelebihan biaya pengobatan pegawai yang

ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam namun belum dibayar ke Badan Pengusahaan Batam/Biro Sumber Daya Manusia. Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2019 terdiri dari piutang pegawai tidak lancar Kantor Pusat sebesar Rp153.327.224,00. (Rincian dilihat pada Lampiran 27).

Piutang TGR

D.3.4.5. Piutang TGR

Piutang TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.506.032.333,00 merupakan piutang pada karyawan Kuningan *Guest House* berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat (sekarang Satuan Pemeriksa Internal) Tahun 2012. Piutang dimaksud telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (KPKNL) Batam sesuai surat Nomor SP3N.02/PUPNC.04/2015 tanggal 11 Maret 2015.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya
(Cadangan Aset
Lain-lain)

D.3.5.Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp283.011.198.196,00 dan Rp270.658.368.655,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	110.119.499.818,00	101.334.913.488,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	134.046.393.398,00	134.812.259.537,00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	12.638.246.897,00	11.909.249.872,00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	2.961.573.242,00
Cadangan Piutang Pegawai	153.327.225,00	153.327.225,00
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	21.101.974.321,00	18.032.180.175,00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.990.183.295,00	1.454.865.116,00
Total	283.011.198.196,00	270.658.368.655,00

Kewajiban

D.4 Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.351.476.816.333,00 dan Rp1.794.157.667.198,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	107.908.038.238,00	123.023.117.279,00
2	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka	2.243.559.020.186,00	1.671.126.470.419,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.757.909,00	8.079.500,00
	Jumlah	2.351.476.816.333,00	1.794.157.667.198,00

Utang Kepada
Pihak Ketiga
BLU

D.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp107.908.038.238,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	6.105.624.114,00
2	Utang Usaha	5.809.348.373,00
3	Titipan Pihak Ketiga	57.659.039.003,00
4	Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	38.334.026.748,00
	Jumlah	107.908.038.238,00

Penjelasan utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp107.908.038.238,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang
Yang Masih
Harus Dibayar

D.4.1.1 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.105.624.114,00 merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui. sampai tanggal laporan posisi keuangan tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo.

Biaya barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.105.624.114,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya listrik	3.850.708.438,00
2	Biaya Telepon	72.690.041,00
3	Biaya air	549.639.180,00
4	Biaya Surat Kabar	187.000,00
5	Biaya jasa lainnya	17.179.000,00
6	Biaya Pemeliharaan	805.000,00
7	Biaya Perjalanan Dalam Negeri	33.976.859,00
8	Biaya Jasa Medik	1.580.438.596,00
	Jumlah	6.105.624.114,00

Utang Usaha

D.4.1.2 Utang Usaha

Utang usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.809.348.373,00 merupakan utang usaha atas kegiatan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1.	Kantor Pusat	248.509.683,00
2.	BUBU Hang Nadim	299.739.326,00
3.	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	5.261.099.364,00
	Jumlah	5.809.348.373,00

Utang usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.809.348.373,00 dapat dijelaskan per unit sebagai berikut:

D.4.1.2.a Kantor Pusat

Utang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp248.509.683,00 terdiri dari:

1. Utang atas honorarium panitia penerima hasil pekerjaan proyek penyusunan DES jalan dari Tembesi ke Kawasan Industri Dapur 12

(nota dinas Biro Perencanaan Teknik No.06/A2.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018) sebesar Rp1.860.000,00.

2. Utang atas biaya sewa *billboard* kegiatan BP Batam Barelang Marathon 2018 sebesar Rp38.500.000,00, biaya honorarium paket pekerjaan publikasi BP Batam di Kompas TV tahun 2018 sebesar Rp4.368.000,00.
3. Utang atas Penambahan Biaya perpanjangan *support* tahunan aplikasi BP Batam *e-portal* dan mobile *e-admin* sesuai hasil reuiu SPI berdasarkan Nota Dinas No.603/SPI/PI.00.05/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp76.425.000,00 atas nama PT.IP Network Solusindo.
4. Utang atas Penambahan biaya atas kontrak service UPS *eaton data centre* BP Batam sebesar Rp32.116.667,00, biaya atas pembayaran perpanjangan DRC bulan Desember sebesar Rp16.058.333,00 atas nama PT.Deltasindo Raya Sejahtera.
5. Utang atas kegiatan operasional Biro Umum sebesar Rp7.769.244.289,00 sesuai nota dinas No. 22/A1.1/RT.04/1/2019 tanggal 9 Januari 2019; Nota Dinas No 1/A3.13/BU.00.05/1/2019. Nota Dinas No.421/SPI/PI.00.05/06/2019 tanggal 18 Juni 2019; Nota Dinas No.559/SPI/PI.00.05/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan telah dilakukan pelunasan di Tahun 2019 sebesar Rp7.657.945.939,00 sehingga sisa utang per 31 Desember 2019 sebesar Rp111.298.350,00.

D.4.1.2.b BUBU Hang Nadim

Utang Usaha BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2019 sebesar Rp299.739.326,00 merupakan Utang usaha kepada CV Minang Batuah berupa utang perbaikan atap gedung terminal bandara sesuai nomor kontrak 22/PPK.PNBP-BU/9/2015 dan adendum SP-22.1/PPK.PNBP-BU/11/2015 dan SP-22.2/PPK.PNBP-BU/11/2015. Dari nilai kontrak sebesar Rp522,750,000.00, telah dibayarkan uang muka 30% sebesar Rp156,825,000.00. Nilai sisa pembayaran belum dibayarkan karena pihak

kontraktor tidak menyetujui besaran yang akan dibayar sesuai perhitungan BAP dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencakup kelebihan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% sebesar Rp43.184.674,53 dan denda keterlambatan sebesar Rp23.001.000,00. Jumlah utang tersebut telah dikoreksi kurang berdasarkan usulan BPK RI Tahun 2016 sebesar Rp34.185.674,00 (sesuai temuan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam buku Kepatuhan Tahun 2015) sehingga jumlah utang usaha kepada CV Minang Batuah adalah sebesar Rp299.739.326,00.

Saat ini status utang tersebut sudah memasuki ranah hukum dan masih dalam proses pengadilan menunggu ketetapan hukumnya, dikarenakan CV Minang Batuah akan naik banding atas keputusan pengadilan yang memenangkan pihak BUBU HN.

D.4.1.2.c. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP)

Utang usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.261.099.364,00 merupakan utang atas pengadaan obat dan alat kesehatan kepada pihak ketiga yang belum dilunasi. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 28\).](#)

Titipan Pihak Ketiga

D.4.1.3 Titipan Pihak Ketiga

Titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.659.039.003,00 merupakan uang jaminan pelanggan pada Badan Pengusahaan Batam atas penggunaan jasa yang diberikan dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyetoran belum diperoleh. Rincian titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	796.952.047,00

No	Unit	Jumlah (Rp)
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	134.253.740,00
3	BUBU Hang Nadim	2.468.308.227,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	5.411.816.013,00
5	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	695.015.066,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	32.231.653,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	48.120.462.257,00
	Jumlah	57.659.039.003,00

Rincian titipan pihak ketiga per 31 Desember 2019 menurut jenis titipannya pada masing-masing unit di BP Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1.3.a. Kantor Pusat

Titipan pihak ketiga pada Kantor Pusat Per 31 Desember 2019 sebesar Rp796.952.047,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan Dana rusun Batu Ampar	146.117.500,00
2	Titipan Dana rusun Sekupang	68.986.000,00
3	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	258.025.175,00
4	Titipan Dana Rusun Kabil	117.970.000,00
	Jumlah Titipan Dana Rusun (1 s.d 4)	591.098.675,00
6	Penerimaan sementara	205.853.372,00
	Jumlah (1 s.d 5)	796.952.047,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 29).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp796.952.047,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Titipan dana rusun sebesar Rp591.098.675,00 adalah perkiraan yang menampung uang Deposit para penyewa rusun di Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning dan Kabil; dan
2. Penerimaan sementara per 31 Desember 2019 sebesar Rp205.853.372,00 terdiri dari penerimaan sementara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

D.4.1.3.b. Kantor Air dan Limbah

Titipan pihak ketiga pada Kantor Air dan Limbah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp134.253.740,00 merupakan deposit pada Kantor Air dan Limbah adalah pencatatan atas uang jaminan pelanggan Kantor Air dan Limbah yaitu pelanggan KPLI B3 dan apabila perjanjian berakhir dan pelanggan mengundurkan diri maka pelanggan dapat meminta kembali uang jaminan tersebut. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 30\).](#)

D.4.1.3.c. Kantor BUBU Hang Nadim

Titipan pihak ketiga pada BUBU Hang Nadim Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.468.308.227,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan pembayaran pihak ketiga lainnya	2.044.138.107,00
2	Penerimaan Sementara	424.170.120,00
	Jumlah	2.468.308.227,00

[\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 31\).](#)

Titipan pihak ketiga pada BUBU Hang Nadim Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.468.308.227,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Titipan pembayaran pihak ketiga lainnya sebesar **Rp2.044.138.107,00** adalah titipan jaminan jasa layanan kebandarudaraan sesuai kontrak.
2. Penerimaan sementara sebesar **Rp424.170.120,00** dari penerimaan yang tidak diketahui debiturnya sebesar Rp165.317.022,00, penerimaan yang telah diketahui debiturnya tetapi tidak diketahui peruntukan pembayarannya sebesar Rp197.085.061,00, kelebihan pembayaran dengan nominal diatas Rp1.000.00 sebesar Rp61.768.037,00.

D.4.1.3.d. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Titipan pihak ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.411.816.013,00 merupakan penerimaan sementara atas perkiraan transaksi penerimaan bank yang belum diketahui peruntukan dan kelebihan setor pembayaran faktur. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 32\).](#)

D.4.1.3.e. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP)

Titipan pihak ketiga pada Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp695.015.066,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit/simpanan Pelanggan RSBP	150.150.000,00
2	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	453.867.588,00
3	Penerimaan Sementara	90.997.478,00
	Jumlah	695.015.066,00

[\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 33\).](#)

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp695.015.066,00 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deposit/simpanan pelanggan sebesar Rp150.150.000,00 merupakan jaminan pasien dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang;
2. Titipan dana pihak ketiga lainnya sebesar Rp453.867.588,00 terdiri dari jaminan terhadap pelayanan kesehatan sebesar Rp450.591.361,00 dan pendapatan bunga bersih bulan atas rekening yang menampung setoran titipan tersebut sebesar Rp3.276.227,00 dan
3. Penerimaan sementara sebesar Rp90.997.478,00 merupakan kelebihan pembayaran atas faktur tagihan.

D.4.1.3.f. Kantor Perwakilan Jakarta

Titipan pihak ketiga pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.231.653,00 terdiri dari *service charge* KGH pegawai yang belum dibayarkan/disetorkan kepada pegawai. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 34).

D.4.1.3.g. Kantor Pengelolaan Lahan

Titipan pihak ketiga pada Kantor Pengelolaan Lahan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.120.462.257,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	235.624.186,00
2	Titipan Penerimaan pihak ketiga Lainnya	7.861.623.787,00
3	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	19.886.019.117,00
4	Titipan Uang Muka UWTO	18.746.393.250,00
5	Titipan Jaminan lainnya	1.390.801.917,00
	Jumlah	48.120.462.257,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 35).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.120.462.257,00 pada Kantor Pengelolaan Lahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan sementara per 31 Desember 2019 sebesar Rp235.624.186,00 merupakan akun yang menampung transaksi penerimaan yang belum dapat dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeterannya belum diperoleh serta pendapatan jasa giro bank yang belum dipindahkan ke rekening penerimaan. Penerimaan Sementara sebesar Rp235.624.186,00 terdiri dari Penerimaan Sementara yang terdapat pada rekening Bank BNI sebesar Rp930.907,00, Bank Mandiri 109-0091001362 sebesar Rp300.000,00 dan Bank BRI 211701000057307 sebesar Rp234.393.278,00.
2. Titipan penerimaan pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.861.623.787,00 per 31 Desember 2019 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan atas faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp533.018.000,00 (sesuai nota dinas Direktur Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015);
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO PT Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (nomor faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT Pertamina mengalami perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum direalisasikan; dan
3. Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyetor.
 4. Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.886.019.117,00 merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan. Setiap penerima alokasi Lahan diwajibkan mengurus dokumen administrasi ke BP Batam dan Pemerintah Kota dan segera memulai kegiatan pembangunan fisik secara kontinyu dengan tidak menelantarkan lahan yang telah dialokasikan dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkan izin prinsip pengalokasian lahan. Jika dalam waktu yang tercantum telah terlampaui, ternyata penerima alokasi lahan belum melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, maka JPP tersebut akan menjadi milik BP Batam dan pengalokasian lahannya dapat dibatalkan (berdasarkan surat keputusan Kepala BP Batam Nomor 74 Tahun 2014). Mulai Tahun 2017 tidak terdapat lagi penyetoran JPP ke

dalam rekening dana kelolaan (titipan) BP Batam, berdasarkan Perka 10 Tahun 2017 mekanisme JPP dilakukan dengan cara memberikan garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan. Garansi bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp494.935.750,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan dari PT Chye Joo Sukses Indonesia dengan nomor garansi bank MBG666110538417N pada Bank Mandiri.

Dari jumlah nilai JPP per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.886.019.117,00, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	JPP belum dapat diproses/pending	10.075.914.722,00
2.	JPP dapat dikembalikan	175.378.745,00
3.	Proses Identifikasi Dokumen	9.635.347.626,00
4.	Koreksi Faktur	(621.976,00)
Total JPP		19.886.019.117,00

5. Titipan uang muka UWTO per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.746.393.250,00 adalah perkiraan yang menampung uang muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO.
6. Titipan jaminan lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.390.801.917,00 merupakan jaminan yang harus diberikan oleh pihak investor sebagai pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang telah dialokasikan. jika pembangunan dilaksanakan sesuai perjanjian maka jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Badan Pengusahaan Batam. Sebaliknya jika pemohon tidak melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan dan waktu yang telah ditentukan maka Badan perusahaan Batam memberikan surat peringatan hingga mencabut alokasi lahan yang telah diterbitkan dan jaminan tersebut akan diakui sebagai pendapatan Badan Pengusahaan Batam.

Dana Pihak
Ketiga

D.4.1.4 Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU

Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp38.334.026.749,00 dan Rp44.887.560.678,00 merupakan selisih pencatatan kas dan bank BLU (rekonsiliasi) dengan saldo rekening Koran yang teridentifikasi sebagai outstanding check/cek yang masih beredar. Rincian dana pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	36.769.112.793,00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1.564.913.956,00
	Jumlah	38.334.026.749,00

Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU **Kantor Pusat** per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.769.112.793,00 merupakan hasil rekonsiliasi kas dan bank BLU sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat giro check yang beredar (outstanding check) dan belum dicairkan oleh supplier (pihak ketiga) pada rekening Bank Mandiri 109.000091001370.

Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.564.913.956,00 merupakan hasil rekonsiliasi kas dan bank BLU sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat giro check yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh supplier (pihak ketiga) pada rekening Bank Mandiri 109.0017474677.

Pendapatan
Diterima
Dimuka

D.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.243.559.020.186,00 dan Rp1.671.126.470.419,00 pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Kantor Pengelolaan Lahan. [\(Rincian dapat dilihat pada lampiran 36\).](#)

Mutasi penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Unit	Saldo Awal Per 1 Januari 2018 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2019 (Audited)
		Tambah	Kurang	
Kantor Pengelolaan Lahan	1.671.126.470.419,00	648.141.601.443,00	76.091.946.692,00	2.243.176.125.170,00
Kantor Pusat	0,00	3.335.348,00	0,00	3.335.348,00
BUBU Hang Nadim	0,00	35.758.109,00	0,00	35.758.109,00
Rumah Sakit BP Batam	0,00	204.239.333,00	0,00	204.239.333,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	0,00	139.562.226,00	0,00	139.562.226,00
Jumlah	1.671.126.470.419,00	648.524.496.459,00	76.091.946.692,00	2.243.559.020.186,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

1. Penambahan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp648.141.601.443,00 terdiri dari pendapatan UWT tahun berjalan sebesar Rp648.135.357.304,00, Koreksi Penyesuaian Pendapatan Yang ditangguhkan sebesar Rp6.110.309,00 dan Koreksi Faktur C.0362031902 atas nama PT. Sunboss Holiday Hotel sebesar Rp133.830,00. Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 terhadap pendapatan sewa kantin Gedung Bida sebesar Rp3.335.348,00, pendapatan sewa Bubu Hang Nadim sebesar Rp35.758.109,00, pendapatan sewa ruangan pada Rumah Sakit BP Batam sebesar Rp204.239.333,00 dan pendapatan sewa ruangan pada Badan Pengelolaa Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp139.562.226,00.
2. Pengurangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp76.091.946.692,00 terdiri dari pendapatan UWT tahun berjalan sebesar Rp67.692.490.769,00 dan koreksi Pendapatan Yang ditangguhkan tahun berjalan sebesar Rp8.399.455.923,00.

Utang Jangka
Pendek Lainnya

D.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.757.909,00 dan Rp8.079.500,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	PP1 KGH	9.757.909,00	8.079.500,00
Jumlah		9.757.909,00	8.079.500,00

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.757.909,00 merupakan utang pajak daerah (PB1) atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta yang belum disetorkan.

Ekuitas

D.5 Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.334.238.244.292,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp26.799.855.089.922,00 sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.628.094.816.308,00. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp25.796.996.293.865,00 yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp294.875.300,00 dikurang Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp978.622.232.168,00, ditambah selisih revaluasi aset sebesar Rp27.454.507.260.455,00 dikurang Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp683.773.502.617,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp4.589.892.895,00, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp365.481.676.813,00. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp24.534.383.154.370,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp51.334.238.244.292,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan negara bukan pajak lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp915.825.218.343,00 dan Rp855.454.162.568,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional yang diperoleh dari penerimaan atas jasa pada unit-unit usaha Badan Pengusahaan Batam.

Pendapatan negara bukan pajak lainnya terdiri dari pendapatan usaha dari jasa layanan sebesar Rp765.686.076.690,00, pendapatan usaha lainnya sebesar Rp149.816.026.516,00, keuntungan lainnya sebesar Rp871.278,00, dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp322.243.859,00.

Rincian pendapatan negara bukan pajak lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
A. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan			
1	Pendapatan Kantor Pusat	26.718.162.380,00	22.964.569.752,00
2	Pendapatan Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	19.160.759.350,00	20.866.531.703,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	207.781.123.930,00	234.251.477.140,00
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	328.202.368.657,00	300.182.212.945,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	959.091.190,00	988.414.000,00
6	Kantor Pengelolaan Lahan	86.990.444.423,00	55.814.725.006,00
7	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	95.874.126.760,00	89.580.711.848,00
	Jumlah A = (1+2+3+4+5+6+7)	765.686.076.690,00	724.648.642.394,00
B. Pendapatan Usaha Lainnya			
1	Pendapatan Kantor Pusat	50.170.018.268,00	33.436.059.695,00
2	Pendapatan Usaha Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	9.040.080.252,00	7.713.464.886,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	3.208.101.541,00	6.134.996.255,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	82.673.823.438,00	79.411.776.548,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	9.277.673,00	14.055.456,00
6	Kantor Pengelolaan Lahan	3.345.228.799,00	3.411.978.148,00
7	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	1.369.496.545,00	678.236.211,00
	Jumlah (B)	149.816.026.516,00	130.800.567.199,00
C. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya			
1	BUBU Hang Nadim	871.278,00	7.975,00
	Jumlah (C)	871.278,00	7.975,00
D. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
1	Pendapatan Kantor Pusat	150.482.236,00	4.945.000,00
2	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	171.761.623,00	0,00
	Jumlah (D)	322.243.859,00	4.945.000,00
	Jumlah (A+B+C+D)	915.825.218.343,00	855.454.162.568,00

Pendapatan
Usaha dari Jasa
Layanan

E.1.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan 31 Desember 2019 sebesar Rp765.686.076.690,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	26.718.162.380,00
2	Kantor Air dan Limbah	19.160.759.350,00
3	BUBU Hang Nadim	207.781.123.930,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	328.202.368.657,00
5	Rumah Sakit BP Batam	95.874.126.760,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	959.091.190,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	86.990.444.423,00
	Jumlah	765.686.076.690,00

E.1.1.1. Kantor Pusat

Pendapatan usaha Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp26.718.162.380,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Direktorat Pemanfaatan Aset:	
	Pendapatan Retribusi Tiket	1.116.980.000,00
	Pendapatan dari Bida Sekupang	1.268.123.752,00
	Pendapatan dari Bida Ampar	2.394.648.102,00
	Pendapatan dari Bida Kuning	4.257.330.652,00
	Pendapatan dari Bida Kabil	1.123.318.002,00
	Pendapatan dari Rumah Susun Lainnya	233.712.000,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	704.186.132,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	33.977.231,00
	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	94.715.512,00
	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	225.000.000,00
	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	455.917.810,00
	Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	90.450.000,00
	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	29.460.000,00
	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis Lainnya	13.715.500,00
	Jumlah (1)	12.041.534.693,00
2	PDSI	
	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	8.245.374.101,00
	Jumlah (2)	8.245.374.101,00
3	Direktorat Prasarana dan Sarana	
	Perijinan Pematangan Lahan	1.024.000.000,00
	Pendapatan pemakaian lahan ROW untuk utilitas	792.370.100,00
	Pendapatan penghijauan / show room bunga / tanaman	500.000,00
	Pendapatan pemakaian Lahan ROW untuk jasa lainnya	14.604.000,00
	Pendapatan dari sewa lahan reklame	3.408.514.486,00
	Jumlah (3)	5.239.988.586,00
4	Direktorat Lalu Lintas Barang	
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	181.550.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	1.500.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Produsen Plastik	200.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	709.125.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	75.200.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	111.400.000,00
	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	39.000.000,00
	Pendapatan Jasa Penetapan Kuota	30.900.000,00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian ROHS pada Logam, Polimer dan Komponen Elektronika	10.290.000,00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan menggunakan X-Ray	12.100.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai unsur Uranium)	14.300.000,00
	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	5.700.000,00
	Jumlah (4)	1.191.265.000,00
	Total (1+2+3+4)	26.718.162.380,00

Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri dari pendapatan faktur dan penerimaan langsung tunai/kas. Pendapatan faktur adalah pendapatan yang penerimaannya menggunakan faktur dan penyetorannya langsung dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam, sedangkan pendapatan non faktur adalah pendapatan yang penerimaannya disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam tanpa menjadi Piutang terlebih dahulu. Pendapatan usaha berdasarkan metode penerimaan (faktur dan non faktur) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Pendapatan dari Faktur		
Pendapatan Penghijauan/Showroom Bunga/Tanaman	500.000,00	226.744.850,00
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	14.604.000,00	263.481.600,00
Pendapatan Sewa Lahan Reklame	3.408.514.486,00	2.806.953.590,00
Pendapatan Data Centre IT Centre	8.245.374.101,00	7.345.992.600,00
Jumlah (I)	11.668.992.587,00	10.643.172.640,00
Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	1.191.265.000,00	487.350.000,00
Pendapatan Retribusi Tiket	1.116.980.000,00	1.188.565.000,00
Pendapatan dari Bida Sekupang	1.268.123.752,00	731.516.399,00
Pendapatan dari Bida Ampar	2.394.648.102,00	1.894.725.339,00
Pendapatan dari Bida Kuning	4.257.330.652,00	3.576.020.792,00
Pendapatan dari Bida Kabil	1.123.318.002,00	861.558.876,00
Pendapatan dari Rumah Susun Lainnya	233.712.000,00	234.312.000,00
Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	704.186.132,00	916.869.755,00
Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	33.977.231,00	0,00
Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	94.715.512,00	64.019.136,00
Pendapatan Sewa Kandang Ternak	225.000.000,00	281.883.564,00
Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	455.917.810,00	579.859.251,00
Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	90.450.000,00	66.000.000,00
Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	29.460.000,00	8.325.000,00
Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	0,00	2.045.000,00

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Pendapatan Agribisnis lainnya	13.715.500,00	0,00
Pendapatan Pematangan Lahan	1.024.000.000,00	1.024.000.000,00
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	792.370.100,00	404.347.000,00
Jumlah (II)	15.049.169.793,00	12.321.397.112,00
Total (I) + (II)	26.718.162.380,00	22.964.569.752,00

E.1.1.2. Kantor Air dan Limbah.

Pendapatan usaha Kantor Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp19.160.759.350,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan Air Baku	17.874.332.750,00
Pengolahan Air Limbah	450.320.000,00
Pendapatan Penyedotan Air Limbah	4.625.000,00
Sewa Lahan KPLI B3	831.481.600,00
Jumlah	19.160.759.350,00

Pendapatan Kantor Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjualan Air Baku sebesar Rp17.874.332.750,00 adalah penjualan air baku kepada PT. Adhya Tirta Batam dan PT. Batamindo Investment Cakrawala masing-masing sebesar Rp15.650.958.318,00 dan Rp2.223.374.432,00. Pendapatan Air Baku adalah Pendapatan atas penjualan Air Baku kepada PT. Adhya Tirta Batam dan PT. Batamindo Inv. Cakrawala berdasarkan PMK RI Nomor 87/PMK.05/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum BP Batam dan berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 21 tahun 2016.
2. Pendapatan Pengolahan Air Limbah dan penyedotan air limbah masing-masing sebesar Rp450.320.000,00 dan Rp4.625.000,00 adalah pendapatan dari pengolahan air limbah cair domestik dan pengurusan

sumur tinja berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 15 tahun 2018.

3. Pendapatan Sewa sebesar Rp831.481.600,00 adalah pendapatan dari tenant di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil, dengan perincian sebagai berikut :

- Pendapatan sewa lahan KPLI B3 sebesar Rp579.321.600,00,
- Sewa Ruangan Kantor KPLI B3 sebesar Rp19.360.000,00
- Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI B3 sebesar Rp232.800.000,00

Dengan tarif berdasarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 15 tahun 2018 dan berdasarkan PMK RI Nomor 87/PMK.05/2018.

E.1.1.3.BUBU Hang Nadim.

Pendapatan usaha BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp207.781.123.930,00 terdiri dari pendapatan aeronautika dan non aeronautika masing-masing sebesar Rp124.608.326.011,00 dan Rp83.172.797.919,00.

Pendapatan aeronautika sebesar Rp124.608.326.011,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendaratan Dalam Negeri	5.923.497.360,00
2	Penempatan Dalam Negeri	1.256.560.802,00
3	Pendaratan Luar Negeri	2.462.193.319,00
4	Penempatan Luar Negeri	242.192.022,00
5	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri (JP2U)	102.997.890.100,00
6	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri (JP2U)	6.023.400.000,00
7	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri	2.049.200.000,00
8	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Luar Negeri	684.978.791,00
9	Fasilitas Counter Dalam Negeri	2.046.566.446,00
10	Fasilitas Counter Luar Negeri	114.695.687,00
11	Pendapatan GSE	564.939.053,00
12	Pendapatan Aero Lain-lain	242.212.431,00
	Jumlah (I)	124.608.326.011,00

Pendapatan Non Aeronautika sebesar Rp83.172.797.919,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Sewa	19.320.454.789,00
2	Pendapatan Reklame	940.340.655,00
3	Pendapatan Air	447.411.680,00
4	Konsesi Fee	38.368.840.959,00
5	Pendapatan Listrik	7.763.331.499,00
6	Non Aeronautika Lainnya	1.496.155.000,00
7	Pendapatan Tanah	1.007.646.400,00
8	Fasilitas Bus Apron	56.500.000,00
9	Pendapatan FDS	11.664.484.307,00
10	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	2.107.632.630,00
	Jumlah (II)	83.172.797.919,00
	Total Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim (I+II)	207.781.123.930,00

E.1.1.4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan usaha dari jasa layanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp328.202.368.657,00 terdiri dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan Kapal sebesar Rp215.595.790.806,00, Jasa Layanan Barang sebesar Rp77.132.550.465,00 dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp35.474.027.386,00.

1. Pendapatan usaha jasa layanan kapal sebesar Rp215.595.790.806,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Labuh	109.334.999.150,00
2	Jasa Tambat	101.469.429.914,00
3	Jasa Pemanduan	511.950.655,00
4	Jasa Penundaan	1.158.919.087,00
5	Jasa Air	3.120.492.000,00
	Jumlah	215.595.790.806,00

Pendapatan Jasa Pemanduan dan Jasa Penundaan merupakan pendapatan yang di peroleh dari hasil kerjasama operasi (KSO) dengan mitra pihak ketiga untuk pengelolaan Jasa Layanan Kapal kegiatan Pandu dan Kegiatan

Tunda diwilayah kerja Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan nilai sharing sesuai dengan perjanjian kerjasama.

2. Pendapatan Usaha Jasa Layanan Barang sebesar Rp77.132.550.465,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Dermaga	237.953.455,00
2	Jasa Penumpukan	8.957.759.101,00
3	Jasa Bongkar Muat	59.354.704.375,00
4	Pendapatan Jasa Alat	445.750,00
5	Chasis Fee	703.518.000,00
6	Troughput Fee	7.843.684.073,00
7	Imbalan Layanan Bongkar Muat	34.485.712,00
	Jumlah	77.132.550.465,00

3. Pendapatan Jasa Layanan Lainnya Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.474.027.386,00 terdiri dari pendapatan Retribusi sebesar Rp22.182.277.173,00 Jasa Sewa sebesar Rp12.849.836.460,00 dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp441.913.753,00.

E.1.1.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Pendapatan usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp95.874.126.760,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Rawat Inap	45.744.334.157,00
2	Penghasilan Rawat Jalan	25.043.498.199,00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	2.399.299.003,00
4	Pendapatan Operasional Tindakan Medis	12.633.123.342,00
5	Pendapatan Operasional Unit Penunjang	8.471.204.303,00
6	Pendapatan Operasional Lain	1.582.667.757,00
	Jumlah	95.874.126.760,00

E.2.1.6. Kantor Perwakilan Jakarta.

Pendapatan usaha Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp959.091.190,00 merupakan pendapatan dari kegiatan pengelolaan Kuningan *Guest House* di Jakarta.

E.2.1.7. Kantor Pengelolaan Lahan.

Pendapatan usaha Kantor Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp86.990.444.423,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan UWTO	76.062.172.860,00
2	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	243.595.624,00
3	Pendapatan Adminstrasi Peralihan	8.223.175.939,00
4	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	31.300.000,00
5	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	537.500.000,00
6	Pendapatan Penggantian Dokumen	28.100.000,00
7	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.864.600.000,00
	Jumlah	86.990.444.423,00

Pendapatan Usaha Lainnya

E.1.2 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp149.816.026.516,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya	90.629.891.255,00
Pendapatan Sewa	6.256.501.204,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	45.626.018.526,00
Lain-lain	7.303.615.532,00
Jumlah	149.816.026.516,00

E.1.2.1. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp90.629.891.255,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	8.512.785.435,00

No	Unit	Jumlah (Rp)
2	BUBU Hang Nadim	628.230.200,00
3	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	81.488.875.620,00
	Total	90.629.891.255,00

(Rincian Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 37).

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sebesar Rp90.629.891.255,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Kantor Pengelolaan Air dan Limbah** sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.512.785.435,00 merupakan pendapatan hasil kerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam yang terdiri dari pendapatan sewa aset sebesar Rp4.012.785.435,00 dan pendapatan royalti sebesar Rp4.500.000.000,00.
2. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **BUBU Hang Nadim** sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp628.230.200,00 merupakan pendapatan parkir PT Adhil Sukses Pratama.
3. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp81.488.875.620,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	KSO Chasis	6.232.538.790,00
2	KSO Iklan	114.597.500,00
3	KSO Pandu	6.236.964.205,00
4	KSO Parkir	409.551.864,00
5	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	18.086.400,00
6	KSO Royalti	21.485.650.375,00
7	KSO Sampah	14.214.000,00
8	KSO Seaport Tax/Pass Orang	33.103.509.100,00
9	KSO Sewa Ruang / Bangunan	848.438.403,00
10	KSO Tambat	3.046.561.593,00
11	KSO Tunda	9.306.870.797,00
12	KSO Pass Kendaraan	26.762.200,00
13	KSO Fee Bongkar Muat	404.329.875,00
14	KSO Throughput	918.750,00
15	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	239.881.769,00
	Jumlah	81.488.875.620,00

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam terdiri dari:

1. Pendapatan KSO Chasis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp6.232.538.790,00** adalah hasil kerjasama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
2. Pendapatan KSO Iklan sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp114.597.500,00** adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002-110/OB ST/SPCB/VII/2002. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/XII/2005-258/OB-ST/SPAD/XII/2005 dan perubahan kedua dengan nomor 118/SPJ/KA/12/2011 - 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/ IDC-BO/ADD/BOT- SKP/I/2010.
3. Pendapatan KSO Pandu sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp6.236.964.205,00** adalah KSO Pemanduan di perairan Tanjung Ugang Batam antara lain PT. Bias Delta Pratama dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 & 012/DIR-BDP/X/2012. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian dengan nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 & 0068/BDP-DIR/X/2017. Selanjutnya dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018. Dan perjanjian antara BP Batam dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU. Mulai tanggal 01 Agustus 2018 dilakukan penerapan pelaksanaan Host to Host Sistem Pembayaran

- Pemanduan yang rinci pada periode 01 - 31 Januari 2019 dapat dijelaskan berdasarkan COA Pendapatan Jasa Pemanduan.
4. Pendapatan KSO Parkir sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp409.551.864,00** adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011-014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT.Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
 5. Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih 31 Desember 2019 sebesar **Rp18.086.400,00** adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
 6. Pendapatan KSO Royalti sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp21.485.650.375,00** adalah hasil kerjasama dengan PT. Indodharma Corpora dan PT. Synergy Tharada.
 7. KSO Sampah sebesar **Rp14.214.000,00** adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
 8. Pendapatan KSO Seaport Tax/Pass Orang sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp33.103.509.100,00** terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT. Citra Tri Tunas dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012-156/SPJ/KA/7/2012,dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013- 453/SPJ/KA/7/2013. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT.Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010, KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian

- Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal ferry internasional batam centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011.
9. Pendapatan KSO Sewa Ruang dan Bangunan sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp848.438.403,00** adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002–110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/XII/2005–258/OB-ST/SPAD/XII/2005 dan perubahan kedua dengan nomor 118/SPJ/KA/12/2011 - 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. Dan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010–010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
10. Pendapatan KSO Tambat sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp3.046.561.593,00** diantaranya adalah pendapatan KSO Tambat hasil kerjasama dengan beberapa mitra diantaranya PT. Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 & 002/SC/IV/2004 dan PT. Port Sekupang Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
11. Pendapatan KSO Tunda sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp9.306.870.797,00** adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Kapal Tunda Teluk Jodoh antara PT. Gemalindo dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:
- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema I Perjanjian Nomor 40/SPJ/A3/9/2015– 02/GS-Dir/IX/2015 Tanggal 9 Juli 2015 jangka waktu 6 tahun dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Dengan perubahan kedua perjanjian kerjasama dan

perubahan nama kapal dari TB. Gema I menjadi TB. Gema 5 dengan nomor perjanjian 552/SPJ/A3/4/2017.

- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema II Perjanjian Nomor 141/SPJ/A1.2/07/2014 – 007/GS-OPS/VIII/2014 tanggal 23 Juli 2014 jangka waktu 2 tahun dari tanggal 23 juni 2014 sampai dengan 22 juni 2016. Perubahan kedua perjanjian dengan nomor 552/SPJ/A3/4/2017 tanggal 13 April 2017 jangka waktu perjanjian 6 tahun dari tanggal 3 mei 2015 sampai dengan 2 mei 2021. Masa berlaku perjanjian disesuaikan dengan perjanjian 78/SPJ/A3.2/05/2015 & 20/GS-Dir/V/2015 karena adanya penyatuan perjanjian.

KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Kurnia Samudra dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:

- Pengelolaan Kapal Tunda TB. PATIH II Perjanjian Nomor:45/SPJ/A1.2/04/2013–039/PKS/ADM/IV/2013 tanggal 25 April 2013, jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang dengan addendum Perjanjian Nomor:42/SPJ/A3/2015-066/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015, jangka waktu perjanjian sampai 26 April 2018.
- Pengolaan Kapal Tunda TB. FRANSISCUS 01 & TB.PATIH II Perjanjian Nomor: 846 / SPJ / A3/5/ 2017 tanggal 03 Mei 2017, jangka waktu sampai dengan s/d 23 April 2021.
- Pengolaan Kapal Tunda TB. PUTRA I Perjanjian Nomor:04/PER-PL/04/2010-068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 jangka waktu 2 tahun sampai dengan 26 April 2012. Diperpanjang dengan addendum terakhir 44/SPJ/A3/2015–065/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 berlaku sampai dengan 23 April 2021.
- Pengoperasian Kapal Tunda TB. Sukses 1200 Perjanjian Nomor: 101/SPJ/A3.2/09/2015–075/PKS/ADM/IX/2015 tanggal 21 September 2015 berlaku 3 tahun sampai dengan 27 September

2018. Mulai tanggal 01 Agustus 2018 dilakukan penerapan pelaksanaan Host to Host Sistem Pembayaran Penundaan yang rinciannya pada periode 01 - 31 Januari 2019 dapat dijelaskan berdasarkan COA Pendapatan Jasa Penundaan.

12. Pendapatan KSO Pass Kendaraan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp26.762.200,00** adalah KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010-010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
13. Pendapatan KSO Fee Bongkar Muat sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp404.329.875,00** adalah Pendapatan Jasa Bongkar Muat untuk hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
14. Pendapatan KSO Throughput sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp918.750,00** adalah kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
15. Pendapatan KSO Lainnya sampai 31 Desember 2019 sebesar **Rp239.881.769,00** adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.

E.1.2.2. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.256.501.204,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	5.380.279.095,00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	344.308.661,00
3	Rumah Sakit BP Batam	531.913.448,00
	Jumlah	6.256.501.204,00

(Rincian Pendapatan Sewa dapat dilihat pada Lampiran 38).

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.256.501.204,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa **Kantor Pusat** sebesar Rp5.380.279.095,00 terdiri dari:

- Pendapatan Sewa gedung sebesar Rp4.595.475.376,00 merupakan pendapatan yang timbul dari sewa gedung asrama haji Batam Center, guest house Sekupang, Kios gedung annex 2 lantai 4, gedung indoor sporthall Temenggung Abdul Jamal.
 - Pendapatan Sewa Listrik sebesar Rp58.922.719,00 merupakan pendapatan dari sewa pemakaian listrik gedung Bida Batam Centre oleh PT. Bank Mandiri
 - Pendapatan Sewa Lainnya sebesar Rp725.881.000,00 merupakan pendapatan yang timbul dari penyewaan perlengkapan pendukung gedung dan ruangan.
2. Pendapatan sewa **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sebesar Rp344.308.661,00 merupakan pendapatan sewa listrik atas ruangan yang disewakan.
3. Pendapatan sewa **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp531.913.448,00 terdiri pendapatan sewa listrik sebesar Rp180.141.861,00 dan pendapatan sewa ruangan sebesar Rp351.771.587,00.

E.1.2.3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp45.626.018.526,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	42.812.480.824,00
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	42.398.635,00
3	BUBU Hang Nadim	158.340.056,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	33.283.780,00
5	Rumah Sakit BP Batam	109.245.658,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	9.273.739,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	2.460.995.834,00
	Jumlah	45.626.018.526,00

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp45.626.018.526,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Pusat** sebesar Rp42.812.480.824,00 terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp14.792.984.726,00 dan pendapatan bunga jangka pendek sebesar Rp28.019.496.098,00.
2. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Air dan Limbah** sebesar Rp42.398.635,00 merupakan pendapatan jasa giro.
3. Pendapatan jasa lembaga keuangan **BUBU Hang Nadim** sebesar Rp158.340.056,00 merupakan pendapatan dari jasa giro.
4. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** Badan Pengusahaan Batam Rp33.283.780,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.
5. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** Rp109.245.658,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.
6. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Perwakilan Jakarta** sebesar Rp9.273.739,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.
7. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Pengelolaan Lahan** sebesar Rp2.460.995.834,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.

E.1.2.4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.303.615.532,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1.977.258.349,00
2	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	484.896.182,00
3	BUBU Hang Nadim	2.421.531.287,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	807.355.376,00
5	Rumah Sakit BP Batam	728.337.439,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	3.934,00
7	Kantor Pengelolaan Lahan	884.232.965,00
	Jumlah	7.303.615.532,00

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.303.615.532,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

E.1.2.4.1. Kantor Pusat

Pendapatan jasa lain-lain Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.977.258.349,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	231.863.851,00
2	pendapatan lain-lain	1.745.394.498,00
	Jumlah	1.977.258.349,00

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp231.863.851,00 terdiri dari pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sanksi/Klaim sebesar Rp123.632.000,00, Pendapatan denda pemukiman sebesar Rp21.552.519,00 dan pendapatan sanksi, klaim dan denda lainnya sebesar Rp86.679.332,00;
2. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1.745.394.498,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kelebihan pembayaran gaji, pemotongan indisipliner pegawai dan kelebihan setor.

E.1.2.4.2. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Pendapatan jasa lain-lain Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp484.896.182,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	19.033.905,00
2	pendapatan lain-lain	465.862.277,00
	Jumlah	484.896.182,00

1. Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda sebesar Rp19.033.905,00 merupakan pendapatan denda.
2. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp465.862.277,00 terdiri dari pelunasan piutang yang telah disisihkan sebesar Rp386.133.313,00, pengembalian kelebihan pembayaran PT. Area Bangun Putra Sejati sebesar Rp29.645.999,00, Pembayaran kekurangan atas pengembalian pembayaran PT. Area Bangun Putra Sejati sebesar Rp2.392,00,

pengembalian kelebihan pembayaran PT Megatama Citra Lestari sebesar Rp38.727.273,00, Kelebihan pembayaran uang saku rapat sebesar Rp11.247.500,00, Kelebihan pembayaran faktur sebesar Rp105.800,00.

E.1.2.4.3. BUBU Hang Nadim

Pendapatan jasa lain-lain BUBU Hang Nadim sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.421.531.287,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	1.218.215.712,00
2	Pendapatan lain-lain	1.203.315.575,00
	Jumlah	2.421.531.287,00

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp1.218.215.712,00 terdiri dari pendapatan denda jasa Aeronautika sebesar Rp171.669.065,00, pendapatan denda jasa non Aeronautika sebesar Rp1.021.839.332,00 dan pendapatan sanksi/klaim dan denda lainnya sebesar Rp24.707.315,00.
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.203.315.575,00 terdiri dari :
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan taman dan rumput pada tahun 2018 CV. Sinar Harapan Utama berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp5.033.000,00,
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan kebugaran tahun 2018 PT. Anggun Cipta Sarana berdasarkan hasil pemeriksaan dana jaminan BPK RI sebesar Rp4.214.110,00,
 - Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan Garbarata tahun 2018 CV Aster sesuai hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp15.194.000,00,
 - Pengembalian dana jaminan atas pekerjaan pemeliharaan CV REZA sebesar Rp23.081.600,00
 - Pengembalian Uang Jaminan atas Pekerjaan Pemeliharaan Rumput dan Drainase Airside sebesar Rp115.536.738,00

- Pencairan Jaminan Pemeliharaan PT. Surya Sarana Dinamika Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengelola Sampah sebesar Rp32.514.330,00
- Pengembalian kelebihan Pembayaran PT Berca Hardayaperkasa atas Pekerjaan Revitalisasi Sistem Kamera Pemantau (CCTV) Gedung Bandara Hang Nadim sebesar Rp1.007.741.737,00
- Kelebihan pembayaran PT Adhi Karya sebesar Rp60.

E.1.2.4.4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan jasa lain-lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp807.355.376,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	721.811.414,00
2	Pendapatan dari pengadaan barang dan jasa	35.691.975,00
3	Pendapatan Iklan	384.000,00
4	Pendapatan Lain-lain	49.467.987,00
	Jumlah	807.355.376,00

E.1.2.4.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pendapatan jasa lain-lain Rumah Sakit Badan Pengusahaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp728.337.439,00 merupakan kelebihan pembayaran atas penerimaan kas kasir sebesar Rp986.046,00, konsesi atas kerjasama dengan PT Indomarco Prismatama, Poci Mas Indonesia dan Sebastian Citra Indonesia sebesar Rp109.394.534,00 serta pengembalian selisih pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa tenaga kebersihan, kelebihan pembayaran jasa medis dokter, uang makan magang dan pengembalian pembayaran atas pemutusan listrik sebesar Rp617.956.859,00.

E.1.2.4.6. Kantor Perwakilan Jakarta

Pendapatan jasa lain-lain pada Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.934,00 merupakan pendapatan dari selisih pembulatan uang kas bendahara pengeluaran.

E.1.2.4.7. Kantor Pengelolaan Lahan

Pendapatan jasa lain-lain pada Kantor Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp884.232.965,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	882.465.723,00
2	Pendapatan lain-lain	1.767.242,00
	Jumlah	884.232.965,00

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda per 31 Desember 2019 sebesar Rp882.465.723,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran UWT yang diterima Kantor Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Pendapatan Lain lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.765.242,00 adalah penerimaan yang berasal dari Koreksi Pengembalian Pajak bulan September s/d Desember 2018.

Keuntungan Lainnya

E.1.3 Keuntungan Lainnya

Keuntungan lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp871.278,00 merupakan kelebihan pembayaran pas pada Kantor Bandara Hang Nadim yang terdiri dari:

1. LION AIRLINES, BHN/2019/01/0357 sebesar Rp242,00
2. Berkah Utama Konstruksi BHN/2019/03/0321 sebesar Rp35.000,00
3. SUMBER ALFARIA TRIJAYA,Tbk BHN/2019/03/0314 sebesar Rp100,00

4. Yayasan Keluarga Batam (YKB) BHN/2019/04/0322 sebesar Rp936,00
5. Aerofood ACS sebesar Rp570.000,00
6. Citilink sebesar Rp240.000,00
7. Rizki Tiga Permata sebesar Rp5.000,00
8. PT.Telkom Indonesia sebesar Rp20.000,00

Beban Pegawai

E.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp513.831.019.985,00 dan Rp510.990.609.274,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Uraian		31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
A. Beban Pegawai - Usaha			
1	Biaya Gaji/Upah	159.381.477.043,00	150.625.819.631,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	25.226.097.941,00	264.971.078,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	4.188.900.000,00	4.293.560.000,00
4	Biaya Tunjangan Uang Makan	9.197.667.000,00	9.031.844.000,00
5	Biaya Tunjangan Uang Duka	5.000.000,00	0,00
6	Biaya Tunjangan Hari Raya	8.666.667,00	0,00
7	Biaya Tunjangan Lainnya	70.860.059.880,00	101.337.828.222,00
8	Biaya Lembur	1.123.034.250,00	1.109.638.317,00
9	Biaya Bantuan Uang Duka	54.200.336,00	10.000.000,00
10	Biaya BPJS Kesehatan	7.949.477,00	3.570.000,00
11	Biaya BPJS Tenaga Kerja	446.416.730,00	778.157.918,00
12	Biaya Subsidi dan Kontribusi Sosial Lainnya	0,00	19.862.695,00
Jumlah (A)		270.499.469.324,00	267.475.251.861,00
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.			
1	Biaya Gaji/Upah	133.765.947.726,00	136.410.663.704,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	21.953.454.401,00	1.144.388.908,00

Uraian		31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
3	Biaya Tunjangan Uang Makan	7.706.095.078,00	8.424.956.000,00
4	Biaya Tunjangan Lainnya	69.298.220.960,00	88.524.752.961,00
5	Biaya Lembur	3.029.402.467,00	2.854.816.000,00
6	Biaya Uang Duka	98.244.381,00	40.000.000,00
7	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.453.114.717,00	914.334.559,00
8	Biaya BPJS Kesehatan	1.518.198.017,00	508.321.761,00
9	Biaya Subsidi dan Kontribusi Sosial Lainnya	20.487.914,00	37.743.520,00
Jumlah (B)		243.331.550.661,00	243.515.357.413,00
Jumlah Beban Pegawai (A+B)		513.831.019.985,00	510.990.609.274,00

Beban Persediaan

E.3 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.838.218.891,00 dan Rp14.763.079.187,00 merupakan beban atas barang-barang persediaan dan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Rincian Beban Persediaan, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Beban Persediaan konsumsi	15.156.421.201,00	13.277.763.613,00
2	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	12.171.500,00	2.945.000,00
3	Beban Persediaan Bahan Baku	2.019.975.690,00	1.482.370.574,00
4	Persediaan Lainnya	649.650.500,00	0,00
Jumlah		17.838.218.891,00	14.763.079.187,00

Beban Barang dan Jasa

E.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp324.953.624.919,00 dan Rp312.056.384.935,00 merupakan biaya barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Beban Bahan	55.071.310.232,00	37.704.849.304,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
2	Beban Adm Perkantoran	166.107.482.549,00	182.630.605.917,00
3	Beban Jasa Layanan	59.624.616.443,00	52.551.626.595,00
4	Beban Daya dan Jasa Usaha	387.872.265,00	33.551.830.520,00
5	Beban Daya dan Jasa Umum dan Adm	40.551.414.392,00	143.009.146,00
6	Beban Bantuan Sosial & lain2	3.154.261.707,00	4.796.646.475,00
7	Beban Adm Bank	28.566.491,00	78.751.546,00
8	Biaya Pengembalian Usaha	28.100.840,00	595.065.432,00
9	Biaya Lain-lain	0,00	4.000.000,00
Jumlah		324.953.624.919,00	312.056.384.935,00

Beban
Pemeliharaan

E.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp104.908.780.972,00 dan Rp75.725.927.972,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
A. UNIT UMUM & ADMINISTRASI			
1	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	807.459.473,00	428.145.000,00
2	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	0,00	148.645.000,00
3	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Alat Rumah Tangga	321.914.700,00	104.747.000,00
4	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gudang	0,00	546.814.566,00
5	Biaya Pemeliharaan Flat/ Rumah Susun	1.382.877.200,00	2.552.223.606,00
6	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	1.061.305.000,00	667.158.000,00
7	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.208.808.000,00	2.111.574.000,00
8	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	2.735.560.749,00	3.878.306.500,00
9	Biaya Pemeliharaan Gedung Olahraga/Sporthall	314.687.000,00	522.147.000,00
10	Biaya Pemeliharaan Irigasi	48.034.000,00	0,00
11	Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.800.924.000,00	16.040.000,00
12	Biaya Pemeliharaan Jaringan	130.022.000,00	736.384.000,00
13	Biaya Pemeliharaan Komputer	214.499.000,00	189.886.600,00
14	Biaya Pemeliharaan Lainnya	16.230.788.918,00	9.939.819.000,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
15	Biaya Pemeliharaan Lift	436.007.000,00	442.630.000,00
16	Biaya Pemeliharaan Mobil (R4)	4.668.687.205,00	3.091.993.900,00
17	Biaya Pemeliharaan Sepeda Motor (R2)	95.432.500,00	49.990.000,00
18	Biaya Pemeliharaan Alat Pertanian	0,00	9.830.000,00
19	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.830.639.271,00	9.862.864.167,00
20	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	411.252.000,00	1.231.448.000,00
21	Biaya Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	231.034.500,00	30.640.000,00
22	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	288.592.538,00	0,00
	Jumlah (A)	46.218.525.054,00	36.561.286.339,00
B. UNIT USAHA			
1	Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	2.670.316.818,00	1.554.747.985,00
2	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	2.581.901.320,00	511.519.457,00
3	Biaya Pemeliharaan Dermaga	488.204.000,00	1.194.390.000,00
4	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.560.033.236,00	4.628.793.665,00
5	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	5.035.083.900,00	3.223.476.700,00
6	Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga	157.881.000,00	14.903.000,00
7	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.389.662.280,00	1.121.408.090,00
8	Biaya Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi	8.982.738.800,00	981.497.000,00
9	Biaya Pemeliharaan Jalan. Irigasi dan Jaringan Lainnya	406.489.339,00	1.138.975.560,00
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan	966.240.600,00	985.308.800,00
11	Biaya Pemeliharaan Kapal	238.406.000,00	189.360.000,00
12	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 2	0,00	7.911.000,00
13	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4	640.939.500,00	1.078.984.400,00
14	Biaya Pemeliharaan Landasan	3.348.564.930,00	6.735.917.120,00
15	Biaya Pemeliharaan Lift	0,00	45.485.000,00
16	Biaya Pemeliharaan Mesin	1.130.252.400,00	1.526.588.985,00
17	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.243.153.555,00	11.701.429.436,00
18	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	614.985.000,00	663.672.000,00
19	Biaya Lain-lain	0,00	25.080.000,00
	Jumlah (B)	55.454.852.678,00	37.329.448.198,00
C. LAINNYA			
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	881.211.000,00	1.144.274.875,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
2	Beban Persediaan Suku Cadang	2.354.192.240,00	690.918.560,00
	Jumlah (C)	3.235.403.240,00	1.835.193.435,00
	Total	104.908.780.972,00	75.725.927.972,00

Beban
Perjalanan
Dinas

E.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp34.847.506.840,00 dan Rp23.569.631.356,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	6.346.817.316,00	5.935.832.168,00
2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.356.761.303,00	2.212.790.876,00
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	9.060.000,00
4	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya	61.595.791,00	33.994.500,00
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.610.398,00	0,00
6	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri lainnya	3.601.229.238,00	1.715.465.144,00
7	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	16.643.666.591,00	10.303.105.363,00
8	Perjalanan Dinas Batam - Japan (PP)	197.231.125,00	229.941.534,00
9	Perjalanan Dinas Batam - Pekanbaru (PP)	273.677.445,00	145.911.983,00
10	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	922.057.289,00	855.770.997,00
11	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	292.845.751,00	379.604.872,00
12	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	3.148.014.593,00	1.748.153.919,00
	Jumlah	34.847.506.840,00	23.569.631.356,00

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi

E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.523.908.387.690,00 dan Rp376.847.640.772,00 merupakan beban untuk mencatat nilai

penyusutan aset tetap. Aset lainnya dan cadangan pada aset lain-lain dalam suatu periode. Rincian beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.495.775.852,00	111.700.252.392,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.935.475.338,00	26.492.320.938,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.096.445.641.932,00	153.278.205.068,00
4	Beban Penyusutan Irigasi	130.694.893.349,00	24.396.357.540,00
5	Beban Penyusutan Jaringan	43.476.141.610,00	42.443.540.034,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10.591.250,00	63.421.000,00
7	Beban Amortisasi Software	3.069.794.146,00	3.339.465.374,00
8	Beban Amortisasi Lisensi	535.318.179,00	453.876.612,00
9	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.784.586.330,00	9.507.976.603,00
10	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	4.460.169.704,00	5.172.225.211,00
	Jumlah	1.523.908.387.690,00	376.847.640.772,00

Dari saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.523.908.387.690,00 terdapat selisih dengan hasil pengujian BPK RI terhadap temuan LKPP tahun 2019 sebesar Rp265.250.920.698,00 yang sampai saat ini masih dalam penelusuran oleh tim Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan akan ditindaklanjuti di tahun 2020.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

E.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp18.654.623.745,00 dan Rp33.915.380.368,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Berdasarkan unit mandiri, biaya penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Unit	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Kantor Pusat	244.296.406,00	115.567.343,00

No	Unit	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	9.410.587.524,00	22.188.588.501,00
3	Rumah Sakit BP Batam	6.712.197.455,00	9.588.064.051,00
4	BUBU Hang Nadim	2.287.542.360,00	1.637.027.160,00
5	Kantor Air dan Limbah	0,00	386.133.313,00
	Jumlah	18.654.623.745,00	33.915.380.368,00

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar*

E.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp655.290.634,00 dan Rp20.600.000,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp655.290.634,00 terdiri dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp111.000.000,00 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp544.290.634,00.

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar*

E.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.867.843.166,00 dan Rp136.768.670.341,00, merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena penghapusan atas aset yang masih memiliki sisa nilai perolehan yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan BMN yang dihentikan (peralatan dan mesin) pada UAPKPB Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 2 Tahun 2019	(110.629.487,00)
2	Penghapusan gedung laboratorium permanen UAPKPB Biro Umum dan Sekretariat sesuai SK Kepala BP Batam Nomor 53 Tahun 2019	189.353.182,00
3	Penghapusan BMN yang dihentikan (JIJ) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan SK Kepala BP Batam No.82 Tahun 2019	3.789.111.971,00
4	Penghapusan hutang persediaan barang konsumsi biro Umum dan Sekretariat 3239/A1.1/P1.00.04/12/2019 tanggal 5 Desember 2019	7.500,00
	Jumlah	3.867.843.166,00

Pendapatan
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya

E.11 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.291.036.088,00 dan Rp10.933.045.652,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	1.282.212.588,00	5.840.843.562,00
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.823.500,00	3.787.402.090,00
3	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.304.800.000,00
	Jumlah	1.291.036.088,00	10.933.045.652,00

1. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU sebesar Rp1.282.212.588,00 yang merupakan nilai perhitungan laba kurs piutang dan penerimaan sementara.
2. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp8.823.500,00 yang merupakan koreksi/mapping otomatis atas akun penyesuaian nilai persediaan yang dihasilkan dari koreksi otomatis aplikasi SAIBA yang berada pada sisi kredit.

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional

E.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.056.355.165,00 dan Rp6.994.537.582,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.230.000,00	3.189.090.880,00
2	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	147.692.636,00	194.350.553,00
3	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	2.907.432.529,00	3.611.096.149,00
	Jumlah	3.056.355.165,00	6.994.537.582,00

1. Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp1.230.000,00 yang merupakan koreksi/mapping otomatis atas akun penyesuaian nilai

- persediaan yang dihasilkan dari koreksi otomatis aplikasi SAIBA yang berada pada sisi kredit.
2. Persediaan rusak/usang sebesar Rp147.692.636,00 yang merupakan persediaan berupa obat pada RSBP yang *expired* selama periode 2019;
 3. Beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi BLU sebesar Rp2.907.432.529,00 yang merupakan nilai perhitungan laba kurs piutang dan penerimaan sementara.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

F.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp26.799.855.089.922,00 dan Rp26.951.507.926.788,00.

Surplus/ (Defisit LO)

F.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.628.094.816.308,00 dan Rp625.224.053.567,00. Surplus (defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan

F.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp294.867.300,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan tersebut merupakan koreksi terhadap Alat Kesehatan yang dibeli dengan belanja modal pada tahun 2018 namun didalamnya terdapat barang yang seharusnya adalah persediaan suku cadang.

Koreksi Atas Reklasifikasi

F.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing minus Rp978.622.232.168,00 dan Rp0,00. Koreksi atas reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas reklasifikasi antara UPKPB terhadap aset tetap dan akumulasi penyusutan yang terdiri dari:

No	Uraian	Koreksi Nilai Aset (a)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (b)	Total Koreksi Atas Reklasifikasi (a-b)
1	Tanah	128.889.110.866,00	0,00	128.889.110.866,00
2	Peralatan dan Mesin	(19.526.481.700,00)	1.182.726.933,00	(20.709.208.633,00)
3	Gedung Dan Bangunan	485.170.970,00	878.887.985.364,00	(878.402.814.394,00)
4	Jalan dan Jembatan	0,00	651.228.521,00	(651.228.521,00)
5	Irigasi	170.925.000,00	91.100.820,00	79.824.180,00
6	Jaringan	(11.612.756.497,00)	69.251.575,00	(11.682.008.072,00)
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	(666.029.684,00)	0,00	(666.029.684,00)
	Jumlah	97.739.938.955,00	880.882.293.213,00	978.622.232.168,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap

F.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp27.454.507.260.455,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp27.454.507.260.455,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	20.966.585.645.133,00
2	Gedung dan Bangunan	3.320.175.062.247,00
3	Jalan dan Jembatan	653.804.547.545,00
4	Irigasi	2.513.942.005.530,00
	Jumlah	27.454.507.260.455,00

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi

F.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus Rp683.773.502.617,00 dan Rp189.563.899.382,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi terdiri dari koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar minus Rp686.339.822.682,00 dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebesar Rp2.566.320.065,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut merupakan koreksi perubahan yang berasal dari hasil reklasifikasi perubahan nilai akumulasi penyusutan pada sistem SIMAK BMN dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		
1	Input Saldo Awal	(849.450.000,00)
2	Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	(521.999.356.000,00)
3	Koreksi Nilai Barang Berlebih	82.100.840,00
4	Koreksi Pencatatan	307.881.779.386,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	14.878.142.772,00
6	Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi	(412.211.221.267,00)
7	Koreksi terkait Takein Revaluasi TA 2017-2018	3.026.278.811.842,00
8	Koreksi Penyusutan karena 225	(1.725.437.648.899,00)
9	Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(813.399.518,00)
10	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	748.719.685,00
11	Transaksi Normalisasi BMN	(2.218.656.159,00)
	Jumlah (I)	686.339.822.682,00
II. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		
1	Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(2.655.450.349,00)
2	Koreksi terkait Takein Revaluasi TA 2017-2018	89.130.284,00
	Jumlah (II)	(2.566.320.065,00)
	Total (I+II)	683.773.502.617,00

Koreksi
Lain-

F.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.589.892.895,00 dan minus

Rp38.862.489,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi pembatalan piutang, reklasifikasi biaya yang masih harus dibayar dan lain-lain sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Menambah Ekuitas		
1	Koreksi PYD terhadap Pendapatan UWTO tahun lalu	6.002.034.231,00
2	Koreksi biaya pengadaan ATK sesuai ND 30/A1.12/11/2019 tanggal 15 November 2019	7.500,00
3	Penyesuaian Beban Pemeliharaan s.d 31 Desember 2019	341.075.545,00
	JUMLAH (1)	6.343.117.276,00
Koreksi Mengurangi Ekuitas		
1	Koreksi Pembatalan Faktur Piutang BUBU Hang Nadim	(185.557.812,00)
2	Koreksi BAP Juncto bulan desember berdasarkan nota dinas no.01/A3.422/KL/1/2020 tanggal 8 Januari 2020	(12.302.175,00)
3	Koreksi UJK BPK RI Tahun 2019 atas penerimaan titipan pihak ketiga karena kesalahan penjurnalan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	(1.555.364.394,00)
	JUMLAH (2)	(1.753.224.381,00)
	JUMLAH KOREKSI LAIN-LAIN (1+2)	4.589.892.895,00

Transaksi Antar Entitas

F.8 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp365.481.676.813,00 dan Rp284.046.179.808,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	423.215.501.073,00	258.219.643.210,00
2	Diterima Dari Entitas Lain	(977.534.493,00)	(25.545.000,00)
3	Transfer Masuk	3.731.567.631,00	39.188.990.112,00
4	Transfer Keluar	(60.487.857.398,00)	(13.336.908.514,00)
	JUMLAH	365.481.676.813,00	284.046.179.808,00

Transaksi antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp423.215.501.073,00 merupakan pendapatan yang berasal dari belanja modal yang bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
1	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Peralatan dan mesin	18.225.000.000,00
2	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	32.490.000,00
3	Belanja Barang yang berasal dari APBN/Rupiah Murni	10.600.000,00
4	Belanja Pemeliharaan yang berasal dari APBN/Rupiah Murni	13.792.390.000,00
5	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	10.330.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Gedung dan Bangunan	2.918.131.442,00
7	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Jalan & Jembatan	242.369.292.940,00
8	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan & Jembatan	302.030.000,00
9	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perencanaan Pengawasan Jalan & Jembatan	2.049.950.000,00
10	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Jalan & Jembatan	135.090.010,00
11	Pengadaan Aset Tetap yang berasal PHLN - Irigasi	140.822.819.470,00
12	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Irigasi	1.747.683.024,00
13	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	58.260.000,00
14	Pengadaan Aset Tetap yang berasal dari APBN/Rupiah Murni - Perjalanan Irigasi	741.434.187,00
JUMLAH		423.215.501.073,00

2. Diterima dari entitas lain sebesar Rp977.534.493,00 merupakan penyetoran PNPB ke kas negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN;
3. Transfer masuk sebesar Rp3.731.567.631,00 terdiri dari:
 - Transfer dari Kementerian PU-PERA ke UAPKPB Kantor Pengelolaan Air dan Limbah sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan No.S-47/MK.06/WKN/03/2018 sebesar Rp1.675.574.655,00;

- Transfer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Dir. Pemanfaatan Aset UAPKPB sesuai dengan surat Menteri Keuangan No.S-73/MK.6/WKN.03/KNL.04/2019 sebesar Rp1.739.282.822,00;
 - Alih Status dari KKP Ke UAPKPB Dir. Pemanfaatan Aset Sesuai Dengan SK 41 Tahun 2019 Sebesar Rp316.710.154,00.
4. Transfer keluar sebesar Rp60.487.857.398,00 terdiri dari:
- Alih Status ke Kementrian Hukum dan HAM Satker Lapas sesuai dengan SK Kepala BP Nomor: 37 Tahun 2019 sebesar Rp21.190.114.000,00
 - Transfer ke Polresta Barelang sesuai SK Nomor 181 sebesar Rp8.475.223.000,00
 - Alih Status pada UAPKPB Biro Umum ke Kementerian Pertanian RI sesuai dengan SK Kepala BP nomor: 41 Tahun 2019 sebesar Rp485.757.002,00
 - Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum Ke Polresta Barelang Sesuai Dengan SK Nomor 181 Tahun 2019 sebesar Rp26.303.242.396,00
 - Koreksi transfer keluar atas 224 pada UAPKPB Biro Umum berdasarkan hasil input LHIP sebesar Rp4.033.521.000,00.

Ekuitas Akhir

F.9 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp51.334.238.244.292,00 dan Rp26.799.855.089.922,00. Ekuitas akhir sampai dengan 31 Desember 2019 merupakan penambahan Ekuitas awal sebesar Rp25.796.996.293.865,00 yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp294.875.300,00 dikurang Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp978.622.232.168,00, ditambah selisih revaluasi aset sebesar Rp27.454.507.260.455,00 dikurang Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp683.773.502.617,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp4.589.892.895,00, Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp365.481.676.813,00. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp24.534.383.154.370,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp51.334.238.244.292,00.

G. TAMBAHAN PENJELASAN PADA POS LAPORAN ARUS KAS

G.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 sebesar Rp49.160.675.979,00 merupakan arus masuk kas sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kas BLU atas penerimaan yang berasal dari titipan pihak ketiga sebesar Rp961.704.192,00, utang pajak sebesar Rp6.918.750,00, reklasifikasi dana pihak ketiga atas *outstanding check* sebesar Rp38.334.026.749,00 dan uang muka panjar sebesar Rp9.858.026.288,00.

G.2 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 sebesar Rp60.890.247.227,00 merupakan arus keluar kas sampai dengan 31 Desember 2019 pada Kas BLU atas penerimaan yang berasal dari titipan pihak ketiga sebesar Rp6.139.419.920,00, utang pajak sebesar Rp5.240.341,00, reklasifikasi dana pihak ketiga BLU sebesar Rp44.887.560.678,00 dan uang muka panjar sebesar Rp9.858.026.288,00.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

H.1 IKATAN DAN KONTIJENSI

- a. Perjanjian kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dan **PT Asuransi Jiwasraya** (Persero) dengan perjanjian kerjasama nomor 129/SPJ/KA/12/2015 dan nomor 212.SJ.U.12.15 tentang Pengelolaan Dana Uang Penghargaan Pengabdian Badan Pengusahaan Batam dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan seluruh peserta berakhir masa kepesertaannya.

Program asuransi ini adalah program manfaat pasti dengan besaran mengacu pada faktor uang penghargaan pengabdian pegawai Badan Pengusahaan Batam. Jika tertanggung/peserta hidup pada akhir masa asuransi atau meninggal dunia dalam masa asuransi.

Pada Pasal 6 perjanjian dimaksud disepakati bahwa pembayaran premi oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar Rp413.773.431.972,00 dengan skema pembayaran sebagai berikut:

No	Tahapan ke	Prosentase Pembayaran Premi	Besar Pembayaran (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
1	I	5%	20.688.671.599,00	30 Januari 2016
2	II	55%	227.575.387.585,00	10 April 2016
3	III	40%	165.509.372.789,00	10 April 2017

Pada Tahun 2017, telah dibayarkan premi tahap ke III sebesar Rp163.981.515.419,00 nomor B/K 2017/08/3906 tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan perubahan perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Dana Uang Penghargaan Pengabdian Badan Pengusahaan Batam nomor 1153/KA/8/2017 dan 127.SJ.U.0817 tanggal 14 Agustus 2017.

Adapun jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam program asuransi adalah sebanyak 1846 peserta dengan *cash value* per 30 November 2019 sebesar Rp370.449.831.039,00. Program manfaat mengacu pada faktor uang penghargaan pengabdian pegawai Badan Pengusahaan Batam jika tertanggung/peserta hidup pada akhir masa asuransi atau meninggal dunia dalam masa asuransi. Jumlah pegawai yang telah menerima manfaat asuransi sampai

dengan 30 November 2019 sebanyak 349 orang dengan jumlah manfaat sebesar Rp153.883.190.228,00.

- b. Perjanjian sewa menyewa tangki timbun Kabil nomor 07/PERJ/KA/IV/2005 tanggal 27 April 2005 antara Otorita Batam dengan **PT Patra Niaga**. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Patra Niaga wajib membayar kepada otorita Batam biaya sewa sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) per tahun. Apabila terdapat surplus atau peningkatan pemakaian tangki timbul sehingga pemakaian tangki melebihi volume 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah ribu) MT per tahun, maka atas kelebihan tersebut Otorita batam berhak atas insentif sebesar US 1.20 (USD satu poin dua puluh sen) per MT.

PT Patra Niaga juga wajib menyerahkan jaminan kinerja kepada Otorita Batam sebesar Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan pada saat perjanjian terakhir.

Pembayaran sewa akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran atas insentif akan dilaksanakan 3(tiga) bulan setelah tutup buku dan dilaksanakannya audit oleh Kantor Akuntan Publik. Perubahan terhadap perjanjian sewa menyewa tangki timbun kabil melalui Nomor 804/SPJ/A1/12/2014 – 004/PN000/Perj/2005 pada tanggal 22 Desember 2014 merubah perjanjian pasal 15 tentang Biaya Sewa dan Insentif terhadap surplus pemanfaatan tangki, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 biaya sewa mengalami kenaikan tarif sewa menjadi sejumlah Rp8.205.352.087,50 per tahun dengan biaya akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah 25% dari biaya sewa per tahun.

Berdasarkan perjanjian terbaru maka terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 26 April 2020, Biaya sewa tangki timbun sebagaimana dimaksud pada pasal 15.3

pada perjanjian mengalami kenaikan tarif sewa menjadi Rp10.290.795.319,11 dengan dibayar dimuka setiap 3 (tiga) bulan sekali berjumlah Rp3.298.693.294,07.

- c. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelabuhan umum lepas Pantai Kabil nomor 05/PERJ.KA/IV/2004 tanggal 22 April 2004 antara Otorita Batam dengan **PT Semblog Citranusa**. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima tahun).

Berdasarkan perjanjian tersebut PT Semblog Citranusa wajib melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan. PT Semblog Citranusa berhak melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
- 2) Pemasaran kegiatan dan jasa Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
- 3) Penyediaan, pengoperasian, bongkar muat alat-alat penunjang perminyakan;
- 4) Bongkar muat;
dan
- 5) Kegiatan operasional.

PT Semblog Citranusa juga diperkenankan melakukan usaha kegiatan penunjang lainnya. Pembagian pendapatan yang diperoleh selama penyelenggaraan pelabuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa Labuh, sepenuhnya menjadi hak Otorita Batam;
- 2) Jasa Tambat.masing-masing pihak menerima 50% dari pendapatan;
- 3) Jasa Dermaga, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan; dan
- 4) Pendapatan lain-lain, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan.

Selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani. PT Semblog Citranusa berhak atas 100% (seratus persen) dari pendapatan jasa dermaga dan pendapatan lain-lain, sedangkan untuk tahun keempat dan seterusnya berlaku ketentuan seperti tersebut di atas. Perjanjian kerjasama ini dilakukan perubahan perjanjian dengan mengubah nama terhadap pihak kedua dari sebelumnya PT. Semblog Citranusa menjadi PT. Sarana Citra Nusa Kabil dan perubahan terhadap penyebutan nama dari sebelumnya Pelabuhan Umum Lepas Pantai

Kabil menjadi Pelabuhan Umum Citranusa Kabil. Hal ini dituangkan dalam perubahan perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak pada tanggal 31 Maret 2009.

- d. Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre Nomor 04/PERJ.KA/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002 dan terakhir diperbaharui Nomor 118/SPJ/KA/12/2011.014/BCP.KSO/Add.II/2011 tanggal 30 Desember 2011 antara Otorita Batam dengan **PT Sinergy Tharada**. Jangka waktu perjanjian 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani menjadi 22 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Otorita Batam wajib menyerahkan pengelolaan aset.

PT Sinergy Tharada berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standar internasional pengelolaan terminal ferry.

PT Sinergy Tharada juga wajib menyerahkan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang ditunjuk bersama.

Badan Pengusahaan Batam berhak memperoleh royalty dari *gross revenue* yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

<u>Gross revenue per tahun</u>	<u>%</u>
a. Sampai dengan Rp15.000.000.000,00	10
b. Rp15.000.000.001,00. Rp20.000.000.000,00	20
c. Lebih dari Rp20.000.000.000,00	30

- e. Perjanjian konsesi nomor 009/UM.PERJ/IV/95 tanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara Otorita Batam dengan konsorsium yang terdiri dari Biwater International Limited, **PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang**. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun.

Otorita Batam berkewajiban untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan oleh perusahaan konsesi memberikan ijin dan atau membantu perolehan ijin yang diperlukan oleh perusahaan konsesi dari instansi/badan pemerintah lainnya untuk mengambil dan menggunakan air baku dari waduk.

Kewajiban Perusahaan Konsorsium antara lain:

- a. Rehabilitasi atas fasilitas lama;

- b. Pengadaan fasilitas baru dan kelengkapannya;
- c. Menyalurkan air bersih kepada konsumen, yang jika jumlah maupun mutu tidak tercapai maka Perusahaan Konsesi akan dikenakan sanksi; dan
- d. Menyerahkan kepada Otorita Batam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Berdasarkan perjanjian tersebut. Otorita Batam berhak atas:

- a. Pendapatan air baku;
 - b. Pendapatan sewa. sehubungan dengan penggunaan fasilitas lama oleh perusahaan konsorsium; dan
 - c. Royalti sebesar 15 (lima belas persen) dari dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan konsesi.
- f. Perjanjian kerjasama nomor 1/PERJ.KA/I/2010 dan 010/IDC.OB/ADD/BOT.SKP/I/2010 Tanggal 11 Januari 2010 kerjasama membangun, mengelola dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) antara OB Batam dengan **PT Indodharma Corpora**. Jangka Waktu perjanjian adalah 28 tahun mulai 20 Agustus 2004 sampai dengan 19 Agustus 2032. Perjanjian ini merupakan perubahan perjanjian kerjasama nomor 12/PERJ.KA/VIII/2004 dan 111/DC.OB/SP/BOT.SKP/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004.

Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT Indodharma Corpora untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal baru, pengoperasian dan pemeliharaan terminal lama, membongkar terminal lama, pengoperasian dan pemeliharaan terminal Ferry Internasional Sekupang dan penyerahan kembali pada saat perjanjian berakhir, dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT).

PT Indodharma Corpora berkewajiban untuk, antara lain:

- 1) Membayar beban konsesi;
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh investasi dan realisasi Beban pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Internasional Sekupang;

- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu standar internasional pengelolaan terminal ferry;
- 4) Menyerahkan laporan.laporan yang telah ditentukan antara lain:
 - Laporan hasil kinerja;
 - Laporan keuangan tengah tahunan;
 - Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar; dan
- 5) Selambat-lambatnya 90 hari sejak saat berakhirnya perjanjian, menyerahkan kembali seluruh barang milik negara berikut seluruh komplek terminal Ferry Sekupang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dalam hal ini adalah Badan Pengusahaan Batam berhak atas royalti dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara *progressive* (memingkat) yang dihitung dan dibayar oleh pihak kedua terhitung sejak 1 Januari 2008 berdasarkan perhitungan berikut:

- a) *Gross revenue* sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) setahun besarnya Royalty adalah 10 (sepuluh persen) dari *gross revenue* tersebut;
- b) *Gross revenue* di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) di atas. Pihak Pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar 20 (dua puluh persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas angka Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
- c) *Gross revenue* di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) di atas. Pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* 30 (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
- (d) *Gross revenue* di atas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak di atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a), (b), dan huruf (c) di atas. Pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar) tersebut.

PT Indodharma Corpora wajib membayar *royalty* kepada BP Batam c.q Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Seluruh pendapatan harian atas pas pelabuhan sesuai dengan persentase atau sekurang-kurangnya 10%;
- b) BP Batam c.q Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam akan menerbitkan tagihan berdasarkan Laporan bulanan yang wajib dibayar dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya tagihan tersebut oleh PT Indodharma Corpora; dan
- c) Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maka akan dihitung *royalty* dan diterbitkan *invoice*.

- g. Pada tanggal 12 Januari 2007 Otorita Batam mengadakan perjanjian sewa menyewa *Fuel Distribution System* (FDS) Avtur Kabil dengan **PT Patra Niaga** dengan surat perjanjian No. 01/PERJ-KA/I/2007. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian sebelum waktunya.

Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam akan menyerahkan FDS dan berhak untuk mendapatkan pembayaran uang sewa sebesar Rp3.247.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). dengan mekanisme sebagai berikut:

- Uang muka sebesar 30% dari Beban sewa per tahun yang dibayarkan selambat.lambatnya 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani.
- Untuk sisa sewa akan dibayarkan 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- Sisa dari Beban sewa per tahun setelah dikurangi uang muka dan sisa sewa akan dibayarkan pada saat mulai beroperasinya FDS setelah rekondisi selambat.lambatnya 10 bulan setelah penandatanganan perjanjian.
- Untuk pembayaran Beban sewa tahun kedua dan seterusnya selama masa perjanjian akan dibayar dimuka setiap 3 bulan sekali sejumlah Rp811.750.000.00.

PT Patra Niaga wajib menyerahkan jaminan kepada Otorita Batam Rp811.750.000.00 yang berlaku selama 1 tahun dan diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum periode pembayaran tahun kedua dan seterusnya.

Sampai dengan saat ini Perpanjangan perjanjian telah berakhir dan hak BP Batam telah dipenuhi. Kemudian diterbitkan Berita Acara Kesepakatan tarif sewa tangki timbun Kabil dan *Fuel Distribution System* (FDS) Avtur Kabil dan Bandara Hang andim antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Pertamina Patra Niaga nomor 40/A4.2/11/2014 Nomor 032/PPN100.120/BA/2014 dengan kesimpulan adalah:

FDS Avtur Kabil dan BUBU Hang Nadim:

- | | |
|--|---------------------|
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
2012 s/d 2013 | Rp 7.362.034.160,40 |
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
2014 s/d 2015 | Rp 8.082.805.797,72 |
| - Sewa FDS Avtur Kabil dan Bandara HN
mulai 2016 | Rp 8.896.274.988,47 |

Saat ini sampai dengan per 31 Desember 2018 Kontrak Perpanjangan antara PT Patra Niaga dengan BUBU Hang Nadim masih dalam proses.

- h. Berdasarkan Kesepakatan Standar Pelayanan (*Serviced Level Agreement/SLA*) Pengoperasian Kapal Tunda di Pelabuhan Batam Nomor 04/PER.PL/04/2010 /Nomor 068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang kemudian diubah dengan kesepakatan Nomor 08/PERJ.PL/9/2010 / Nomor 032/KS.PL/IX/2010 tanggal 1 September 2010. Otorita Batam mengadakan kerjasama dengan **PT Pelayaran Kurnia Samudra** untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa tunda (dengan pengoperasian kapal tunda TB. Putra I) untuk dioperasikan di Pelabuhan Batu Ampar. Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun sampai dengan 28 April 2012 dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan perjanjian tersebut PT Pelayaran Kurnia Samudra wajib menyediakan kapal tunda yang layak dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang sah dan masih berlaku.

Berdasarkan Kesepakatan awal (tanggal 30 April 2010), masing-masing pihak berhak atas pendapatan dari jasa tunda dengan pembagian. Pihak Otorita Batam mendapatkan 20% dari *gross revenue*.

Perpanjangan Kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Level Agreement/SLA*) Pengoperasian Kapal Tunda TB Putra I di Pelabuhan Batam atas Perjanjian Nomor 04/PERJ.PL/04/2010 dan Nomor 068/KS/ADM/IV/2010 dengan Nomor 11/SPJ/A1.2/4/2012 dan Nomor 272/KS.ADM/IV/2012 antara Heri Kafianto yang menjabat Kepala Bidang Komersil Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Badan Pengusahaan Batam dengan Syahrul yang menjabat Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Kurnia Samudra. Jangka Waktu 3 (tiga) Tahun sesuai Surat Ijin Operasi yang diberikan yaitu Surat Ijin Operasi TB Putra Nomor PP.309/1/1Kpl.Btm.12 tanggal 27 April 2012.

Otorita Batam berhak memperoleh royalty dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

	<u>Gross revenue sebulan</u>	<u>%</u>
a.	Sampai dengan USD 30.000	10
b.	Lebih dari USD 30.000 sampai dengan USD 50.000	15
c.	Lebih dari USD 50.000	20

Peraturan tersebut diatas mengalami perubahan pertama Perjanjian Kerjasama Nomor 65/SPJ/A3.2/04/2015 dan 028/PKS/ADM/IV/2015 tanggal 7 September 2015 yang berisi perubahan kesepakatan pasal 6 tentang dasar pengenaan tarif dan administrasi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian berakhir sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
- b. Penerimaan atas pungutan jasa. Badan Pengusahaan Batam memperoleh hak sebesar 20% dan PT. Pelayaran Kurnia Samudra memperoleh hak sebesar 80%;
- c. Perhitungan tarif kegiatan yang menggunakan mata uang asing disesuaikan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Dasar perhitungan tarif rupiah adalah tarif yang berlaku dikalikan dengan kurs saat kegiatan selesai dilaksanakan;

2. Kurs yang digunakan adalah kurs jual penutupan Bank Indonesia satu hari sebelum kegiatan selesai.

- i. Pada tanggal 1 April 2011, dilakukan kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dengan **Politeknik Negeri Batam** dengan perjanjian kerjasama nomor 24/SPJ.Ang.4/4/2011 dan nomor 143/MOU.POLBAT/IV/2011. Jangka waktu perjanjian kerjasama tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2017 (perjanjian ini telah berakhir) tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pada Politeknik Negeri Batam. Perjanjian tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan bersama nomor 27/PERJ.KABP/12/2010/ Nomor 02/BP.YPB/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Kerjasama Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Politeknik Batam yang telah berakhir terhitung tanggal 31 Desember 2010.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk terus mensinergikan fungsi dan peranan masing-masing lembaga secara efektif dan efisien guna mendukung upaya program peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Pulau Batam.

Pembebanan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama menjadi beban dan tanggungjawab para pihak dengan mengacu kepada mekanisme penganggaran yang berlaku. Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan pembebanan yang diperlukan Politeknik Negeri Batam dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan ketersediaan Badan Pengusahaan Batam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan.

Pendapatan sewa atas pemanfaatan sarana dan prasarana milik Badan Pengusahaan Batam yang terletak di lingkungan Politeknik Negeri Batam kepada pihak ketiga/penyewa disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam. Pendapatan tersebut dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam cq Kepala Biro Keuangan dan Biro Umum.

Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan audit operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama paling sedikit satu (1) kali pada tiap tahun anggaran. YPB cq Direktur Politeknik

Batam wajib menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penggunaan kas/bank Politeknik Batam dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui kepada Badan Pengusahaan Batam paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak Pertama dapat melakukan audit operasional paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun.

- j. Perjanjian kerja sama No. 18/PERJ-PL/6/2011-38/SMP/6/2011 tanggal 6 juni 2011 tentang kerjasama pengelolaan Fasilitas Buoy Tambat di perairan Batu Ampar antara BP Batam dengan **PT Snepac Multiperkasa**. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun mulai 3 juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016. Dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 1535/SPJ/A3/12/2017 dengan jangka waktu 3 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Atas pendapatan kegiatan kapal tongkang yang tambat di Buoy tambat tersebut, BP Batam akan memperoleh 30%, sedangkan PT Snepac Multipekara akan memperoleh 70%. Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan dalam mata uang rupiah, perhitungan tarif kegiatan yang menggunakan mata uang asing agar disesuaikan dengan menggunakan mata uang rupiah. Perjanjian ini telah berakhir.
- k. Perjanjian kerjasama nomor 22/PERJ.PL/10/2011 dan Nomor 032/GS.OPS/X/2011 antara Otorita Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Otorita Batam dengan **PT Gemalindo Shipping** Tanggal 3 Oktober 2011 tentang perubahan ketiga Kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Level Agreement / SLA*) Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Batam yang sebelumnya para pihak pada tanggal 1 April 2010 telah mengikatkan diri kedalam kesepakatan Standar Pelayanan (*Service Agreement/SLA*) Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Batam Nomor 03A/PERJ.PL/4/2010 dan Nomor 013/gs.ops/iv/2010. Kesepakatan tersebut berakhir pada tanggal 1 Oktober 2010. dan perjanjian ini telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir nomor 78/SPJ/A3.2/05/2015 dan 20/GS.Dir/V/2015 tanggal 28 Mei 2015. Jangka waktu perjanjian ini adalah 6 (enam) tahun terhitung tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.
- l. Perjanjian kerjasama nomor 213/SPJ/A1/10/2012 dan Nomor 012/DIR.BDP/X/2012 antara Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Saranan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan **PT Bias Delta Pratama** tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan di perairan wajib pandu pada perairan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani, diperpanjang melalui perjanjian dengan Nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 – 0068/BDP-DIR/X/2017 pada tanggal 8 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 11 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

- a. Evaluasi pada 1 (satu) tahun pertama;
- b. Peninjauan dan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa peninjauan berakhir. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama akan mengadakan kajian tentang pelaksanaan pemanduan pada perairan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan guna menjamin keselamatan pelayaran dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu kelas II Tanjung Uncang, Batam dan untuk memenuhi tersedianya sarana dan prasarana pemanduan. tenaga pandu serta untuk dapat saling memberikan kontribusi kepada para pihak.

Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018 pada hari Rabu tanggal 12 September 2018. Dengan perhitungan bagi hasil/*sharing* berdasarkan persentase atas *gross revenue* adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebesar 20% dari *gross revenue*;
2. Pendapatan PT Bias Delta Pratama sebesar 75% dari *gross revenue*; dan

3. PNBPN Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan adalah sebesar 5% dari *gross revenue*.

Kewajiban BP Batam adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh PT Bias Delta Pratama.

Hak BP Batam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pandu dari PT Bias Delta Pratama;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di perairan wajib pandu; dan
- d. Mendapatkan pembagian *gross revenue* sebesar 20%.

Kewajiban PT Bias Delta Pratama adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu di lingkungan badan perusahaan batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
- c. Menyediakan petugas pandu sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- d. Berkoordinasi dengan BP Batam dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal;
- e. Melaksanakan segala peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh BP Batam; dan
- f. Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak PT Bias Delta Pratama adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi dari BP Batam mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - b. Mendapatkan informasi dari BP Batam tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan Kerja BP Batam; dan
 - c. Mendapatkan bagi hasil jasa pemanduan sebesar 75 % dari *gross revenue*.
- j. Perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan **PT Citra Tritunas** Tentang Kerjasama Pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay. Di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No.453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL/VII/2013. Masa berlaku perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa berlaku Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak Badan Pengusahaan Batam :

1. Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay.
2. Kegiatan Pengawasan pelayaran dan lalu lintas kapal diatur oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Pengusahaan Batam berhak atas pendapatan dari Jasa Labuh, Jasa Tambat, dan Royalti Pass Penumpang sesuai perjanjian ini.
4. Badan Pengusahaan Batam berhak mengajukan usulan maupun pertimbangan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan dan eksistensi Perjanjian, termasuk teguran apabila dalam melaksanakan kegiatannya PT. Citra Tri Tunas tidak mengindahkan ketentuan, menimbulkan dampak negatif, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi pelayanan pelabuhan umum.

5. Badan Pengusahaan Batam berhak untuk dari waktu ke waktu menetapkan/mengubah tarif Pass Penumpang sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku.
6. Badan Pengusahaan Batam berhak menempatkan 1(satu) orang perwakilan untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan PT. Citra Tri Tunas terhadap kewajibannya selaku penyelenggara pelabuhan umum, dan segala biaya yang timbul atas penempatan tersebut dibebankan kepada PT. Citra Tri Tunas.

Sedangkan Kewajiban dan Hak PT. Citra Tri Tunas adalah :

1. Wajib melaksanakan kegiatan Pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standard internasional pengelolaan Terminal Penumpang.
2. Wajib membuat dan menyerahkan laporan bulanan operasional kepada Badan Pengusahaan Batam secara periodic.
3. Wajib menyetorkan royalty pass penumpang ke rekening Badan Pengusahaan Batam sesuai pola perhitungan royalty yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% dari pendapatan jasa labuh dan sebesar 50% dari pendapatan jasa tambat; dan
 - b. Royalti Pass Penumpang.

Tahun

Royalti

Tahun ke 0 s.d tahun ke.5	10 <i>revenue</i> pass penumpang
Tahun ke. 6 s.d tahun ke.10	15 <i>revenue</i> pass penumpang
Tahun ke. 11 s.d seterusnya	20 <i>revenue</i> pass penumpang

4. Bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan ruangan, gedung, ponton ferry dan fasilitas lainnya, termasuk penerangan, jalan, dan jembatan pada area Kompleks Terminal Penumpang dan wajib memperbaiki setiap kerusakan yang ada atas biaya dan upaya PT. Citra Tri Tunas.
5. Wajib membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang menguraikan Revenue/Pendapatan dari Pass Penumpang selama 1(satu) tahun yang dibuat sesuai

dengan Standar Akuntansi Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntans Publik yang mempunyai reputasi Internasional dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam.

6. Berhak atas keuntungan opsional setelah dikurangi kewajiban pembayaran Royalti Pass Penumpang yang merupakan hak Kanpel BP Batam, dan PT. Citra Tri Tunas bertanggung jawab atas pembayaran pajak serta biaya lainnya bagi kepentingan operasional Terminal Penumpang.

Perjanjian antara BP Batam dengan PT. Citra Tri Tunas di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No. 453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 dengan menambahkan perjanjian untuk pengelolaan terminal domestic yang mengatur tentang pengenaan dasar perhitungan Royalty pass penumpang untuk terminal domestik sebesar 10% dari pendapatan pass penumpang untuk diserahkan kepada Badan Pengusahaan Batam.

- k. Pada tanggal 5 Mei 2017, BP Batam melalui BUBU Hang Nadim mengadakan Berita Acara Kesepakatan dengan **PT Gemalindo Air Support** sebagai pengganti sementara selama Perjanjian Kerjasama dalam proses pembuatan TMT 01 Januari 2017. Mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pihak Pertama menerima Royalty untuk GSE sebesar 4% dan Konsesi Fee Pendapatan 5%;
 - Tarif Shelter Sementara ditetapkan sebesar Rp58,000/m² sesuai tariff pergudangan berdasarkan Perka nomor 18 tahun 2016; dan
 - Apabila tarif yang ditetapkan dari hasil penilaian DJKN Kanwil Riau lebih rendah maka akan dilakukan penagihan kurang tagih dan apabila tariff yang ditagihkan lebih tinggi maka akan dilakukan konversi pada penagihan periode berikutnya.
- l. Pada tanggal 7 Januari 2019 BP Batam melalui BUBU Hang Nadim mengadakan Adendum III tentang kerja sama dengan **PT. Adhil Sukses Pratama** dengan nomor 04/ADD/A3.1/4/2019.

Berdasarkan addendum tersebut para pihak sepakat untuk:

- Jangka waktu perjanjian diperpanjang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak.
- Pihak Pertama berhak untuk memperoleh pendapatan Biaya masuk yang besarnya sesuai dengan peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 tahun 2016.
- Menghapus royalty Pihak Pertama

Adendum Perpanjangan kontrak berikutnya masih diproses pihak Legal.

- m. Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2015 mendapatkan **Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah Korea** dengan pagu sebesar Rp123.555.600.000,00 yang digunakan untuk pembangunan saluran air limbah di pulau Batam.

Proyek pengembangan saluran air limbah di Pulau Batam dilaksanakan selama 39 bulan dimana untuk kontrak konsultan DED dan supervisi ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 3.847.077,49 dimana untuk kegiatan desain rinci sebesar US\$ 2.247.530,47 dan supervisi US\$ 1.599.547,02. Dimana pada Tahun Anggaran 2015 BP Batam dapat alokasi dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp123.555.600.000,00 dari pagu tersebut terealisasi berdasarkan nilai SPM yang diterbitkan oleh KPPN (KKPN KPH) adalah sebagai berikut :

1. Uang Muka US\$ 769.415 Kurs 12.605,63 Ekuivalen Rupiah (Rp9.698.957.653,00)
2. Termin I US\$ 359.604.87 Kurs 12.908,33 Ekuivalen Rupiah (Rp4.641.899.591,00)
3. Termin II US\$ 359.604.87 Kurs 12.897,52 Ekuivalen Rupiah (Rp4.638.012.022,00)
4. Termin III US\$ 539.407.32 Kurs 12.897,52 Ekuivalen Rupiah (Rp6.957.018.033,00)
5. Termin IV US\$ 529.407.33 Kurs 12.865,09 Ekuivalen Rupiah (Rp6.810.872.775,00)

Total (Rp32.746.760.074,00)*

**Nilai yang disajikan adalah nilai sesuai SPM dan perhitungan Kurs Valas yang berasal dari sistem.*

Dari pagu anggaran 2015 sebesar Rp123.555.600.000,00 terealisasi selama Tahun 2015 sebesar Rp32.746.760.074,00 sisa Rp90.808.839.926,00, tersisanya anggaran tersebut

disebabkan belum terlaksananya kontrak/gagal kontrak untuk kegiatan fisik proyek pengembangan system saluran air limbah di Pulau Batam.

Pada Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan tersebut diatas terealisasi berdasarkan nilai SPM yang diterbitkan oleh KPPN (KKPN KPH) adalah sebagai berikut :

1.Termin V US\$ 127.963,76 Kurs 13.729,97 Ekuivalen Rupiah	(Rp1.756.938.447,00)
2.Termin VI US\$ 127.963,76 Kurs 13.729,97 Ekuivalen Rupiah	<u>(Rp1.756.938.447,00)</u>
Total	(Rp3.513.876.894,00)*

**Nilai yang disajikan adalah nilai sesuai SPM dan perhitungan Kurs Valas yang berasal dari sistem.*

Pada Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan tersebut diatas terealisasi berdasarkan nilai SPM yang diterbitkan oleh KPPN (KKPN KPH) adalah sebagai berikut :

1. US\$ 424.676,78 Kurs 13.689,28 Ekuivalen Rupiah	(Rp5.813.520.688,00)
2. US\$ 127.963,76 Kurs 14.054,30 Ekuivalen Rupiah	(Rp1.798.440.930,00)
3. US\$ 789.271,71 Kurs 14.450,51 Ekuivalen Rupiah	(Rp11.405.381.659,00)
4. US\$ 1.240.081,13 Kurs 13.816,00 Ekuivalen Rupiah	(Rp17.132.975.069,00)
5. US\$ 127.963,76 Kurs 13.773,21 Ekuivalen Rupiah	(Rp1.762.472.238,00)
6. US\$ 42.871,39 Kurs 14.587,94 Ekuivalen Rupiah	(Rp625.405.205,00)
7. US\$127.963,76 Kurs 14.000,25 Ekuivalen Rupiah	(Rp1.791.523.979,00)
8. US\$ 485.353,12 Kurs 15.135,91 Ekuivalen Rupiah	(Rp7.346.261.112,00)
9. US\$ 564.075,23 Kurs 14.745,31 Ekuivalen Rupiah	(Rp8.317.461.733,00)
10. US\$ 520.835,03 Kurs 14.472,10 Ekuivalen Rupiah	(Rp7.537.577.833,00)
11. US\$ 1.614.697,45 Kurs 14.618,27 Ekuivalen Rupiah	(Rp23.604.084.140,00)
12. US\$ 905.385,29 Kurs 14.904,14 Ekuivalen Rupiah	(Rp13.493.991.023,00)
13. US\$127.963,76 Kurs 14.302,95 Ekuivalen Rupiah	<u>(Rp1.830.259.500,00)</u>
Total	(Rp102.459.355.109,00)*

**Nilai yang disajikan adalah nilai sesuai SPM dan perhitungan Kurs Valas yang berasal dari sistem.*

Dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp193.621.568.000,00 terealisasi selama Tahun 2019 sebesar Rp140.822.819.470,00. Pada Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan tersebut diatas terealisasi berdasarkan nilai SPM yang diterbitkan oleh KPPN (KKPN KPH) dapat dirinci sebagai berikut :

1. (Rp2.210.993.472,00)	11. (Rp23.409.101.626,00)
2. (Rp3.477.395.540,00)	12. (Rp247.510.169,00)
3. (Rp7.015.171.448,00)	13. (Rp8.632.143.589,00)
4. (Rp18.931.012.312,00)	14. (Rp6.119.617.645,00)
5. (Rp1.822.459.869,00)	15. (Rp17.911.742.346,00)
6. (Rp1.671.166.648,00)	16. (Rp5.995.235.173,00)
7. (Rp8.084.860.710,00)	17. (Rp14.599.322.893,00)
8. (Rp3.134.438.307,00)	18. (Rp1.796.874.138,00)
9. (Rp1.621.363.669,00)	19. (Rp4.950.422.405,00)
10. (Rp2.761.290.889,00)	20. (Rp6.430.696.622,00)
Total (Rp.140.822.819.470,00)	

- n. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/TUN/2017 antara PT. Sumber Alam Sejahtera dengan Badan Pengusahaan Batam menyatakan **PT. Sumber Alam Sejahtera** harus mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2015 sebesar Rp1.613.847.100,45 karena menurut obyek sengketa pembayaran telah diterima PT. Sumber Alam Sejahtera telah melebihi prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- o. Hasil Notulen Rapat antara BP Batam dengan **PT. Indodharma Coprpora** dan Tim Jaksa Pengacara Negara menyepakati hal sebagai berikut:
1. Royalti Bulanan tahun 2007 s.d 2018 sebesar Rp1.020.465 dan SGD390.723,91
 2. Royalti Progresive tahun 2011 s.d 2017 sebesar Rp16.846.219.236,00
 3. Denda keterlambatan pembangunan sebesar Rp280.318.425,00
 4. Denda keterlambatan tahun 2007 s.d 2018 sebesar Rp1.937.449.167,58 dan SGD14.559,15

5. Koreksi atas kelebihan pembayaran, dana titipan sebesar Rp1.139.662.539 dan SGD65.382,70
 6. Usulan PT. Indodharma Corpora mengenai pembayaran PPh 23 atas rotalti BP Batam yang telah dibayarkan ke Kas Negara sebesar Rp1.215.962.932 akan dipertimbangkan BP Batam sebagai nilai pengurang terhadap kewajiban PT. Indodharma Corpora sesuai dengan ketentuan perpajakan.
 7. Terkait asuransi PT. Indodharma Corpora masih akan mengajukan keberatan dan BP Batam akan mempertimbangkan kembali
 8. PT. Indodharma menyatakan keberatan terkait pasal 28 perjanjian terkait jasa kontribusi pass penumpang sebesar 25%, namun BP Batam menyatakan bahwa terkait pasal 28 telah disepakati bersama di dalam perjanjian sehingga BP Batam meminta PT. Indodharma Corpora menyikapi dengan itikad baik.
- p. Perjanjian Kerja Sama Nomor 180/KTR/II-03/1218 dan 1039/SPJ/A3/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta **Program Jaminan Kesehatan**, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- q. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor PER/18/122018 dan 977/SPJ/A3/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta **BPJS Ketenagakerjaan**, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Ruang lingkup perjanjian meliputi :
- a. Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta.
 - b. Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan
 - c. Hak dan kewajiban
 - d. Administrasi
 - e. Sanksi

- r. Perjanjian Kerja Sama Nomor 35.12/AJII/KOP-PKU/KTR/1217 dan 1746/SPJ/A3/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan **PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Pemberian pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik yang disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Otorita-BP Batam.
 - b. Pemberian jasa medis, penunjang medik untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang diberikan secara professional yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medik secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
 - c. Pemberian fasilitas kelas rawat inap yang menjadi hak peserta tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pemberian pelayanan obat-obatan/material kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Otorita-BP Batam dan Mandiri Inhealth yaitu dengan mengacu pada formularium rumah sakit dan formularium nasional.
- s. Perjanjian Kerja Sama Nomor P/07/SP/2016 dan SPJ/35/A3.3/03/2016 tanggal 7 Maret 2016 dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Terpadu dengan jangka waktu 5 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 2 Maret 2021.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Pertukaran informasi dan penyelarasan data.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan.
- d. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Sistem penjaminan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

- t. Perjanjian nomor 21/SPJ/KA/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Pengalokasian Tanah untuk keperluan pembangunan, pengelolaan, penyerahan kembali (Build, Operate & Transfer) tanah dan terminal ferry penumpang di Nongsa antara Otorita Batam dengan **PT Nongsa Terminal Bahari**. Adapun perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sampai tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak PT Nongsa Terminal Bahari adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib membangun Terminal Ferry Penumpang di atas tanah mentah atas bagian.bagian tanah hak pengelolaan Otorita Batam mulai tanggal efektif diterimanya surat izin membangun dari Otorita Batam
- 2) Terhitung sejak tanggal efektif diterimanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Otorita Batam sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah & Terminal Ferry Penumpang. PT Nongsa Terminal Bahari berhak untuk menjamin/menggunakan sebagai anggunan hak.hak yang timbul dari perjanjian ini kepada Bank/Lembaga Keuangan dan Penyandang dana tersebut diizinkan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penerima hak-hak tersebut dengan syarat bahwa pihak yang akan ditunjuk akan tunduk pada syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- 3) Otorita Batam memberikan hak tunggal kepada PT Nongsa Terminal Bahari untuk mengelola Terminal Ferry Penumpang beserta fasilitas penunjangnya untuk Wilayah Pantai Timur Sub Wilayah Nongsa sejak tanggal selesai pembangunan sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah dan terminal Ferry Penumpang.
- 4) Selama Jangka waktu mengelola Otorita Batam setuju untuk memberi hak tunggal kepada PT Nongsa Terminal Bahari untuk menguasai, mengelola, menempati, menggunakan dan menyewakan tanah dan Terminal Ferry Penumpang serta fasilitas lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, menurut harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT Nongsa Terminal Bahari dan menerima seluruh penghasilan apapun dari penyewa dan atau pengelolaan tersebut.
- 5) PT Nongsa Terminal Bahari wajib membayar:
 - a. Biaya Perawatan dan perbaikan Terminal Ferry Penumpang; dan

- b. Biaya pemakaian semua fasilitas antara lain listrik, air segala jenis dan bentuk pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 6) PT Nongsa Terminal Bahari berhak menarik semua punggutan antara lain berupa Terminal Fee yaitu Pass Penumpang untuk tujuan luar negeri dan menyewakan ruangan serta fasilitas dalam arti yang menyangkut aktivitas pelabuhan.
- 7) PT Nongsa Terminal Bahari berhak sepenuhnya untuk memiliki hasil punggutan lainnya yang diperoleh dari pengelolaan Terminal Ferry Penumpang selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini. Kecuali uang Labuh Tambat adalah menjadi hak Otorita Batam.
- 8) PT Nongsa Terminal Bahari Bertanggung jawab atas biaya Pemeliharaan Terminal Ferry Penumpang serta pengerukan alur pelayaran mulai dari muara sungai Nongsa sampai di Terminal sehingga alur pelayaran tersebut dapat dilayari oleh Ferry/kapal-kapal dengan 219 ancer dan aman.
- 9) PT Nongsa Terminal Bahari menjamin agar selama perjanjian berlaku pihak kedua wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan baik. Meskipun terjadi perubahan/penggantian pengurus, anggaran dasar atau struktur pemilikan saham dan PT Nongsa Terminal Bahari wajib segera memberitahukan secara tertulis setiap perubahan/penggantian demikian kepada Otorita Batam.

Sedangkan hak & kewajiban Otorita Batam adalah:

- 1) Otorita Batam Wajib untuk mengusahakan didapatkannya dan atau mengeluarkannya semua izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dan disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.
- 2) Otorita Batam Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan rambu.rambu navigasi dan pengerukan alur pelayaran yang berada di luar muara sungai Nongsa (dilaut).
- 3) Otorita Batam Wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban.kewajiban berdasarkan perjanjian dengan baik. Dan apabila ternyata terjadi perubahan pejabat atau susunan organisasi Otorita Batam yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini. Otorita Batam wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT Nongsa Terminal Bahari.
- 4) Otorita Batam mengkoordinir dan menjamin agar pelaksanaan dari perjanjian ini memperoleh dukungan dari instansi Pemerintah terkait. Termasuk dan tidak terbatas

pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

- 5) Otorita Batam membantu secara layak PT Nongsa Terminal Bahari atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT Nongsa Terminal Bahari dalam pengurusan perizinan atau penyelesaian surat-surat yang diperlukan oleh Instansi yang berwenang yang berhubungan dengan tanah dan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.

- u. Kerjasama antara BP Batam dengan **PT Port Sekupang Batam dan PT Daily Express** tentang Pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor 190/SPJ/A3/8/2014 – 001/PKS-PSB/VIII/2014 – 001/PKS-DE/VIII/2014 pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara PT Daily Express dan PT Port Sekupang Batam tentang pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor PJS/DE/001/2010 – PJS/PSB/01/2010 pada hari Rabu tanggal 08 September 2010. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Pembagian pendapatan diatur dalam persentase sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN	BP BATAM	Port Sekupang Batam
1	Labuh	100%	-
2	Tambat	50%	50%
3	Uang Dermaga	10%	90%
4	Chasis Fee	50%	50%
5	Penumpukan	-	100%
6	Sewa Gedung	-	100%

- v. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)** tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

- 1) PNBP sebesar 25% dari Gross Revenue yang terdiri dari:
 - PNBP BP Batam sebesar 20% dari *gross revenue*; dan
 - PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *gross revenue*.
- 2) Pendapatan pihak kedua sebesar 75% dari *gross revenue*.
- 3) Biaya-biaya transfer (apabila ada) ditanggung dan menjadi beban masing-masing pihak.

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pandu dari pihak kedua;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di perairan wajib pandu; dan
- 4) Mendapatkan pembagian *gross revenue* sebesar 20% dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
- 2) Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- 3) Mendapatkan bagi hasil atas jasa pemanduan dan penundaan kapal sebesar 75% dari *gross revenue*.

Kewajiban pihak kesatu sebagai berikut:

- 1) Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh Pihak kedua; dan

3) Melakukan penyocokan data setiap tanggal 5 di bulan berikutnya.

Kewajiban pihak kedua sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai pada perjanjian kerjasama;
- 3) Menyediakan Petugas Pandu sesuai ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
- 5) Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pemberdayaan SDM sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
- 7) Memberikan pembagian *gross revenue* sebesar 20% dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal; dan
- 8) Memfasilitasi kegiatan penyocokan data setiap tanggal 5 di bulan berikutnya.

w. Perjanjian kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan **PT Bintang Sembilan Sembilan Persada** nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018. Perjanjian ini mengenai kerjasama konsesi kegiatan perusahaan pelabuhan umum di batu ampar wilayah pengembangan sungai panas. Jangka waktu perjanjian adalah 30 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan sepanjang tidak ada pengakhiran sebelum waktunya. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan persyaratan pendahuluan kerjasama;
- 2) Kegiatan perusahaan pelabuhan;
- 3) Pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan fasilitas di area konsesi;
- 4) Pembiayaan untuk investasi dan realisasi biaya untuk operasional termasuk seluruh biaya pemeliharaan pelabuhan dengan mengacu kepada *business plan*;

- 5) Pembayaran pendapatan konsesi; dan
- 6) Penyerahan asset hasil konsesi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pendapatan pihak pertama dalam hal ini, sebagai berikut:

- 1) Jasa labuh sebesar 100%;
- 2) Jasa tambat sebesar 50%;
- 3) Pendapatan *chassis fee* 50% untuk jasa layanan ro-ro;
- 4) Pendapatan konsesi sebesar Rp6.829.000.000,00; dan
- 5) Dalam hal 10% dari pendapatan total pihak kedua telah melebihi besaran pendapatan konsesi, maka pihak kedua wajib membayarkan pendapatan konsesi kepada BP Batam sebesar 10% dari pendapatan total setiap tahunnya.

Pembayaran untuk layanan jasa labuh, jasa tambat dan ro-ro dilaksanakan dengan system *Host to Host* mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam, pembayaran untuk pendapatan konsesi dilaksanakan setiap bulan, dengan tagihan yang dibuat oleh Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam setiap tanggal 10 bulan berjalan. Pihak kedua wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan dari Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam paling lambat 10 hari sejak tagihan diterima.

Pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah biaya konsesi yang harus dibayar oleh pihak kedua. Jika pihak kedua lalai atau terlambat dalam melakukan pembayaran atas tagihan maka wajib membayar denda keterlambatan kepada BP Batam sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari yang dihitung dari nilai/besarnya tagihan selama maksimum 30 hari kalender.

H.2 HAL PENTING LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2019 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan Laporan bahwa di negara China terjadi kasus penyakit pernapasan di Kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO kemudian mengumumkan wabah ini menjadi darurat global (*global emergency*) pada tanggal 30 Januari 2020. Virus Covid 19 (*Corona Virus Disease*) tersebut masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan darurat Kesehatan masyarakat. Atas peristiwa ini pemerintah mengumumkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Nasional

yang tentu saja akan berpengaruh secara signifikan terhadap Laporan Keuangan terutama ditahun 2020. Maka dari itu sehubungan dengan dampak Covid 19 terhadap laporan keuangan dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh terhadap pembiayaan aset yang masih dalam pengerjaan di tahun 2019
2. Penyerapan Anggaran tahun 2020 diperkirakan akan sangat rendah terutama pada pengadaan barang dan jasa dikarenakan seluruh kegiatan tender/lelang dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan.
3. Adanya pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penanggulangan bencana pandemic Covid 19 dari program pengelolaan dan penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam (06) ke program dukungan manajemen tugas teknis lainnya BP Batam (01) sebesar Rp152.654.461.000,00 yang dialokasikan pada kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, kesekretariatan dan pengadaan barang/jasa (5114).
4. Penerimaan PNBK tahun 2020 akan terpengaruh secara signifikan dikarenakan sektor pelayanan Penerbangan Komersial mengalami penurunan sejak Januari 2020 dan pada pertengahan April dihentikan hingga juni 2020. Hal yang sama terjadi pada sektor Pelabuhan.

LK BP BATAM ^{TAHUN} 2019

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019